



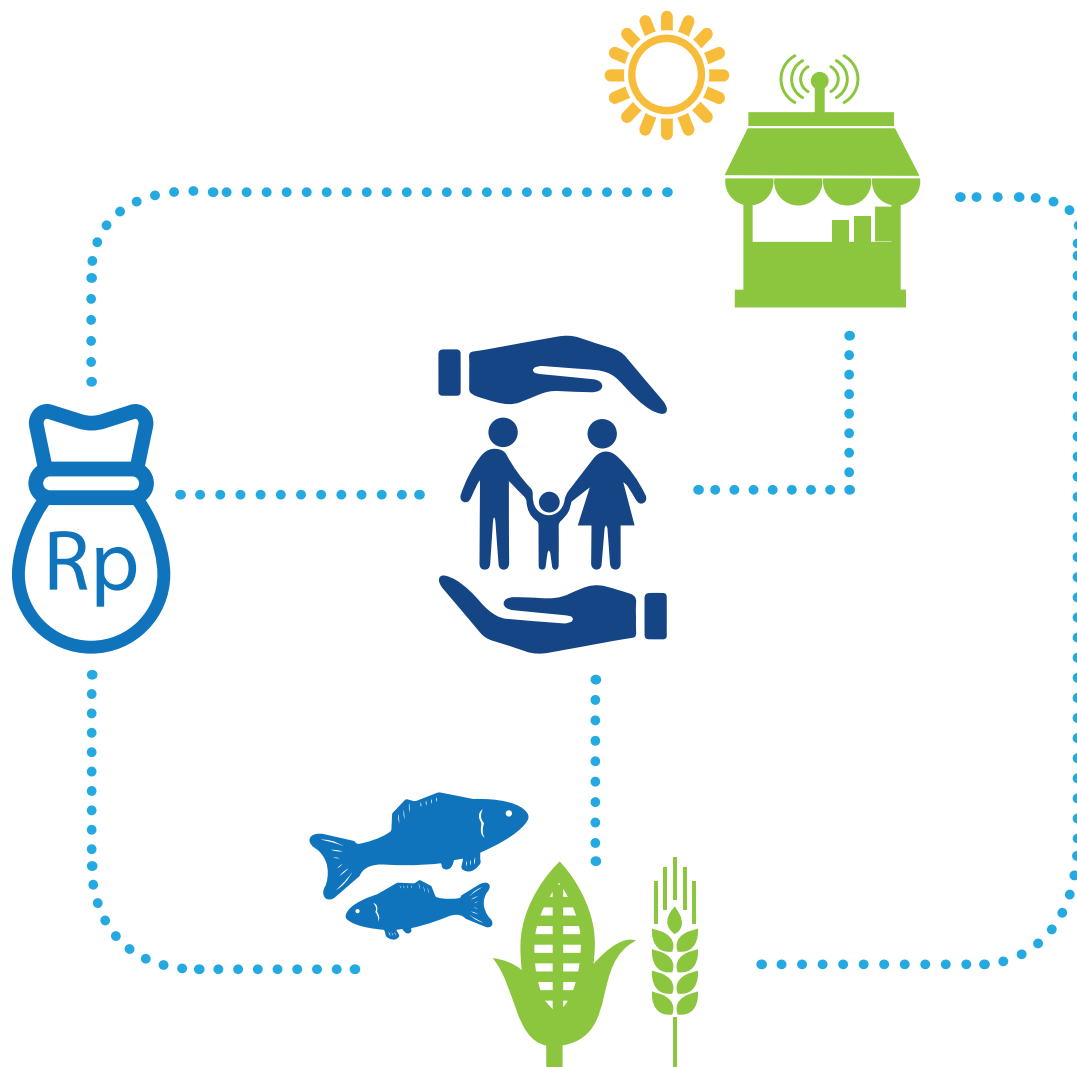
KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



Australian Government

Penguatan Peluang Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan

Studi Kasus di Empat Kabupaten di Jawa



Penguatan Peluang Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan:
Studi Kasus di Empat Kabupaten di Jawa

Cetakan Pertama, Februari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
©2020 MAHKOTA

Penulis SMERU

Ana Rosidha Tamyis
Akhmad Ramadhan Fatah
Dyan Widyaningsih
Fatin Nuha Astini
Gema Satria Mayang Sedyadi
Hafiz Arfyanto
Jimmy Daniel Berlianto Oley
Michelle Andrina
Muhammad Adi Rahman
Nila Warda
Nina Toyamah
Veto Tyas Indrio
Widjajanti Isdijoso

Penulis MAHKOTA

Karishma Huda
Diah Hidayati

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan non-komersial.

MAHKOTA (Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh dan Sejahtera, 2015-2021) adalah program yang didanai Pemerintah Australia, yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sistem perlindungan sosial dan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

MAHKOTA Program

Lantai 8, Grand Kebon Sirih, Jalan Kebon Sirih 35, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Email: communications@mahkota.or.id

Penguatan Peluang Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan: Studi Kasus di Empat Daerah di Jawa

Februari 2020

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan yang sangat besar dari banyak pihak. Untuk itu, kami (MAHKOTA dan SMERU) menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pemerintah Australia yang mendukung pelaksanaan kajian dan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Khususnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Harry Hikmat selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Bapak Adhy Karyono selaku Kepala Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal, dan Bapak M.O. Royani selaku Direktur Jaminan Sosial Keluarga di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atas bimbingan yang mereka berikan sepanjang pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak Daniel Nugraha atas masukan dalam desain dan penyelesaian laporan penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah penelitian atas informasi berharga mengenai pelaksanaan PKH dan dukungan selama kegiatan pengumpulan data di lapangan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada pemerintah daerah di wilayah penelitian, terutama kepada para kepala dinas, camat, kepala desa/lurah beserta staf yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci lainnya di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat atas segala informasi berharga untuk penelitian ini. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua anggota keluarga penerima PKH yang telah bersedia diwawancarai dan meluangkan waktu yang berharga. Terakhir, kami berterima kasih kepada peneliti daerah dan enumerator di wilayah penelitian yang telah membantu tim peneliti SMERU dalam pelaksanaan wawancara dan pengumpulan informasi.

SAMBUTAN MENTERI SOSIAL



Pada lima tahun mendatang (2020 – 2025), Pemerintah akan fokus pada pembangunan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6.0% - 7.0% dan 3.6% - 4.3% pada 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 75.54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan percepatan pembangunan diberbagai bidang termasuk integrase program perlindungan sosial, sehingga dapat mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan.

Program Keluarga Harapan (PKH), sebagaimana program bantuan tunai bersyarat di banyak negara, dirancang untuk mengurangi kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan akses terhadap layanan Pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan/mengembangkan SDMnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kondisi kesehatan, status gizi dan tingkat Pendidikan keluarga penerima manfaat. Namun demikian, kemampuan program dalam meningkatkan perekonomian keluarga masih sangat terbatas, yang tercermin dari rendahnya proporsi keluarga penerima manfaat yang lulus (graduasi) hingga 2019 hanya sekitar 12 persen dari keluarga penerima manfaat tahun 2017 dan 2018 yang graduasi. Lemahnya kemampuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga ini antara lain disebabkan masih rendahnya keterpaduan program PKH dengan program pemberdayaan ekonomi yang lain, misalnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI).

Studi ini menjadi sangat relevan dalam rangka meningkatkan keterpaduan program PKH dengan program yang memberikan dukungan peningkatan ekonomi. Hinga saat ini, isu hambatan dalam pengembangan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan dalam keluarga penerima manfaat PKH – yang dibahas dalam laporan ini – belum banyak digali. Adanya rekomendasi mengenai peluang penguatan penghidupan keluarga PKH, serta pengaturan kelembagaan dan system pelaksanaan program yang diperlukan untuk memastikan bahwa keluarga PKH dapat mengakses peluang pengembangan penghidupan, tentunya merupakan masukan yang sangat berharga bagi pengembangan program dan peningkatan keterpaduan antar program dimasa yang akan datang, sehingga dapat mempercepat kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat PKH.

Jakarta, Februari 2020
Menteri Sosial Republik Indonesia



Juliari P. Batubara

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Sejak itu cakupan penerima bantuan mencapai 10 juta keluarga dengan tujuan mengurangi kemiskinan antargenerasi. Evaluasi dampak dari Program Keluarga Harapan menunjukkan bahwa setelah enam tahun pelaksanaannya, program ini telah secara signifikan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Namun, ini bukan pengganti pekerjaan dan karena itu belum membantu keluarga untuk mandiri dalam hal mata pencarian mereka (Cahyadi et al. 2018; TNP2K, 2015). Namun, penelitian yang berfokus mengenai pencapaian tujuan tersebut masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini (yang ditugaskan oleh Pemerintah Australia melalui program MAHKOTA) berupaya mengidentifikasi hambatan yang dihadapi keluarga PKH dalam memperoleh mata pencarian berkelanjutan dan intervensi yang diperlukan untuk memperkuat peluang ekonomi mereka.

Penelitian ini dilakukan di empat kabupaten di Jawa, mewakili tipologi yang berbeda: semi-perkotaan (kota Surakarta), perkotaan (kabupaten Bandung Barat), pedesaan (kabupaten Pacitan), dan pesisir (kabupaten Indramayu). Data lapangan dikumpulkan pada bulan Maret 2019 melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan anggota keluarga usia kerja 15-59 tahun) dalam keluarga PKH, pemerintah dan pelaku sektor swasta di tingkat kecamatan; survei kuantitatif yang mencakup 200 rumah tangga penerima PKH (539 responden dalam keluarga PKH), serta melalui analisis data sekunder terhadap Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan kajian dokumen.

Secara umum, studi ini menemukan adanya permintaan yang relatif tinggi akan pekerjaan dari anggota keluarga penerima PKH. Meskipun tingkat pengangguran di antara anggota keluarga penerima PKH yang termasuk angkatan kerja relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional, sekitar seperlima dari angkatan kerja tersebut menganggur. Sementara itu, sekitar 13 persen dari mereka masih bersekolah dan akan segera masuk angkatan kerja.

Sebagian besar orang dewasa dari usia kerja di keluarga PKH memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dengan modal mata pencarian yang terbatas dalam hal akses mereka ke sumber daya alam, infrastruktur, serta modal finansial dan sosial. Anggota keluarga yang memiliki usaha pertanian dan usaha mikro kecil menengah

(UMKM) mengelola usahanya dengan menggunakan metode dan keterampilan sederhana yang diperoleh secara turun-temurun. Selain itu, lebih dari sepertiga angkatan kerjanya menjadi pekerja/karyawan di sektor non-pertanian dengan tingkat kerentanan tinggi karena sebagian besar perusahaan tempat mereka bekerja tidak menawarkan kontrak kerja resmi. Menariknya, mereka yang berusia 15-30 tahun dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta memenuhi syarat untuk bekerja sebagai buruh berketerampilan tinggi, tetapi tidak dapat menembus pasar kerja formal, atau memiliki aspirasi pekerjaan yang tinggi dan berjuang untuk menemukan peluang yang 'tepat'. Padahal individu dalam kelompok usia ini memiliki potensi untuk mengubah ekonomi rumah tangga.

Beberapa anggota keluarga usia kerja PKH menerima informasi atau bantuan dari berbagai program pengembangan mata pencarian di daerah mereka, dan intervensi mata pencarian khusus PKH tidak mengarah pada dampak ekonomi yang substansial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial direkomendasikan untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koperasi dan UKM di tingkat nasional dan Dinas terkait di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk memastikan bahwa keluarga PKH mendapatkan manfaat dari intervensi mata pencarian komplementer yang tersedia. Percontohan inklusi produktif bagi keluarga PKH yang memiliki kapasitas usaha dapat mengubah potensi penghasilan mereka, akan tetapi bantuan tersebut harus diperluas ke anggota keluarga PKH dengan kemampuan usaha yang kuat dan tidak hanya untuk penerima PKH. Terakhir, upaya yang lebih besar untuk menghubungkan anggota keluarga PKH dengan pengusaha (bagi mereka yang ingin memasuki pasar kerja) atau dengan pembeli dari sektor swasta (untuk wirausaha UMKM) akan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan memaksimalkan keuntungan ekonomi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang Penelitian

Program bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan - PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan antar generasi dan saat ini telah menjangkau 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa perlindungan sosial - khususnya dalam bentuk bantuan langsung tunai - merangsang perekonomian dan mengakibatkan adanya peningkatan partisipasi dan produktivitas pasar tenaga kerja (McCord dan Slater, 2015). Program bantuan tunai bersyarat seperti PKH mendorong keluarga untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga memperkuat kualitas angkatan kerja suatu negara di masa depan. Evaluasi dampak dari Program Keluarga Harapan menunjukkan bahwa setelah enam tahun pelaksanaannya, program ini telah secara signifikan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Namun, ini bukan pengganti pekerjaan dan karena itu belum membantu keluarga untuk mandiri dalam hal mata pencarian mereka (Cahyadi et al. 2018; TNP2K, 2015). Hal ini sesuai dengan bukti lain yang menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai saja tidak dapat mengatasi hambatan struktural terhadap pekerjaan dan mata pencarian berkelanjutan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan rentan (McCord, 2018).

Dalam konteks ini, MAHKOTA menugaskan Lembaga Penelitian SMERU untuk melakukan analisis terperinci tentang lanskap kehidupan penerima manfaat PKH. Penelitian ini dilakukan dari Februari hingga Juni 2019 di empat kabupaten di Jawa. Daerah sampel mewakili keluarga PKH dengan berbagai sumber mata pencarian: sektor perikanan di wilayah pesisir Indramayu; sektor pertanian di pedesaan Pacitan; perusahaan mikro skala kecil di pinggiran kota Surakarta; dan pekerjaan formal atau informal di perusahaan kecil hingga menengah di perkotaan Bandung Barat. Ketersediaan dan jenis program mata pencarian di daerah-daerah ini juga bervariasi. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang mendalam mencakup total 200 keluarga penerima manfaat dan 539 responden. Tim peneliti menggunakan kerangka analisis kehidupan berkelanjutan sebagai lensa analitis, yang memungkinkan adanya hubungan antara berbagai bentuk modal yang dapat diakses keluarga PKH - manusia, fisik, keuangan, alam dan sosial - dan strategi mata pencarian yang mereka ingin capai (DFID, 1999).

Dalam hal modal manusia, lebih dari 60 persen populasi yang disurvei memiliki pendidikan SD atau lebih rendah, dengan angka mencapai 80 persen di Indramayu dan 68 persen di Pacitan. Anggota keluarga yang memiliki tingkat pendidikan SMA dan lebih tinggi biasanya berusia 15-30 tahun tetapi hanya 20 persen dari mereka yang menjadi bagian dari angkatan kerja.

Mata Pencarian Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Mata pencarian anggota keluarga PKH di kabupaten tempat penelitian terbagi menjadi empat kategori utama: pekerja pertanian (termasuk pemilik pertanian, pengelola pertanian, dan buruh di pertanian orang lain) - 36 persen; pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) - 18 persen; karyawan dengan upah di sektor formal dan informal - 38 persen; dan pekerja keluarga yang tidak dibayar - 8 persen.

Para petani dalam penelitian ini biasanya mengelola dengan modal yang minim dan alat sederhana. Terbatasnya akses mereka ke sumber daya alam - terutama air dan tanah - juga berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas dan profitabilitas. Kelangkaan modal finansial, manusia dan sosial semakin merongrong pemilik agribisnis keluarga PKH. Hanya 18 persen pemilik agribisnis PKH yang menjadi anggota koperasi tani meskipun koperasi ini menyediakan saluran pemasaran dan informasi penting tentang program pemerintah yang relevan.

Kebanyakan wirausahawan kecil dalam penelitian ini mengelola warung makan atau berdagang barang, seperti pakaian bekas atau suku cadang. Persediaan mudah didapat dan toko-toko ini sebagian besar dapat dikelola dari rumah atau dekat rumah, sehingga memungkinkan perempuan untuk tetap melakukan pekerjaan rumah tangga. Meskipun pemilik usaha kecil memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi daripada pekerja pertanian, sebagian besar anggota keluarga PKH di sektor ini mengalami hambatan dalam siklus bisnis karena alasan-alasan berikut: mereka tidak memiliki izin usaha; mereka tidak dapat memenuhi persyaratan kemasan, kebersihan dan standar konsumen dasar lainnya; mereka tidak memiliki keterampilan pembukuan keuangan; dan mereka tidak memiliki kualifikasi formal. Seperti halnya pemilik usaha pertanian, kendala modal keuangan membatasi peluang usaha anggota keluarga PKH di sektor ini.

Lebih dari setengah (57 persen) pekerja di sektor pekerjaan non-pertanian bekerja untuk usaha perorangan (dengan kurang dari 10 karyawan), sekitar seperempat (28 persen) bekerja untuk perusahaan menengah hingga besar, sekitar 10 persen bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah-rumah penduduk dan sekitar 5 persen bekerja di lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Sektor ini cenderung didominasi oleh laki-laki dan tingkat pendidikan di antara para pekerja ini umumnya lebih tinggi daripada di sektor lain. Responden yang mencari pekerjaan dengan upah menghadapi empat hambatan utama: informasi yang tidak memadai tentang peluang kerja; peluang kerja setempat yang terbatas di wilayah tempat tinggal mereka; adanya tanggung jawab mengurus keluarga; dan sedikitnya yang memperoleh kontrak kerja tertulis atau lisan. Proses pencarian pekerjaan juga dibatasi oleh modal finansial yang terbatas.

Meskipun responden dalam kelompok usia 15-30 umumnya berpendidikan lebih tinggi, hanya sekitar 14 persen memiliki pendidikan SMA yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan formal di perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Selain itu, 89 persen responden tidak pernah berpartisipasi dalam kursus sertifikasi atau pelatihan kejuruan.

Program Pengembangan Mata Pencarian

Menyadari adanya kendala yang dihadapi oleh anggota masyarakat, pemerintah daerah dan nasional menawarkan sejumlah besar skema pelatihan kejuruan dan intervensi lain untuk mengatasi hambatan terhadap pekerjaan. Namun, hanya 16 persen responden dalam penelitian ini yang pernah mendapat manfaat dari intervensi tersebut.

Berbagai kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah, misalnya, menjalankan kursus pelatihan teknis dan kejuruan di bidang pertanian dan perikanan. Informasi tentang kursus ini cenderung disampaikan dari mulut ke mulut atau melalui poster di kantor desa yang berarti bahwa sebagian besar keluarga PKH tidak mendengarnya. Jika mereka mengetahui tentang kursus-kursus ini, mereka mungkin tidak memenuhi persyaratan untuk

berpartisipasi atau memiliki dana yang diperlukan untuk sampai atau tinggal di tempat pelatihan tersebut. Selain pelatihan, beberapa skema pemerintah daerah yang menyediakan benih, pupuk bersubsidi dan alat pertanian, misalnya, tetapi ini cenderung disediakan melalui kelompok petani dengan pengecualian responden PKH sebagai anggotanya. Ketika ditanya apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan layanan ini untuk keluarga PKH, responden menyarankan mereka harus: membuka partisipasi dengan meniadakan persyaratan apa pun untuk keanggotaan kelompok atau kepemilikan modal; melengkapi pelatihan dengan menyediakan benih atau modal; dan menawarkan pelatihan teknik budidaya yang relevan dengan wilayah setempat.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten menjalankan intervensi bagi pemilik usaha seperti: pelatihan pemrosesan dan pengemasan barang-barang konsumen; pinjaman dan hibah untuk meningkatkan usaha yang ada; bantuan dalam mendapatkan izin usaha; dan konsultasi untuk menghubungkan bisnis kecil ke pasar yang lebih besar. Sekali lagi, keluarga PKH sering tidak mendapatkan informasi tentang peluang-peluang ini dan hanya 17 persen responden yang merasakan manfaat dari layanan ini. Responden yang mengikuti kursus melaporkan bahwa pelatihan tidak lengkap dan tidak cukup membantu dalam mengelola bisnis mereka.

Pemerintah kabupaten telah mencoba untuk mengatasi kesenjangan ini dan memberikan layanan dukungan yang lebih baik untuk pemilik usaha kecil. Dalam hal bantuan modal kepada pemilik usaha, skema hibah dan pinjaman terbatas ditawarkan kepada keluarga PKH tetapi sebagian besar bisnis mereka baru lahir dan berskala kecil, sehingga sulit untuk membuktikan kelayakan mereka memperoleh pinjaman kepada lembaga pemberi pinjaman. Selain itu, mereka juga tidak memiliki jaminan yang memadai untuk membantu menjamin pinjaman mereka. Sebagian besar responden PKH juga menghindari risiko dan memilih untuk tidak mengajukan pinjaman yang mungkin tidak dapat mereka membayar. Beberapa organisasi non-pemerintah menawarkan pinjaman lunak yang disertai dengan pelatihan tentang mengelola keuangan dan mengoperasikan usaha dan responden menganggap ini berguna. Namun sejauh ini, hanya beberapa responden di Bandung Barat yang telah mengakses pinjaman ini.

Dinas Tenaga Kerja setempat menjalankan intervensi tingkat nasional dan daerah untuk menghubungkan individu-individu dengan pekerjaan upahan di keempat kabupaten tempat penelitian. Intervensi ini termasuk pelatihan yang ditawarkan melalui pusat pelatihan keterampilan kejuruan, pelatihan berbasis kompetensi dan pameran pekerjaan. Mereka juga menawarkan pelatihan bagi mereka yang sudah terlibat di sektor-sektor tertentu yang ingin memperbarui keterampilannya agar tetap kompetitif. Sekali lagi, anggota keluarga PKH pada umumnya tidak mengetahui pusat pelatihan keterampilan kejuruan dan pelatihan berbasis kompetensi yang ditawarkan. Juga, beberapa orang yang telah berpartisipasi mengatakan bahwa pelatih tidak memiliki pengalaman industri dan layanan tersebut tidak membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dinas Tenaga Kerja juga menyelenggarakan pameran kerja secara rutin di Surakarta dan Pacitan yang bekerja sama dengan pengusaha di daerah tersebut, tetapi anggota keluarga PKH jarang dapat mengahadirinya.

Selain intervensi mata pencarian utama ini, beberapa program pelengkap dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas produktif keluarga PKH. Ini semua dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan mencakup manajemen keuangan dan pembinaan ekonomi melalui *Family Development Session* (dikenal sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga - P2K2), kelompok usaha melalui kelompok usaha bersama PKH (KUBE PKH) dan kios elektronik berbasis komunitas dan agen mobile banking dikelola melalui e-Warong KUBE PKH. Sementara P2K2 dilaksanakan di semua wilayah studi, KUBE PKH hanya ada di Bandung Barat dan Indramayu, dan e-Warong KUBE PKH hanya ditawarkan di Surakarta. Hampir semua responden telah berpartisipasi dalam P2K2, sekitar 20 persen berpartisipasi di e-Warong KUBE PKH dan kurang dari 1 persen berpartisipasi dalam KUBE PKH.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Strategi praktis untuk mengatasi kendala mata pencarian di antara para penerima manfaat perlindungan sosial membutuhkan kolaborasi antar kementerian di tingkat kebijakan dan mekanisme koordinasi antara lembaga pelaksana di tingkat daerah. Strategi tersebut perlu mempertimbangkan berbagai kendala dan pilihan kegiatan ekonomi bagi anggota keluarga PKH dan rekomendasinya meliputi:

- **Memfasilitasi petani PKH untuk menghasilkan barang dengan tingkat permintaan yang lebih besar di pasaran.** Petani di daerah pedesaan memiliki potensi untuk menanam tanaman palawija bernilai tinggi, yang membutuhkan lebih sedikit input, akan tetapi memiliki pemasok terbatas di pasar dan permintaan lokal yang besar;
- **Mendorong tumbuhnya hubungan pasar yang lebih kuat antara keluarga PKH dan pembeli lokal.** Pembeli bersedia untuk berhubungan langsung dengan petani dan nelayan PKH dan memotong peran perantara, tetapi ini membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan menjadi alternatif sistem dukungan bagi produsen;
- **Memastikan bahwa intervensi mata pencarian komplementer berpihak kepada masyarakat miskin.** Penyebaran informasi yang buruk, jarak ke pusat layanan dan syarat permodalan, membuat intervensi mata pencarian pemerintah tidak dapat diakses oleh anggota keluarga PKH. Pemerintah daerah perlu mengatasi masalah ini dan bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan anggota keluarga PKH diberi kesempatan yang sama untuk pelatihan dan pekerjaan;
- **Mengatur mekanisme koordinasi antar kementerian sehingga penerima manfaat perlindungan sosial dapat mengajukan kartu pra-kerja.** Pemerintah perlu untuk memastikan bahwa penerima perlindungan sosial memiliki akses masuk terhadap program tersebut. Skema subsidi menawarkan pelatihan teknis dan sertifikasi untuk memberikan para pelajar yang sudah lulus keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki saat ini. Program ini juga menawarkan dukungan saat mereka mencari pekerjaan.
- **Menyediakan intervensi tambahan bagi semua anggota keluarga PKH usia kerja. Intervensi mata pencarian PKH yang ada saat ini hanya menargetkan penerima PKH, meskipun mereka mungkin bukan titik masuk yang paling cocok.** Studi ini telah menyoroti bahwa banyak wanita dibebani dengan tugas perawatan tambahan dan anggota rumah tangga lainnya (khususnya mereka yang berada di kelompok usia 15-30 dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi) mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengelola usaha.
- **Memfasilitasi partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar melalui pendirian tempat pengasuhan anak.** Hanya 30 persen perempuan dalam keluarga PKH yang terlibat dalam pekerjaan berupah karena kebutuhan mereka terhadap pekerjaan dengan waktu yang fleksibel, yang tidak ditawarkan sebagian besar pemberi kerja. Ada kebutuhan besar untuk layanan pengasuhan anak di wilayah setempat, sehingga perempuan yang rentan, seperti penerima PKH, dapat berpartisipasi dalam angkatan kerja jika mereka menginginkannya.
- **Melaksanakan uji coba inklusi produktif bagi keluarga PKH yang memiliki potensi dan minat berwirausaha yang besar.** KUBE PKH adalah intervensi mata pencarian utama yang tersedia untuk keluarga PKH, meskipun partisipasi, dampak dan keberlanjutan program ini terbatas. Mengikuti praktik terbaik internasional, Kementerian Sosial harus mempertimbangkan untuk menerapkan percontohan inklusi produktif selama tiga tahun sehingga anggota PKH yang memiliki kapasitas kewirausahaan dapat membangun mata pencarian yang berkelanjutan (di daerah perkotaan dan pedesaan). Sebagai bagian dari skema tersebut, keluarga PKH yang memiliki potensi usaha akan menerima dukungan keuangan, dihubungkan dengan pembeli sektor swasta dan sesi rutin 'pelatihan bisnis' dari fasilitator usaha selama dua tahun. Fasilitator usaha selanjutnya dapat menghubungkan usaha yang menguntungkan dengan layanan keuangan mikro pada tahun ketiga untuk memastikan keberlanjutan usahanya.

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	i
Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia	iii
Abstrak	v
Ringkasan Eksekutif	1
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
Daftar Lampiran	7
Daftar Kotak	7
Daftar Istilah dan Singkatan	8
Bab 1. Pendahuluan dan Metode Penelitian	9
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Penelitian	9
1.2 Profil Ekonomi Anggota Keluarga Program Keluarga Harapan: Tingkat Nasional	10
1.3 Metode Penelitian	13
1.4 Sistematika Laporan	17
Bab 2. Temuan: Profil Ekonomi Anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH Usia Kerja	19
2.1 Gambaran Umum Anggota Keluarga Penerima PKH	19
2.2 Aktivitas Ekonomi Anggota Keluarga Penerima PKH Usia Kerja yang Bekerja	23
2.3 Profil Anggota Keluarga Penerima PKH yang Tidak Bekerja	50
Bab 3. Program Mata Pencarian Komplementer	57
3.1 Program Intervensi Mata Pencarian Bagi Pemilik dan Pengelola Pertanian	57
3.2 Intervensi Tambahan untuk Pemilik UMKM	62
3.3 Program untuk Membantu Anggota Keluarga PKH Memasuki Pasar Tenaga Kerja	67
3.4 Program Pengembangan Mata Pencarian Bagi Penerima Manfaat PKH	70
Bab 4. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Rekomendasi	77
Lampiran	81
Daftar Pustaka	96

Daftar Tabel

Tabel 1	: Kegiatan Pengumpulan Data Primer Kualitatif	15
Tabel 2	: Tingkat Pendidikan Terakhir Anggota Keluarga PKH Berdasarkan Kelompok Usia (Usia 15 Tahun ke Atas)	20
Tabel 3	: Prevalensi Penderita Penyakit Kronis dan Panyandang Disabilitas pada Keluarga PKH	21
Tabel 4	: Karakteristik Demografis Anggota Keluarga PKH Usia Kerja yang Bekerja	24
Tabel 5	: Distribusi Pemilik Usaha atau Pengelola Pertanian Berdasarkan Kelompok Usia (%)	26
Tabel 6	: Distribusi Buruh Tani Berdasarkan Kelompok Usia (%)	26
Tabel 7	: Profil Usaha Pertanian yang Dioperasikan oleh Anggota Keluarga Sampel (%)	28
Tabel 8	: Karakteristik Demografis Pemilik Usaha UMKM	35
Tabel 9	: Kepesertaan Anggota Keluarga PKH pada Pelatihan Bersertifikat	39
Tabel 10	: Persentase Anggota Keluarga Sampel yang Bekerja di Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa Menurut Kelompok Usia dan Tingkat Pendidikan Tertinggi (%)	42
Tabel 11	: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Tempat Kerja, Kelompok Usia dan Jenis Kelamin (%)	43
Tabel 12	: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Tempat Kerja dan Tingkat Pendidikan Tertinggi (%)	43
Tabel 13	: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa dengan Kontrak dan Tanpa Kontrak Berdasarkan Tempat Kerja (%)	44
Tabel 14	: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tahu di Mana Pelatihan Dilaksanakan Berdasarkan Tempat Kerja (%)	46
Tabel 15	: Jarak Rata-rata dari Rumah ke Aktivitas Ekonomi: Responden yang Menjadi Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa (Berdasarkan Jenis Tempat Kerja)	47
Tabel 16	: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Proses Pencarian Kerja (%)	48
Tabel 17	: Karakteristik Demografis Anggota Keluarga yang Tidak Bekerja	50
Tabel 18	: Angka Partisipasi Murni dan Kasar Sampel Survei (%)	53
Tabel 19	: Karakteristik Demografi Anggota Keluarga dalam Penelitian ini yang Bukan Angkatan Kerja	54
Tabel 20	: Uraian tentang Intervensi Mata Pencarian di Bidang Pertanian	58
Tabel 21	: Dampak Program Pengembangan Mata Pencarian pada Sektor Pertanian	60
Tabel 22	: Uraian tentang Intervensi Tambahan untuk Pemilik UMKM	62
Tabel 23	: Dampak Program Pengembangan Mata Pencarian bagi Pemilik UMKM	64
Tabel 24	: Uraian tentang Intervensi Pasar Tenaga Kerja	67
Tabel A1	: Dasar Pemikiran Pemilihan Lokasi Studi	83

Daftar Gambar

Gambar 1	: Anggota Keluarga Penerima PKH Berdasarkan Usia	11
Gambar 2	: Anggota Keluarga Penerima PKH Usia 15-59 Menurut Status Ketenagakerjaan (2018, Tingkat Nasional)	12
Gambar 3	: Status Ketenagakerjaan Anggota Keluarga PKH dengan Tingkat Pendidikan SMA/ Sederajat (atau Lebih Tinggi) di Tingkat Nasional	13
Gambar 4	: Lokasi Penelitian dan Mata Pencarian Utama di Setiap Lokasi	13
Gambar 5	: Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif)	14
Gambar 6	: Kerangka Penghidupan Berkelanjutan	17
Gambar 7	: Pengelompokan Sampel Responden Berdasarkan Status Ketenagakerjaan	22
Gambar 8	: Sampel Responden, Pengelompokan Usia Berdasarkan Status Pekerjaan	23
Gambar 9	: Proporsi Anggota Keluarga PKH Berdasarkan Aktivitas Ekonomi	25
Gambar 10	: Jenis-jenis Modal yang Dibutuhkan untuk Mengelola UMKM dalam Berbagai Tahapan	38
Gambar 11	: Sumber Utama Pembiayaan Usaha Keluarga PKH Pemilik UMKM PKH	40
Gambar 12	: Partisipasi dalam Intervensi Mata Pencarian bagi Keluarga PKH	70
Gambar 13	: Manfaat Kegiatan P2K2 dalam Menunjang Aktivitas Ekonomi Keluarga Penerima PKH (Berdasarkan Jenis Kegiatan)	71
Gambar A2	: Proporsi Pekerja Menurut Lapangan Usaha: Surakarta	87
Gambar A4	: Langkah-langkah untuk Mengimplementasikan Program Inklusi yang Produktif bagi Pemilik Usaha Keluarga PKH	93

Daftar Lampiran

Lampiran 1	: Proses Pemilihan Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan Lokasi Penelitian	82
Lampiran 2	: Gambaran Umum Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan Studi	85
Lampiran 3	: Prosedur Pemilihan Sampel Keluarga Penerima PKH	90
Lampiran 4	: Rincian Mengenai Pilot Inklusi Produktif	92

Daftar Kotak

Kotak 1	: Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)	66
Kotak 2	: 2015 - Ringkasan Temuan Evaluasi KUBE PKH 2015	73

Daftar Istilah dan Singkatan

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
BLK	Balai Latihan Kerja
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
e-Warong	Elektronik Warung Gotong Royong
FDS	<i>Family Development Session</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> , diskusi kelompok terarah
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
KUSUKA	Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
LSM	Lembaga Sosial Masyarakat
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEKKA	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
P2K2	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
PKH	Program Keluarga Harapan
PKKPM	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat
PLUT	Pusat Layanan Usaha Terpadu
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDC	<i>Skill Development Center</i>
SD	Sekolah Dasar
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UMK	Upah Minimum Kota/Kabupaten
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UKM	Usaha Kecil Menengah
UMR	Upah Minimum Regional
UPPKS	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

BAB 01

PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Program bantuan tunai bersyarat unggulan Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk membantu keluarga miskin dengan ibu hamil dan anak-anak¹. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan antar generasi dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan anak-anak, sehingga dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia generasi mendatang. Dalam jangka pendek, transfer dimaksudkan untuk mengurangi kesulitan ekonomi rumah tangga secara langsung, merangsang konsumsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (TNP2K, 2018). Penerima manfaat PKH mencapai 10 juta keluarga di seluruh Indonesia dan diakui sebagai program transfer uang bersyarat terbesar kedua di dunia.

Evaluasi dampak dari Program Keluarga Harapan menunjukkan bahwa setelah enam tahun pelaksanaannya, program ini telah secara signifikan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Namun, ini bukan pengganti pekerjaan dan karena itu belum membantu keluarga untuk mandiri dalam hal mata pencarian mereka (Cahyadi et al. 2018; TNP2K, 2015). Mereka tidak berinvestasi dalam aset produktif dan konsumsinya tidak meningkat secara signifikan (Cahyadi *et al.*, 2018), meskipun peningkatan baru-baru ini dalam besaran manfaat PKH dapat menyebabkan perilaku ekonomi masa depan keluarga PKH berubah (*ibid*)². Namun, penelitian yang ada untuk menetapkan alasan untuk hasil ini masih terbatas.

Sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa perlindungan sosial - khususnya dalam bentuk bantuan langsung tunai - merangsang ekonomi dan mengarah pada peningkatan partisipasi dan produktivitas pasar tenaga kerja (McCord dan Slater, 2015). Program bantuan tunai bersyarat seperti PKH mendorong keluarga untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga memperkuat kualitas angkatan kerja suatu negara di masa depan. Jika jumlah transfer cukup, memungkinkan penerima untuk memulai usaha mikro dan mengakses pekerjaan berupah (Gertler et al., 2017; Handa et al., 2017). Terakhir, bantuan tunai membantu keluarga yang terkena guncangan, misalnya, dengan mengurangi kemungkinan mereka akan menjual aset produktif sebagai strategi *coping* (mengatasi masalah) (OPM dan IDS, 2012).

¹ Sejak tahun 2016, Pemerintah Indonesia memasukkan manfaat tambahan bagi keluarga PKH yang memiliki lansia dan penyandang disabilitas di dalam rumah tangga mereka

² Sebelumnya bantuan PKH diberikan sebagai bantuan bagi rumah tangga dengan jumlah 'flat/sama rata' terlepas dari jumlah anggota keluarga dan tingkat pendidikan, pada 2019 PKH telah kembali ke desain aslinya menjadi tunjangan yang tergantung pada jumlah anak dan tingkat pendidikan mereka. Tingkat manfaat juga meningkat secara signifikan sejak 2019

Di sisi lain, bukti juga menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai saja tidak cukup untuk secara sistematis mengatasi hambatan struktural untuk memperoleh pekerjaan dan mata pencarian berkelanjutan (McCord, 2018). Upaya untuk menanggulangi hambatan semacam itu membutuhkan tinjauan lebih dekat terhadap alasan rendahnya produktivitas dan lapangan kerja dengan upah yang rendah di antara segmen penduduk termiskin di Indonesia. Singkatnya, mengapa penerima PKH mengalami tantangan untuk memperoleh mata pencarian yang berkelanjutan, dan bagaimana hal ini dapat diatasi?

Menanggapi kondisi tersebut, program MAHKOTA (dengan dukungan Pemerintah Australia) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian SMERU (SMERU) melakukan penelitian untuk melakukan analisis terperinci tentang peluang memperkuat mata pencarian keluarga penerima manfaat PKH. Studi ini mengeksplorasi:

- Profil ekonomi dan karakteristik anggota usia kerja dalam keluarga PKH;
- Ketersediaan layanan mata pencarian yang dilaksanakan pemerintah di wilayah studi dan sejauh mana keluarga PKH menggunakan dan mengambil manfaat dari skema ini;
- Aspirasi mata pencarian keluarga PKH dan hambatan kontekstual untuk mencapainya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis bagaimana menghubungkan anggota keluarga PKH usia kerja dengan intervensi mata pencarian tambahan yang sesuai dengan konteksnya, dengan tujuan mengatasi tantangan mata pencarian berkelanjutan pada keluarga PKH dan meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka dalam jangka panjang.

1.2 Profil Ekonomi Anggota Keluarga Program Keluarga Harapan: Tingkat Nasional

PKH ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), basis data kemiskinan Indonesia dan catatan sosial. Program ini memberikan tingkat manfaat antara Rp1.450.000 hingga Rp 9.750.000 (~ 103 USD hingga 726 USD) per keluarga per tahun, tergantung pada tingkat pendidikan anak³. Pembayaran bergantung pada kehadiran di sekolah untuk anak-anak dan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui. Sejak tahun 2016, bantuan langsung tunai tambahan ditambahkan pada jumlah manfaat yang telah ada untuk keluarga PKH yang memiliki anggota keluarga lanjut usia (di atas 60 tahun) dan penyandang disabilitas berat⁴.

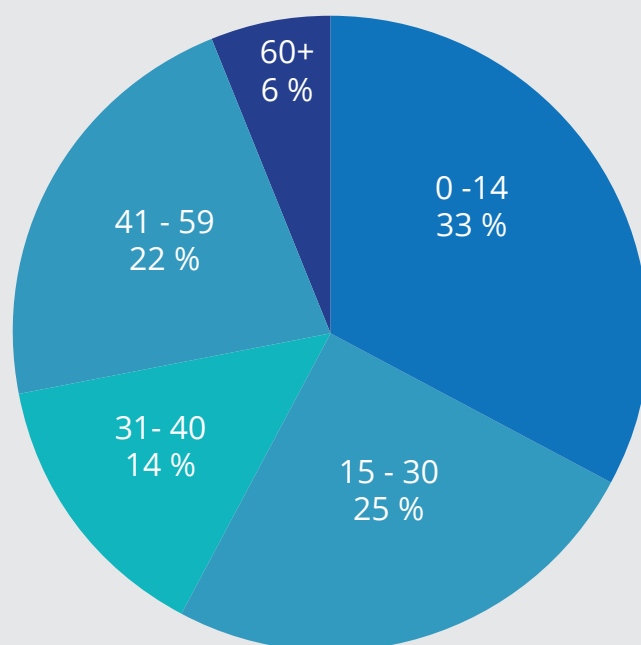
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, penerima PKH berjumlah lebih dari delapan juta rumah tangga (BPS, 2018a) yang setara dengan 8 persen dari total rumah tangga di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang dramatis dari 2 persen pada tahun 2014 dan 5 persen pada tahun 2017. Pemerintah merencanakan untuk menambah penerima PKH hingga sekitar 10 juta keluarga pada 2019. Sebagian besar penerima PKH berada di wilayah perdesaan (64 persen), dengan proporsi tertinggi di Nusa Tenggara Timur dan penerima terbanyak di Jawa Timur dan Jawa Barat.

³ Terdiri dari 2 jenis Bantuan: 1) Bantuan Tetap Setiap Keluarga @Reguler (Rp 550.000,-/Keluarga/Tahun) atau PKH Akses (Rp1.000.000,-/Keluarga/Tahun) yang diberikan hanya pada Tahap Pertama; 2) Bantuan Komponen Setiap Jiwa @ Ibu Hamil (Rp2.400.000,-), Anak Usia Dini (Rp2.400.000,-), SD (Rp900.000,-), SMP (Rp1.500.000,-), SMA (Rp2.000.000,-).

⁴ Pada saat penulisan laporan ini, keluarga PKH dengan anggota keluarga penyandang disabilitas berat menerima tambahan Rp 2.400.000, dan lansia di atas usia 60 menerima tambahan Rp 2.400.000. Maksimal empat orang dalam satu keluarga.

Lebih dari separuh anggota keluarga penerima PKH adalah anak-anak yang berusia 0-14 tahun dan remaja yang berusia 15-30 tahun. Sekitar sepertiganya termasuk dalam kelompok usia 41-59 tahun dan 31-40 tahun, dan sekitar 6 persen lainnya berusia 60 tahun ke atas (lihat Gambar 1).

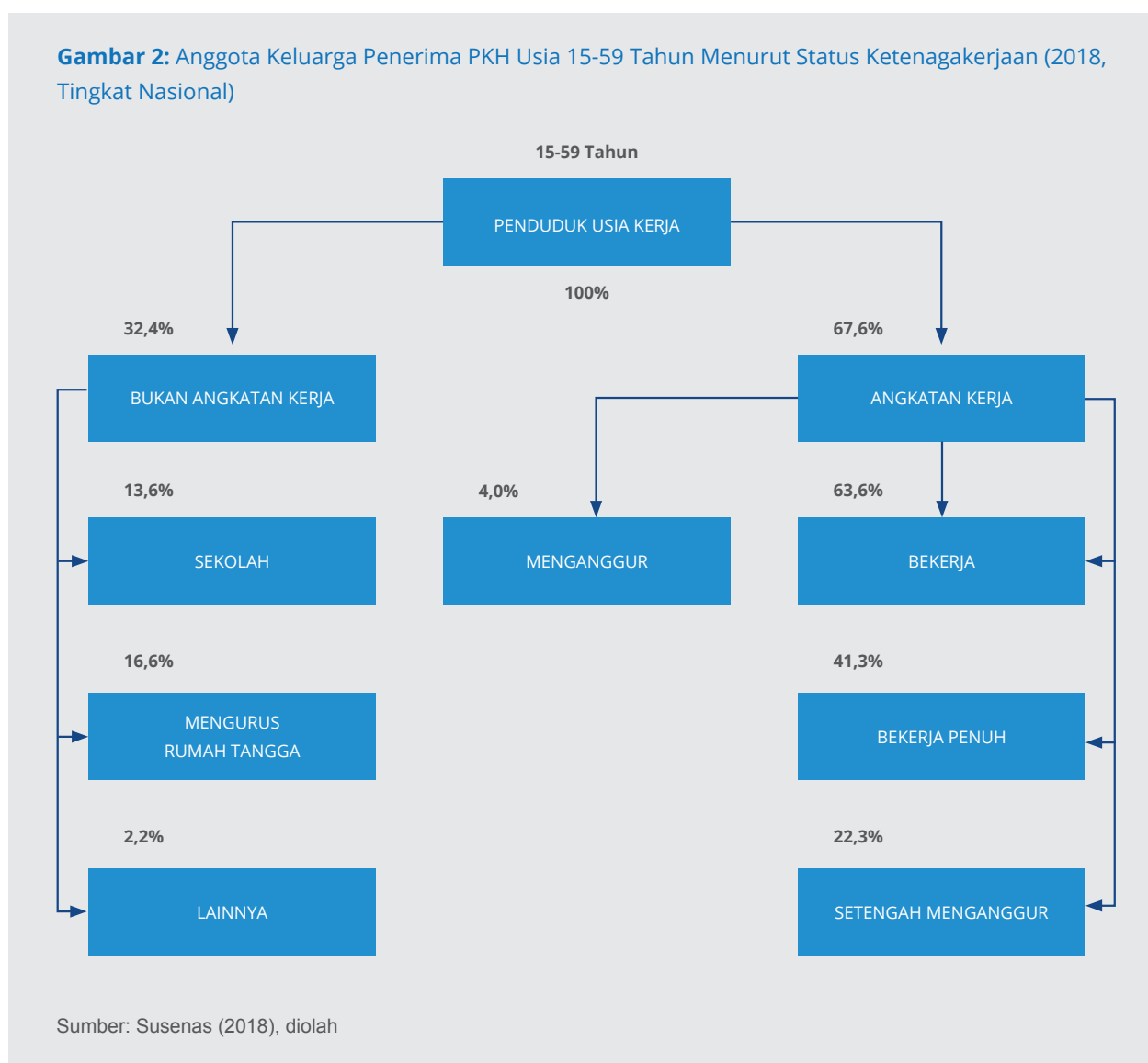
Gambar 1: Anggota Keluarga Penerima PKH Berdasarkan Usia



Sumber: Diolah dari data survei (2019)

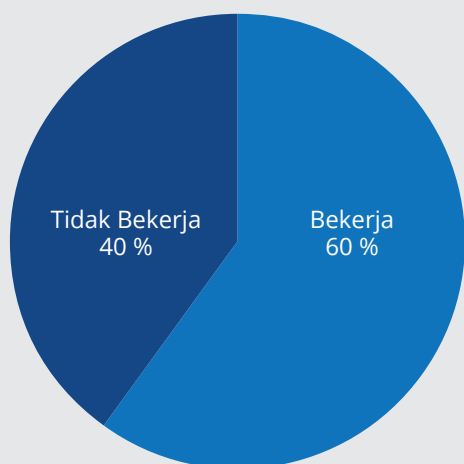
Sebagian besar anggota keluarga penerima PKH usia kerja (15-59 tahun sesuai kriteria Badan Pusat Statistik) masuk ke dalam angkatan kerja (68 persen) (Gambar 2). Adapun 32 persen lainnya tidak termasuk angkatan kerja karena alasan sekolah, mengurus keluarga, dan menganggur. Proporsi perempuan yang tidak bekerja adalah 48 persen (terutama karena tugas perawatan rumah tangga) dibandingkan dengan 17 persen laki-laki.

Gambar 2: Anggota Keluarga Penerima PKH Usia 15-59 Tahun Menurut Status Ketenagakerjaan (2018, Tingkat Nasional)



Sementara persentase anggota keluarga penerima PKH berusia 15-59 tahun yang menganggur (4 persen) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang bekerja, dimana mayoritas berusia 15-30 tahun (85 persen). Di kelompok ini, mereka yang berpendidikan SMA/ sederajat atau universitas mencapai 39 persen (Gambar 3). Sementara itu, mereka yang bekerja berlatar pendidikan terbatas, karena 63 persen berpendidikan SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah sama sekali dan hanya 17 persen di antaranya yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau universitas.

Gambar 3: Status Ketenagakerjaan Anggota Keluarga PKH dengan Tingkat Pendidikan SMA/ sederajat (atau Lebih Tinggi) di Tingkat Nasional



Sumber: Diolah dari data survei (2019)

1.3 Metode Penelitian

Waktu dan Lokasi Penelitian

Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan antara 13 hingga 30 Maret 2019. Penelitian ini dilakukan di dua desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten berikut: Kabupaten Indramayu dan Bandung Barat di Jawa Barat; Kota Surakarta di Jawa Tengah; dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur (lihat Gambar 4). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan mempertimbangkan jumlah dan proporsi keluarga penerima PKH, jenis mata pencarian penduduk, dan keberadaan program pengembangan mata pencarian untuk keluarga PKH. Penjelasan terperinci mengenai proses penentuan lokasi penelitian dan alasan pemilihannya disajikan di **Lampiran 1** dan gambaran umum lokasi studi diuraikan di **Lampiran 2**.

Gambar 4: Lokasi Penelitian dan Mata Pencarian Utama di Setiap Lokasi



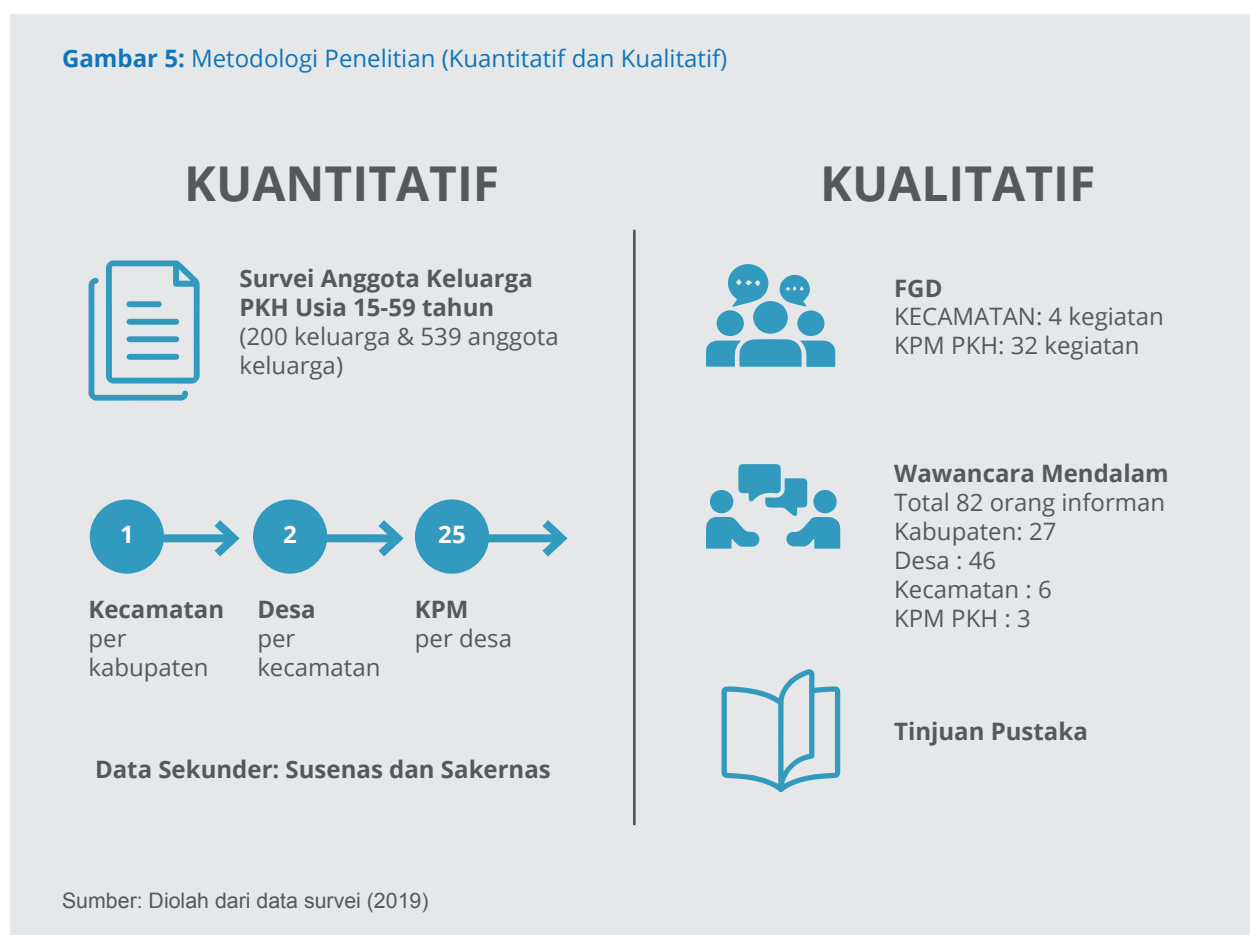
Sumber: Diolah dari data survei (2019)

Metodologi Penelitian

Metode Kualitatif

Data kualitatif dikumpulkan melalui: **82 wawancara mendalam dan 36 diskusi kelompok terarah (FGD) di tingkat desa, kota dan kecamatan serta tinjauan pustaka (lihat Gambar 5)**. Responden termasuk lembaga keuangan mikro yang diakses oleh anggota keluarga penerima PKH; lembaga pemerintah setempat yang menawarkan program dan layanan mata pencarian; pedagang pengumpul dan pengusaha; fasilitator PKH; dan anggota keluarga penerima PKH yang terlibat dalam berbagai kegiatan mata pencarian (termasuk wirausahawan yang telah graduasi dari PKH) (lihat **Tabel 1**).

Gambar 5: Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif)



Tabel 1: Kegiatan Pengumpulan Data Primer Kualitatif

Tingkat	Informan/Partisipan	Kegiatan Pengumpulan Data
Kabupaten/kota	Dinas Sosial dan Pelaksana Program Keluarga Harapan	wawancara mendalam
	Dinas Tenaga Kerja	
	Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro	
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
	Dinas Kelautan dan Perikanan (Kabupaten Indramayu)	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabupaten Bandung Barat, Kota Surakarta)	
	Dinas Pertanian (Kabupaten Pacitan)	
Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Lembaga Keuangan Mikro	wawancara mendalam
Kecamatan	FGD kecamatan	FGD
Desa/Kelurahan	Fasilitator PKH / KUBE PKH/e-Warong KUBE PKH	wawancara mendalam
	Pengusaha lokal	
	Pedagang pengumpul	
	Perangkat desa/kelurahan	
Desa/Kelurahan	FGD mini laki-laki muda anggota KPM PKH (15-30 thn)	FGD mini
Desa/Kelurahan	FGD mini perempuan muda anggota KPM PKH (15-30 thn)	FGD mini
	FGD mini laki-laki dewasa anggota KPM PKH (31-59 thn)	
	FGD mini perempuan dewasa anggota KPM PKH (31-59 thn)	
Keluarga	Anggota KPM PKH sukses	wawancara mendalam
	Anggota KPM PKH belum sukses	

Sumber: Analisis tim peneliti SMERU (2019)

Masing-masing FGD mini tingkat desa/kelurahan diikuti oleh lima anggota keluarga penerima PKH sesuai dengan kelompok jenis kelamin dan usianya. Diskusi ini diselenggarakan untuk mengeksplorasi mata pencarian peserta dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat akses mereka ke mata pencarian ini. Ketika desa atau kelurahan dicakup oleh intervensi mata pencarian khusus untuk keluarga PKH, komposisi peserta FGD mini juga mewakili keanggotaan mereka dalam program-program ini. Lebih jauh lagi, dilakukan juga FGD tingkat kecamatan yang melibatkan fasilitator PKH, perangkat kecamatan, perangkat desa/kelurahan, pengusaha lokal, dan organisasi nonpemerintah yang bekerja di desa/kelurahan lokasi penelitian, yang digunakan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian dan membangun rekomendasi.

Metode Kuantitatif

Data kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 200 keluarga penerima PKH (50 rumah tangga per kabupaten/kota) (Gambar 5). Penentuan sampel ditetapkan dengan metode proses acak sistematis (*systematic random process*) berdasarkan data keluarga penerima PKH yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Responden penelitian termasuk anggota keluarga PKH usia kerja (15-59 tahun), berjumlah 539 responden. Prosedur pemilihan sampel dijelaskan di **Lampiran 3**.

Survei menggunakan komputer tablet dengan metode *computer-assisted personal interviewing (CAPI)* dan perangkat lunak CSPRO oleh empat enumerator di setiap kabupaten/kota. Dalam survei ini, wawancara dilakukan dengan semua anggota keluarga penerima PKH usia kerja dan/atau bekerja dalam seminggu terakhir (termasuk anak yang bekerja). Pertanyaan dalam wawancara meliputi: (i) jenis pekerjaan; (ii) alokasi waktu bekerja; (iii) pendapatan; (iv) sertifikasi pelatihan yang dimiliki; (v) tingkat hutang saat ini dan dari siapa mereka meminjam; dan (vi) aspirasi mereka terhadap masa depannya.

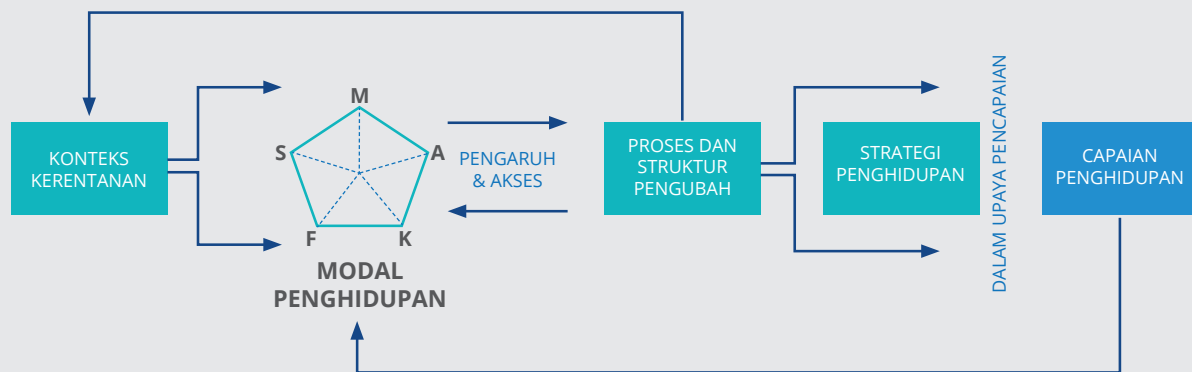
Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka penghidupan berkelanjutan⁵ yang meneliti hubungan antara berbagai aset mata pencarian yang dapat diakses oleh anggota keluarga penerima PKH: sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, infrastruktur, dan hubungan sosial (Gambar 6). Misalnya, tingkat **modal manusia**, seperti keterampilan, kualifikasi, dan pendidikan, sangat memengaruhi peluang mata pencarian yang dapat diakses oleh anggota keluarga PKH, khususnya dalam konteks perkotaan dan daerah pinggiran perkotaan. **Modal fisik**, seperti tanah subur dan sistem irigasi, adalah aset penting bagi mereka yang terlibat dalam sektor pertanian dan perikanan. Akses ke **sumber daya keuangan** diperlukan untuk mengimbangi biaya mobilitas tenaga kerja dan penyediaan modal awal usaha. **Jaringan sosial** biasanya memediasi akses informasi tentang peluang kerja, pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan dan layanan dukungan lainnya. **Modal fisik** dan kualitas infrastruktur memungkinkan (atau menghambat) keluarga mengakses pasar, pusat pelatihan, kantor pemerintah, dan tempat kerja.

Memodifikasi proses dan struktur, seperti lembaga pemerintahan, kebijakan, dan kualitas layanan juga berdampak pada strategi mata pencarian dan hasil yang dapat dicapai keluarga PKH. Kerangka kerja ini juga memperhitungkan **konteks kerentanan** (sifat perangkap kemiskinan dan kendala lainnya) yang dihadapi keluarga PKH. Guna mengarusutamakan gender dan inklusi sosial, pengumpulan data dan analisis dipilah berdasarkan gender dan usia, serta mempertimbangkan keberadaan anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Analisis potensi pengembangan penghidupan anggota keluarga penerima PKH memperhitungkan sisi penawaran/pasokan (anggota keluarga sebagai agen) dan sisi permintaan (pasar, lapangan pekerjaan, dan peluang usaha).

⁵ DFID, 1999

Gambar 6: Kerangka Penghidupan Berkelanjutan



Keterangan: M = Modal manusia, A = Modal alam, K = Modal keuangan, S = Modal sosial, F = Modal fisik

Sumber: DFID (1999)

1.4 Sistematika Laporan

Laporan penelitian terdiri dari empat bab. Bab 1 menyajikan pengantar dan menjelaskan metodologi penelitian. Bab 2 menggali profil ekonomi anggota keluarga PKH usia kerja, sementara Bab 3 menjelaskan akses anggota PKH ke intervensi mata pencarian komplementer pemerintah. Akhirnya, Bab 4 memuat kesimpulan dengan rekomendasi praktis untuk memperkuat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan keluarga PKH, serta beberapa rekomendasi kebijakan penting untuk dipertimbangkan.

BAB 02

TEMUAN: PROFIL EKONOMI ANGGOTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH USIA KERJA

Bab ini menyajikan profil demografis anggota keluarga penerima PKH yang dicakup dalam studi ini, serta kegiatan ekonomi anggota keluarga penerima PKH usia kerja, yang dikelompokkan menjadi: (i) pemilik usaha pertanian dan buruh tani; (ii) pemilik UMKM; dan (iii) pekerja/karyawan di sektor non-pertanian. Bab ini ditutup dengan profil anggota keluarga yang saat ini tidak bekerja, namun berpotensi untuk melakukan aktivitas ekonomi di masa depan.

2.1 Gambaran Umum Anggota Keluarga Penerima PKH

Sampel dalam studi ini terdiri dari 200 keluarga penerima PKH dengan 883 anggota keluarga, yang terdiri dari 49 persen perempuan dan 51 persen laki-laki. Sebelas rumah tangga, di Surakarta dan Indramayu, dikepalai oleh perempuan. Sebuah studi mengenai penghidupan keluarga menemukan bahwa ketika terjadi guncangan ekonomi, strategi pengelolaan risiko keluarga yang dikepalai perempuan cenderung kurang efektif karena kepala keluarga menanggung beban ganda untuk mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga (Kusumawardhani et al. 2016: 57).

Sebagian besar (67 persen) anggota keluarga dalam keluarga sampel berada dalam kelompok usia kerja (15-59 tahun) (Tabel 2), yang lebih tinggi dari tingkat nasional (60,5 persen) (Susenas 2018). Rata-rata, setiap keluarga sampel terdiri dari empat anggota keluarga dan termasuk satu dewasa muda (15-30 tahun), meskipun proporsi orang muda dalam keluarga sampel di Pacitan lebih rendah. Wawancara kualitatif mengungkapkan bahwa orang tua cenderung mendorong anak-anak mereka untuk bekerja di luar sektor pertanian, tetapi dengan kesempatan kerja yang terbatas di daerah pedesaan seperti Pacitan, kaum muda sering bermigrasi. Namun, begitu mereka menikah atau mencapai dewasa penuh, mereka cenderung untuk kembali ke desa dan mengambil alih tanah yang diwarisi dari orang tua mereka.

Tingkat pendidikan anggota keluarga sampel di semua lokasi penelitian relatif rendah. Di antara anggota keluarga berusia 15 tahun ke atas, 57 persen memiliki pendidikan SD (atau yang setara) sementara 31 persen memperoleh pendidikan SMP atau yang setara (lihat Tabel 2). Menariknya, 8 persen anggota keluarga di bawah usia 35 tahun juga mencapai SMA dan sederajat, sementara lima responden berhasil meraih gelar sarjana. Peserta

dari daerah perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang sebagian dapat dikaitkan dengan jumlah sekolah menengah yang lebih tinggi (atau yang setara) dan universitas di kota-kota tersebut. Di kecamatan sampel Indramayu dan Pacitan, misalnya, ada dua atau tiga sekolah menengah (atau yang setara) dan satu universitas terletak di ibukota kabupaten, membutuhkan biaya transportasi yang tinggi (lihat Bagian 2.2 untuk diskusi lebih lanjut).

Untuk anggota keluarga PKH di atas usia 15 tahun, 57 persen memiliki pendidikan SD; 8 persen memiliki pendidikan SMA ; 1 persen memiliki gelar sarjana.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Terakhir Anggota Keluarga PKH Berdasarkan Kelompok Usia (Usia 15 Tahun ke Atas)

Kelompok umur	Kelompok pendidikan				Total		
	SD ke bawah	SMP	SMA	Perguruan tinggi	n	%	
15-24	42	98	35	3	178	28,7	
25-34	28	32	16	1	77	12,4	
35-44	130	41	14	0	185	29,8	
45-54	95	17	6	1	119	19,2	
55+	57	4	0	0	61	9,8	
Total	n	352	192	71	5	620	n.a.
	%	56,8	31	11,4	0,8	n.a.	100

Sumber: Diolah dari data survei, 2019

Sebagian keluarga sampel juga menghadapi kendala karena menderita penyakit kronis atau menyandang disabilitas.⁶ Totalnya, sebanyak 26 persen keluarga sampel memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang menderita penyakit menahun dan sebanyak 13 persen yang memiliki setidaknya satu anggota keluarga penyandang disabilitas. Penyakit menahun yang paling banyak dikemukakan adalah rematik, tekanan darah tinggi, asma, gangguan jantung, dan diabetes. Namun, ada juga yang menderita kanker, TBC, dan *stroke*. Penderita penyakit kronis atau penyandang disabilitas yang tertinggi adalah kelompok umur 60 tahun ke atas, meskipun prevalensi pemuda yang menderita penyakit kronis (26 persen) dan yang menyandang disabilitas (20 persen) di antara kaum muda berusia 15-30 tahun mengkhawatirkan (**Tabel 3**).

⁶ Dalam survei, anggota keluarga penerima manfaat dianggap memiliki kesulitan/disabilitas apabila menjawab setidaknya satu dari pilihan: (i) sulit melihat, bahkan ketika menggunakan kacamata; (ii) sulit mendengar, bahkan ketika menggunakan alat bantu pendengaran; (iii) sulit berjalan/naik tangga; (iv) sulit mengingat/berkonsentrasi; (v) sulit mengurus diri sendiri seperti mandi atau berpakaian; (vi) sulit berkomunikasi meskipun menggunakan bahasa sehari-hari; (vii) disabilitas mental; (viii) mantan penderita gangguan jiwa

Tabel 3: Prevalensi Penderita Penyakit Kronis dan Penyandang Disabilitas pada Keluarga PKH

Kelompok umur	Penyakit kronis/menahun		Disabilitas (5 tahun +)	
	%	n	%	n
0-14	6,5	262	4,1	220
15-30	25,6	216	20,1	216
31-40	15,4	149	4,7	149
41-59	32,4	224	13,8	224
60+	53,3	30	67,7	31
Total (individu)	16,9	881	9,5	840
Total (keluarga)	26,4	200	12,9	200

Sumber: Diolah dari data survei (2019)

26 persen keluarga PKH yang diwawancarai memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis dan 13 persen memiliki anggota dengan disabilitas ganda. 25 persen orang dengan penyakit kronis dan 20 persen penyandang disabilitas berada dalam kelompok usia 15-30.

Jenis disabilitas yang paling banyak dikeluhkan adalah kesulitan melihat dan berjalan/menaiki tangga. Namun ada sepuluh anggota keluarga sampel yang mengalami masalah kejiwaan dan sembilan di antaranya berusia kurang dari 30 tahun atau lebih muda. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan salah satu keluarga di Pacitan yang anggota keluarganya mengalami disabilitas mental dan fisik, disebutkan bahwa ia tidak dapat bekerja kecuali membantu orang tuanya di sawah dan mengumpulkan rumput. Orang tua tersebut enggan jika anaknya bekerja dengan orang lain karena sang anak pernah mengalami perundungan.

Dilihat dari aktivitas ekonominya, terdapat 53 orang anggota keluarga sampel yang bermigrasi⁷ (Gambar 7) - 42 orang ke bermigrasi ke luar kota/kabupaten dan 11 orang bermigrasi ke luar negeri. Sebanyak 85 persennya bekerja, sedangkan sisanya mengikuti suami atau anggota keluarga lain. Pada umumnya, anggota keluarga sampel yang bermigrasi di dalam negeri mengirimkan uang sekitar Rp500.000 – Rp1,5 juta per bulan kepada keluarganya di kampung halaman, sedangkan yang bermigrasi ke luar negeri mengirimkan Rp1 juta – Rp4 juta per bulan.

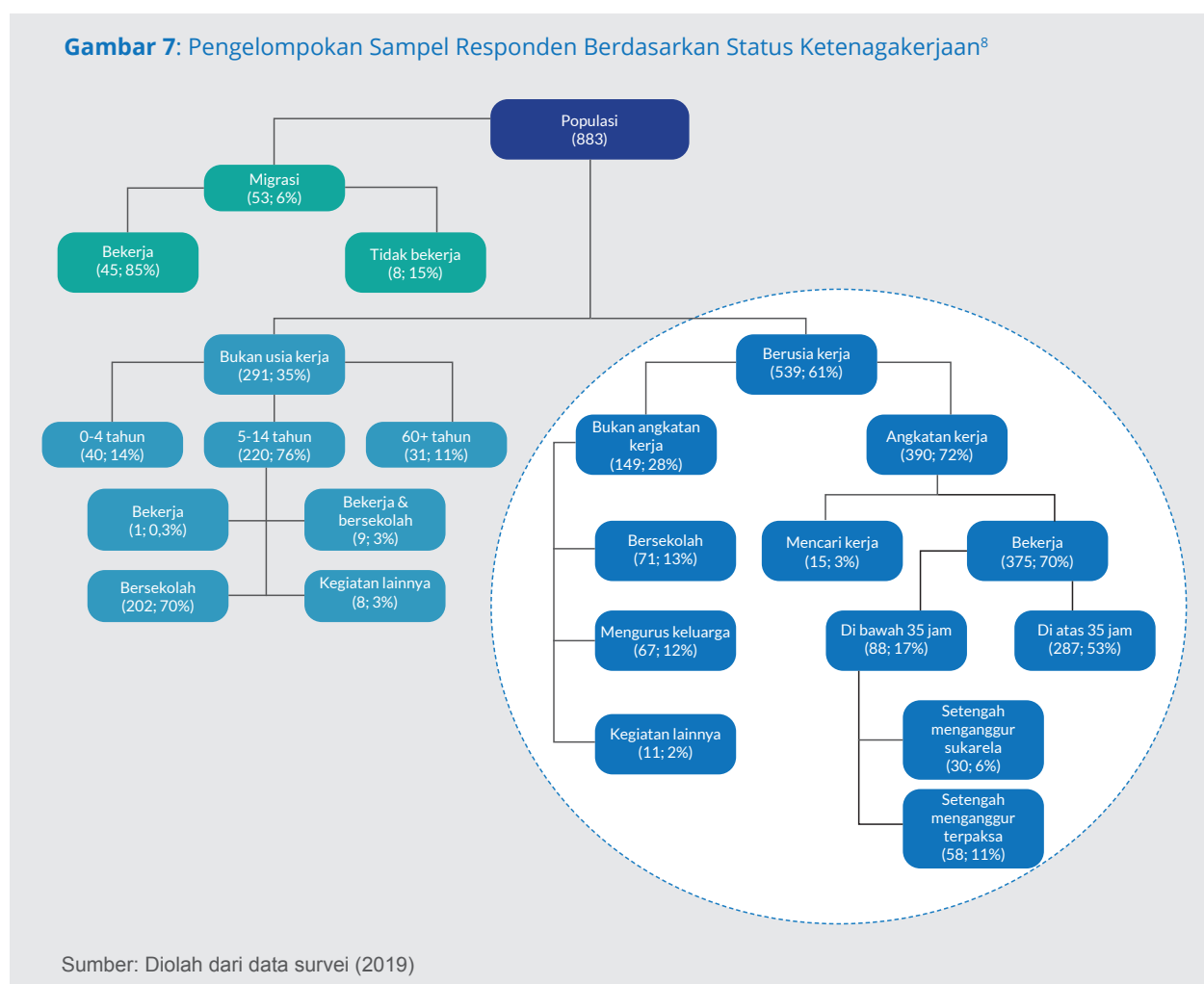
Migrasi di dalam negeri lebih banyak dilakukan oleh anggota keluarga sampel di Pacitan (27 orang). Sebagian besar dari mereka bekerja di kota/kabupaten sekitarnya, seperti Surabaya. Sebagian kecil menjadi buruh sawit di luar Jawa, seperti Sumatera. Pada umumnya, mereka bekerja di pabrik, menjadi kuli bangunan, atau bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sedangkan migrasi ke luar negeri lebih banyak dilakukan oleh anggota keluarga sampel di Indramayu (9 orang) dengan tujuan Taiwan dan Malaysia untuk bekerja sebagai buruh bangunan atau asisten rumah tangga.

⁷ Anggota keluarga PKH dianggap bermigrasi apabila namanya tertera pada kartu keluarga penerima manfaat, tetapi selama enam bulan atau lebih tinggal di kabupaten/kota/negara yang berbeda.

Hanya anggota keluarga migran di Indramayu yang menyatakan bahwa mereka memperoleh sosialisasi atau pembekalan dari perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait sebelum berangkat ke luar negeri.

Sekitar sepertiga anggota keluarga sampel tidak termasuk dalam usia kerja: sebanyak 11 persen berusia 60 tahun ke atas, 14 persen bayi dan anak di bawah lima tahun (balita), dan 76 persen berusia 5 -14 tahun. Meskipun belum termasuk usia kerja, ada sembilan anak yang bersekolah sambil bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang, serta satu orang bekerja dan tidak bersekolah. Mereka berada di Pacitan (6 orang) dan Surakarta (3 orang). Alasan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi berbeda-beda. Di Pacitan, anak-anak terbiasa membantu orang tua di sawah dan mengumpulkan rumput (*ngarit*) karena banyak di antara mereka memiliki tanah warisan. Membantu orang tua dianggap sebagai bagian dari proses belajar agar bisa mengelola lahan di kemudian hari. Adapun di Surakarta, anak-anak dari keluarga sampel yang bekerja adalah atas kehendak sendiri. Mereka bekerja pada orang lain, seperti di angkriangan atau di kafe, sebagai pekerja paruh waktu.

Gambar 7: Pengelompokan Sampel Responden Berdasarkan Status Ketenagakerjaan⁸



Sebagian besar anggota keluarga sampel usia kerja yang tidak bermigrasi sudah bekerja (53 persen bekerja penuh dan 17 persen setengah menganggur). Bagi mereka yang bukan bagian dari angkatan kerja, 13 persen masih bersekolah, 12 persen mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya, dan 2 persen mencari pekerjaan.

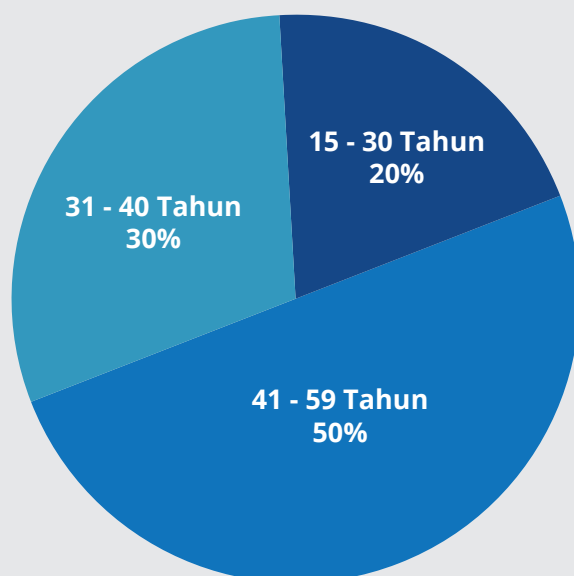
⁸ Menurut Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Biro Statistik (BPS), 'usia kerja' hanya mempertimbangkan mereka yang bertempat tinggal di rumah tangga. Dengan demikian, Statistik migrasi dihitung secara terpisah

2.2 Aktivitas Ekonomi Anggota Keluarga Penerima PKH Usia Kerja yang Bekerja

Secara keseluruhan, anggota keluarga laki-laki dalam sampel penelitian ini memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi (84 persen) daripada rekan perempuan mereka (61 persen). Namun, ini masih lebih tinggi dari tingkat partisipasi angkatan kerja untuk anggota keluarga perempuan PKH di tingkat nasional (sekitar 52 persen). Menurut responden penelitian, perempuan umumnya kurang berpartisipasi dalam angkatan kerja dibandingkan dengan laki-laki karena tugas rumah tangga dan kesulitan dalam menemukan peluang kerja yang fleksibel. Walaupun demikian, bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan cenderung lebih beragam daripada laki-laki, karena sejumlah pekerjaan secara stereotip dilekatkan pada tugas perempuan, seperti asisten rumah tangga, buruh cuci setrika, pengasuh anak, atau menjual makanan matang. Usaha mandiri seperti warung dan usaha makanan sederhana yang dapat dikerjakan di rumah juga lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Meskipun secara umum sebagian besar anggota keluarga sampel usia kerja yang bekerja⁹ adalah laki-laki, bahkan di Bandung Barat mencapai 65,5 persen, hal yang sebaliknya ditemukan di Pacitan. Besarnya angka perempuan yang bekerja di Pacitan dipengaruhi oleh lapangan kerja di sektor pertanian, yang cenderung lebih fleksibel dan terbuka bagi partisipasi perempuan.

Dari segi kelompok umur, sekitar setengah dari anggota keluarga sampel yang bekerja berusia 41-59 tahun, sedangkan sepertiganya berusia 31-40 tahun. Adapun pemuda (15-30 tahun) yang bekerja rata-rata sekitar 20 persen karena sebagian dari mereka masih bersekolah (lihat **Gambar 8**). Di Bandung Barat, angkanya lebih tinggi dari rata-rata, yakni 26 persen orang muda bekerja dan ini sebagian disebabkan oleh tipologi daerah semi-perkotaan yang menyediakan beragam jenis lapangan kerja sehingga menarik kaum muda untuk masuk ke pasar kerja.

Gambar 8: Sampel Responden, Pengelompokan Usia Berdasarkan Status Pekerjaan¹⁰



Sumber: Diolah dari data survei

⁹ Definisi "bekerja" dalam studi ini mengacu pada BPS, yaitu:

- (i) Melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
- (ii) Mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu untuk sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya.

¹⁰ Menurut Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Biro Statistik (BPS), 'usia kerja' hanya mempertimbangkan mereka yang bertempat tinggal di rumah tangga. Statistik migrasi dihitung secara terpisah.

Lebih dari setengah dari mereka yang bekerja hanya memiliki pendidikan sekolah dasar, terutama mereka yang berusia di atas 40 tahun, menghasilkan tingkat keterampilan yang rendah dan kualifikasi pekerjaan yang minimal.

Seperti halnya tingkat pendidikan anggota keluarga sampel yang umumnya rendah (lihat Tabel 4), lebih dari separuh anggota keluarga yang bekerja juga berpendidikan relatif rendah. Khususnya di Indramayu dan Pacitan, sebagian besar anggota keluarga usia kerja berpendidikan SD ke bawah. Secara umum di kedua daerah ini, pendidikan penduduk usia 40 tahun ke atas kebanyakan SD atau bahkan tidak lulus SD—karena di masa lalu akses ke sekolah sedemikian sulit. Bahkan hingga saat ini, masih ada dusun yang sulit mengakses sekolah karena kondisi jalan yang buruk dan sedikitnya jumlah sekolah menengah/ sederajat. Namun ada pula responden di Pacitan yang menyatakan bahwa anak pertamanya memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya ke SMA karena merasa harus segera berkontribusi pada ekonomi keluarga, sehingga adik-adiknya tidak putus sekolah.

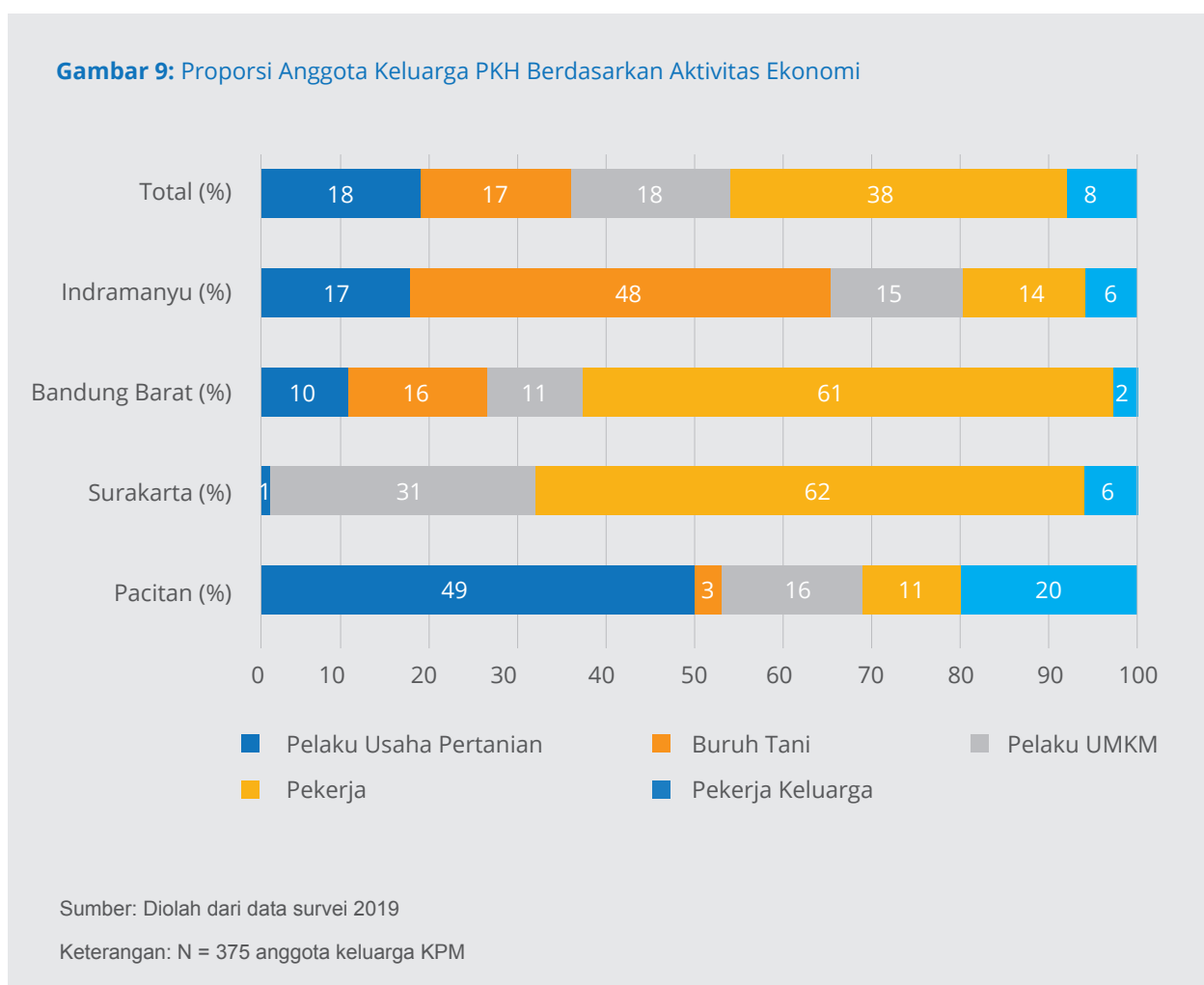
Tabel 4: Karakteristik Demografis Anggota Keluarga PKH Usia Kerja yang Bekerja

Kategori		Kabupaten (%)				Total	
		Indramayu	Bandung Barat	Surakarta	Pacitan	%	N=375
Jenis Kelamin	Perempuan	41,1	34,4	41	50,6	41,6	156
	Laki-laki	58,9	65,6	59	49,4	58,4	219
Kelompok Usia	15-30	20	25,8	17	14,9	19,5	73
	31-40	29,5	32,3	31	33,3	31,5	118
Pendidikan (15 th+)	41-59	50,5	41,9	52	51,7	49,1	184
	SD ke bawah	80	59,1	38	67,8	60,8	228
	SMP	15,8	24,7	29	29,9	24,8	93
	SMA	4,2	15,1	30	2,3	13,3	50
	Perguruan tinggi	0	1,1	3	0	1,1	4

Sumber: Diolah dari data survei (2019)

Di lokasi penelitian yang telah ditentukan, anggota keluarga terlibat dalam berbagai kegiatan mata pencarian. Secara keseluruhan, lebih dari sepertiga anggota keluarga dalam sampel bekerja di sektor non-pertanian. Namun, di Pacitan hampir setengahnya adalah pelaku usaha pertanian dan di Indramayu hampir setengahnya adalah buruh tani (**Gambar 9**). Akan tetapi, di Bandung Barat dan Surakarta lebih dari setengahnya bekerja di sektor non-pertanian. Di Surakarta, hampir sepertiga responden adalah pemilik usaha UMKM.

Gambar 9: Proporsi Anggota Keluarga PKH Berdasarkan Aktivitas Ekonomi



Pemilik Usaha dan Pekerja di Sektor Pertanian

Karakteristik Umum

Dari 133 anggota keluarga sampel yang bekerja di sektor pertanian, hanya separuh lebih yang menjalankan usaha sebagai pemilik atau pengelola (52 persen) dan sisanya adalah buruh tani (48 persen). Meskipun demikian, kedua kelompok memiliki karakteristik demografis yang berbeda. Petani pemilik atau pengelola usaha tani lebih banyak laki-laki (64 persen), sebaliknya perempuan lebih banyak menjadi buruh tani (62,5 persen) (Tabel 5 dan Tabel 6). Fenomena ini terkait dengan anggapan tradisional bahwa laki-laki merupakan pelaksana kegiatan pertanian dalam keluarga (Suradisastra 1983). Perempuan juga banyak yang menjadi buruh tani di usaha pertanian milik orang lain.

Hampir dua pertiga anggota keluarga yang bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik/pengelola usaha tani atau buruh tani berada dalam kelompok usia 41-59 tahun, sementara sepertiga berada dalam kelompok usia 31-40 tahun (Tabel 5). Namun, hanya 1,4 persen petani pemilik/pengelola usaha tani yang berusia kurang dari 31 tahun dibandingkan dengan 14 persen buruh tani (Tabel 6). Hal ini kemungkinan terkait dengan periode pengumpulan data yang bertepatan dengan musim panen, terutama untuk komoditas padi dan palawija, sehingga banyak orang berusia muda yang menjadi buruh tani sementara.

Di Pacitan dan Bandung Barat, profesi sebagai buruh tani di usaha budi daya tanaman¹¹ merupakan pekerjaan musiman, terutama bagi pekerja berusia muda. Mayoritas buruh tani yang berusia 40 tahun ke bawah (77 persen) melakukan pekerjaan lain selama setahun terakhir. Mereka hanya menjadi buruh tani ketika musim panen atau musim tanam, dan pada waktu lain mereka menjadi kuli bangunan, kuli panggul, atau menjual jajanan. Di sisi lain, hanya 46 persen buruh tani yang berusia di atas 40 tahun melakukan pekerjaan lain.

Fenomena berbeda muncul di subsektor perikanan. Anggota keluarga yang bekerja sebagai awak kapal di kapal penangkap ikan dan nelayan yang menggunakan perahu mereka sendiri umumnya tidak terlibat dalam pekerjaan lain.

Tabel 5: Distribusi Pemilik Usaha atau Pengelola Pertanian Berdasarkan Kelompok Usia (%)

Subsektor lapangan usaha Pertanian	Kelompok Usia			Total	Jenis Kelamin		Total
	15-30 tahun	31-40 tahun	41-59 tahun		Perempuan	Laki-laki	
Padi dan palawija	0	17,4	36,2	53,6	20,3	33,3	53,6
Hortikultura	0	2,9	5,8	8,7	4,3	4,3	8,7
Perkebunan	0	0	2,9	2,9	2,9	0	2,9
Perikanan tangkap	1,4	4,3	15,9	21,7	1,4	20,3	21,7
Peternakan	0	8,7	4,3	13	7,2	5,8	13
Total	1,4	33,3	65,2	100	36,2	63,8	100

Sumber: Diolah dari hasil survei 2019.

Keterangan: Jumlah responden = 69 anggota KPM. Nilai total kurang sedikit dari 100% karena pembulatan

Tabel 6: Distribusi Buruh Tani Berdasarkan Kelompok Usia (%)

Subsektor lapangan usaha Pertanian	Kelompok Usia			Total	Jenis Kelamin		Total
	15-30 tahun	31-40 tahun	41-59 tahun		Perempuan	Laki-laki	
Padi dan palawija	10,9	25	45,3	81,3	46,9	34,4	81,3
Hortikultura	0	0	3,1	3,1	1,6	1,6	3,1
Perkebunan	0	0	1,6	1,6	1,6	0	1,6
Perikanan tangkap	3,1	1,6	6,3	10,9	9,4	1,6	10,9
Perikanan budidaya	0	0	1,6	1,6	1,6	0	1,6
Peternakan	0	0	1,6	1,6	1,6	0	1,6
Total	14,1	26,6	59,4	100	62,5	37,5	100

Sumber: Diolah dari hasil survei 2019.

Keterangan: Jumlah responden = 64 anggota KPM. Nilai total kurang sedikit dari 100% karena pembulatan

¹¹ Termasuk dalam budi daya tanaman adalah budi daya padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan.

Jika dibedakan oleh subsektor, sekitar setengah petani pemilik/pengelola usaha tani menanam padi dan palawija, sedangkan sekitar seperlima lainnya bergerak di usaha perikanan tangkap (Tabel 5). Budi daya padi dilakukan oleh anggota keluarga sampel di Pacitan, Bandung Barat, dan Indramayu. Sedangkan budi daya palawija, seperti jagung dan umbi-umbian, hanya ditemukan di Pacitan.

Perikanan tangkap hanya ada di Indramayu, yang merupakan satu-satunya wilayah pesisir di antara empat daerah studi. Tidak ada satu pun anggota keluarga sampel yang melakukan budi daya ikan air payau karena besarnya modal dan luasnya lahan yang diperlukan. Ini yang menyebabkan sebagian besar anggota keluarga sampel yang bekerja di sektor perikanan bermata pencarian sebagai anak buah kapal atau buruh/penggarap tambak. Jenis hasil laut yang ditangkap pada periode studi ini adalah komoditas yang bernilai jual cukup tinggi, yaitu cumi-cumi, kepiting, dan udang, selain ikan laut lainnya.

Praktik Wirausaha Pemilik Ladang dan Buruh Tani PKH

Usaha pertanian yang dimaksud dalam studi ini mencakup budi daya tanaman (padi, palawija, dan hortikultura), peternakan, budi daya ikan, dan perikanan tangkap. Pada umumnya anggota keluarga sampel masih mengelola usaha tani secara sederhana. Penggunaan traktor, misalnya, masih terbatas (13 persen). Sementara itu, di antara petani jagung, hanya dua dari lima petani yang memanfaatkan mesin pemipil jagung. Di subsektor perikanan, anggota keluarga sampel yang bekerja sebagai nelayan umumnya menggunakan alat tangkap sederhana seperti jaring, pancing, sero, dan bagan. Sekitar setengah dari nelayan di Indramayu mencari ikan tanpa menggunakan perahu, hampir setengah lainnya menggunakan perahu tempel motor, dan hanya sebagian kecil yang menggunakan kapal motor (**Tabel 7**). Dengan alat produksi yang terbatas, produktivitas usaha pertanian yang dijalankan anggota keluarga terbilang relatif rendah.

Produktivitas petani di antara keluarga PKH rendah karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang teknik budidaya modern, akses terbatas ke alat-alat produktif, dan rendahnya partisipasi dalam kelompok tani.

Tabel 7: Profil Usaha Pertanian yang Dioperasikan oleh Anggota Keluarga Sampel (%)

Indikator		Indramayu (N=16)	Bandung Barat (N=9)	Pacitan (N=43)	Surakarta (N=1)	Total
Perempuan (%)		6,3	55,6	44,2	0	26,5
Kelompok usia						
	15-30 tahun	6,3	0	0	0	6,3
	31-40 tahun	18,8	44,4	37,2	0	25,1
	41-59 tahun	75	55,6	62,8	100	73,4
Subsektor						
	Padi dan palawija	6,3	77,8	67,4	0	37,9
	Hortikultura	0	11,1	11,6	0	5,7
	Perikanan tangkap	93,8	0	0	0	23,5
	Peternakan	0	11,1	16,3	100	31,2
Sistem irigasi						
	Tadah hujan	0	75	86,1	NA	40,3
	Irigasi semi teknis	100	25	8,3	NA	33,3
	Irigasi teknis (air tanah)	0	0	5,6	NA	1,4
Jenis Perahu Penangkapan ikan						
	Kapal motor	6,7	NA	NA	NA	6,7
	Perahu motor tempel	40	NA	NA	NA	40
	Tanpa perahu	53,3	NA	NA	NA	53,3
	Memiliki perahu sendiri	20	NA	NA	NA	20
Orientasi pemasaran						
	Menjual seluruhnya	81,3	22,2	51,2	0	38,7
	Menjual sebagian	12,5	44,4	23,3	100	45
	Konsumsi sendiri sepenuhnya	6,3	33,3	25,6	0	16,3
Cara pemasaran						
	Menjual ke pasar	6,7	0	3,2	0	2,5
	Melalui pedagang perantara	93,3	83,3	87,1	0	65,9
	Menjual ke konsumen sekitar rumah	0	16,7	9,7	100	31,6

Sumber: Diolah dari hasil survey 2019

Catatan: Persentase di Surakarta terdaftar sebagai N/A sehingga ukuran sampel sample 1 tidak mengubah total rata-rata. Nilai total kurang sedikit dari 100% karena pembulatan

Mayoritas pengusaha pertanian dan nelayan PKH beroperasi secara semi-komersial. Sekitar setengah (52 persen) menjual semua produk mereka; 27 persen menjual sebagian produk mereka. Di antara petani padi, sekitar 46 persen menjual sebagian dari panen mereka, sementara lainnya mengonsumsi sendiri seluruh hasil panen mereka.

Dalam hal pemasaran hasil pertanian mereka, sekitar 88 persen petani pemilik atau pengelola usaha tani menjual produknya melalui tengkulak atau pedagang perantara sehingga memperpanjang rantai penjualan dan menekan keuntungan yang dapat diperoleh. Sekitar 9 persen menjual ke tetangga sekitar rumah, dan hanya 3,3 persen yang menjual ke pasar, dimana mereka berpotensi mendapatkan harga tertinggi untuk produk mereka.

Preferensi pelaku usaha pertanian untuk menjual hasil usahanya melalui tengkulak di satu sisi memang dapat dipengaruhi oleh infrastruktur, namun ada juga faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Pada subsektor padi dan palawija, petani cenderung menjual hasil panen kepada tengkulak meskipun mereka menyadari bahwa tengkulak terkadang memainkan harga. Selain kebutuhan akan uang yang mendesak, sedikitnya hasil panen yang akan dijual menjadi faktor yang mendorong petani untuk menjual hasil panen kepada tengkulak yang terdekat dengan tempat tinggalnya daripada menjualnya langsung ke pasar yang relatif jauh dengan kondisi jalan dan medan yang tidak mendukung.

88 persen petani menjual produk mereka melalui tengkulak atau pedagang perantara. Hanya 3,3 persen yang menjual langsung ke pasar di mana mereka berpotensi mendapatkan harga tertinggi.

Analisis Modal Penghidupan Pemilik Pertanian dan Buruh Tani

Pemilik pertanian menghadapi berbagai hambatan dalam mengelola bisnis mereka. Hambatan tersebut secara khusus berkaitan dengan keterbatasannya pada berbagai sumber modal mata pencarian, seperti yang dibahas di bawah ini.

Modal Sumber Daya Manusia

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor yang paling memengaruhi terbatasnya teknik pengelolaan usaha tani yang diterapkan oleh anggota keluarga sampel. Mayoritas pelaku usaha tani berpendidikan SD atau lebih rendah dan lebih dari 15 persen dari anggota keluarga yang memiliki atau mengoperasikan usaha pertanian tidak dapat membaca dan menulis. Rendahnya tingkat pendidikan ini memengaruhi sikap mental dan etos kerja, serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi. Intan (1997) menyebutkan bahwa kendala mendalam dari sumber daya manusia dalam agribisnis adalah sikap mental yang negatif, yang mengakibatkan lamban dan buruknya kualitas pekerjaan mereka. Sebagian besar dari mereka menjadi petani karena mengaku tidak memiliki kemampuan lain (Muksin 2007). Rendahnya adaptasi terhadap teknologi juga dapat diamati dari penggunaan traktor. Di antara sedikit pelaku usaha tani yang menyewa traktor untuk membajak (13 persen), hampir semuanya tidak dapat mengoperasikan traktor itu sendiri sehingga harus menyewa alat sekaligus operatornya dengan biaya yang besar. Biaya dapat mencapai 30 persen dari total biaya operasional nonupah, sehingga keuntungan usaha yang diperoleh makin kecil dan akhirnya hanya sedikit yang mau menyewa traktor.

Selain rendahnya tingkat pendidikan formal, mayoritas sampel yang memiliki/mengelola usaha tani juga tidak pernah mendapat pelatihan pengelolaan usaha budi daya tanaman, peternakan, dan perikanan.

Pelatihan ini biasanya tersedia melalui koperasi pertanian atau perikanan, tetapi anggota perlu memiliki lahan atau memiliki modal sosial untuk memenuhi persyaratan, yang tidak termasuk sebagian besar responden. Hal tersebut dibahas lebih lanjut dalam Bab 3.

Sumber Daya Alam

Lahan dan air merupakan modal alam yang sangat memengaruhi usaha pertanian. Lahan mutlak diperlukan untuk budi daya tanaman, perikanan, atau peternakan. Ketersediaan air tawar diperlukan untuk pengairan lahan pada budi daya tanaman, air minum hewan ternak, dan media pengembangbiakan atau pembesaran ikan air tawar. Begitu pula air payau diperlukan untuk budi daya ikan/udang tambak. Sementara itu, sungai, danau, dan laut merupakan sumber daya utama bagi usaha perikanan tangkap.

Penguasaan lahan oleh anggota keluarga sampel berbeda-beda di setiap daerah studi. Di Pacitan terdapat: sawah, tegalan, atau ladang untuk bertani padi, palawija, dan hortikultura; dan lahan pekarangan untuk memelihara ternak ayam, kambing, dan sapi dalam skala kecil, serta mendukung ketersediaan pakan ternak.¹² Di Indramayu terdapat: sungai, laut, dan empang, tambak untuk menangkap atau membudidayakan ikan; dan sawah, baik lahan timbul di pinggir pantai maupun lahan yang sejak dulu merupakan persawahan. Di Bandung Barat terdapat: lahan basah di sekitar Waduk Saguling yang bisa dimanfaatkan untuk sawah pasang surut dan lahan kering untuk bertani padi dan palawija. Adapun di Surakarta tidak ditemukan area lahan pertanian karena memang daerah perkotaan.

Ketersediaan lahan di suatu wilayah akan menentukan bentuk dan corak pengelolaan usahanya. Dari 54 anggota keluarga sampel pemilik/pengelola budi daya tanaman, 80 persen di antaranya mengelola lahan milik sendiri dengan rerata luas lahan 2.773 meter persegi. Sebanyak 21 persen sisanya mengelola lahan dengan sistem bagi hasil dengan rerata luas lahan 831 meter persegi. Rerata luas lahan yang dikelola serta status pengelolaannya berbeda-beda di setiap daerah studi. Di Pacitan, mayoritas mengelola lahan milik sendiri dengan rerata luas 2.926 meter persegi. Karena pada umumnya merupakan tanah warisan, setiap kali diwariskan lagi luasnya makin menyusut sesuai dengan jumlah ahli waris.

“Semakin ke sini, semakin kecil lahan [sawah] karena terus dibagi turun-temurun.”

(Peserta FGD kecamatan, Pacitan, 20 Maret 2019).

Sebagian kecil pengusaha pertanian di Pacitan mengelola lahan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penyakap. Sebaliknya di Bandung Barat, sebagian besar mengelola lahan dengan sistem sewa dengan rerata luas lahan yang dikelola sebesar 831 meter persegi. Sistem sewa tersebut dijalin antara pelaku usaha dan pemilik lahan dengan kisaran biaya sewa antara Rp200.000 – Rp300.000 per tahun. Dengan perjanjian hak sewa lahan yang umumnya turun-temurun. Sementara itu, di Indramayu hanya ada satu anggota keluarga sampel yang menekuni usaha pertanian, yang dikerjakan di atas lahan milik sendiri seluas 200 meter persegi. Meskipun demikian, informan di kantor desa dan masyarakat menyatakan bahwa lahan timbul di pinggir pantai dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dengan membayar biaya administrasi ke pemerintah desa sebesar Rp250.000 per hektar pada saat awal penggunaan lahan. Lahan sawah juga dapat disewa senilai Rp5 juta per hektare tiap tahun. Sedangkan lahan tambak dapat disewa dengan biaya Rp18 juta per hektare tiap tahun.

¹² Kecuali di salah satu desa studi di Pacitan. Terdapat peraturan tidak tertulis yang mengharuskan warganya mencari rumput gajah hanya di lahan yang dimilikinya. Sehingga, sejumlah keluarga penerima manfaat yang tidak memiliki lahan harus membeli rumput untuk pakan ternak atau memberi makan ternak dengan rumput liar.

Meski rerata luas lahan yang dikelola pemilik/pengelola usaha tani di Pacitan paling luas daripada dua wilayah lain, topografi wilayah studi yang merupakan lereng perbukitan dengan lahan datar yang terbatas¹³ menyebabkan minimnya lahan yang dapat ditanami padi meskipun telah diterapkan sistem terasering. Sempitnya lahan yang produktif menyebabkan usaha tani cenderung bersifat subsisten—hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Modal alam lain yang tidak kalah penting dalam pengelolaan usaha pertanian adalah ketersediaan air. Sumaryanto (2006) mengungkapkan bahwa air irigasi merupakan sumber daya strategis yang akan menentukan tidak hanya produktivitas pertanian, melainkan juga strategi yang digunakan petani, terlebih jika komoditas yang diusahakan adalah padi dan palawija. Berdasarkan sistem irigasinya, sebagian besar usaha tani yang dikelola oleh anggota keluarga sampel adalah tadah hujan dan sisanya mendapat irigasi semi-teknis.¹⁴

Di Indramayu, tersedia sistem irigasi semi-teknis yang berasal dari bendungan semi permanen. Namun karena letaknya berdekatan dengan laut, sering kali air sungai bercampur dengan air laut sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Di Pacitan, sebanyak 14 persen anggota keluarga sampel mengandalkan sungai atau mata air untuk mengairi lahan. Di sana juga tidak ada satu pun yang menggunakan air tanah karena berlokasi di dataran tinggi karena mereka tidak mampu menyewa pompa air. Karena itu, petani hanya bisa panen sekali dalam setahun, bukan tiga kali setahun jika mampu menggunakan sistem pengairan teknis, sehingga mengurangi hasil panen dan pendapatan tahunan. Sebagian petani lain yang mengelola lahan dekat dengan sungai atau mata air bisa panen dua kali dalam setahun.

Selain tadah hujan, usaha pertanian di Bandung Barat memanfaatkan waduk sebagai sumber pengairan. Anggota keluarga sampel selalu memanfaatkan lahan pasang surut dengan menanam padi dan sayuran di lahan yang airnya telah surut, kemudian menggunakan air waduk yang masih tergenang sebagai sumber pengairan. Namun ketersediaan air waduk makin terbatas seiring dengan makin berkembangnya industri besar di sekitarnya. Selain itu, air waduk sering kali tercemar oleh limbah dari pabrik-pabrik tekstil di dekatnya. Dengan amat bergantungnya sistem pengairan pada alam, usaha pertanian tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Umumnya, mereka hanya panen sekali dalam setahun, yang tidak mencukupi untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan menambah pendapatan. Meskipun demikian, beberapa anggota keluarga sampel mencoba memaksakan menanam dua kali setahun dengan memanfaatkan sisa-sisa musim hujan, dengan risiko turunnya hasil atau kualitas produksi, atau bahkan gagal panen jika ternyata curah hujan rendah.

Meskipun sumber daya alam merupakan komponen utama di sektor pertanian, kondisi alam dapat juga menjadi faktor utama kerentanan usaha pertanian. Pacitan, misalnya, sangat rawan dilanda bencana alam, seperti longsor dan banjir yang terjadi hampir setiap tahun (BNPB, 2019) karena topografi wilayahnya cenderung miring dan berlereng. Kemungkinan terjadinya longsor makin tinggi ketika terdapat sawah di lereng-lereng bukit. Tanaman padi yang tidak berakar kuat dan rendaman air di sawah menjadi beban tambahan bagi lereng. Sehingga, pada saat curah hujan tinggi rentan longsor. Bencana alam ini menyebabkan kerap terjadinya gagal panen, setidaknya dalam tiga tahun terakhir.

Pada subsektor perikanan tangkap di Indramayu, kegiatan penangkapan ikan tergantung pada kondisi angin. Pada musim angin barat, ombak di laut sangat besar dan dapat membahayakan nelayan. Pada kondisi seperti ini, nelayan harus berpindah mencari ikan ke wilayah lain yang ombaknya tidak terlalu besar. Jika itu tidak memungkinkan, untuk sementara mereka akan beralih pekerjaan menjadi buruh atau memperbaiki alat tangkap yang rusak. Hal yang sama juga terjadi pada petani saat musim kemarau tiba. Mereka akan menjadi buruh di

¹³ Hal ini sejalan dengan topografi Pacitan yang hanya terdiri dari 4 persen tanah datar dari total luas wilayahnya (gambaran umum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021).

¹⁴ Sawah/ladang setengah teknis adalah sawah/ladang yang sumber pengairannya dari sungai, tetapi tidak tersedia sepanjang tahun.

usaha pertanian di wilayah lain yang memiliki sistem irigasi teknis, atau untuk sementara menjadi kuli bangunan, kuli panggul kayu, atau menghabiskan waktu dengan membajak lahan sambil menunggu musim hujan tiba.

“Saya pernah ikut kerja menanam padi [tandur] setengah hari dibayar Rp50 ribu, jika sehari Rp80 ribu. Peluang kerja buruh tani banyak, akan tetapi ketika musim tanam dan musim panen aja.”

(Peserta FGD mini perempuan muda, Indramayu, 17 Maret 2019).

80 persen petani PKH dalam studi ini mengelola tanah mereka sendiri yang terbatas, tetapi biasanya berkualitas buruk. **86 persen mengalami keterbatasan sistem irigasi dan mengandalkan panen dengan tadah hujan, sehingga mengurangi hasil panen mereka dari tiga kali setahun menjadi hanya sekali setahun.**

Modal Finansial

Akses terhadap modal keuangan juga memengaruhi pengelolaan usaha tani. Sebagian besar pemilik/pengelola usaha tani (90 persen) mengetahui pihak-pihak yang dapat memberikan pinjaman modal, namun hanya 37 persen yang pernah meminjam dan, bahkan, hanya 10 persen yang meminjam dari lembaga keuangan formal. Sekalipun terdapat layanan pinjaman dengan bunga rendah dari skema kredit mikro/ultramikro, mayoritas anggota keluarga sampel masih enggan mengakses kredit. Secara nasional, realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di sektor pertanian, perburuhan, kehutanan, dan sektor perikanan pada 2018 masih relatif rendah (21 persen dan 1,4 persen) jika dibandingkan dengan sektor perdagangan (53,3 persen) (KUR, 2018). Akan tetapi, untuk mengakses KUR, petani harus membuktikan bahwa bisnis mereka layak dan menguntungkan, yang sebagian besar petani PKH tidak dapat lakukan (lihat juga pada diskusi di **Bab 3**). Terlepas dari tidak terpenuhinya prasyarat untuk mengakses lembaga keuangan formal, bahkan pada lembaga keuangan informal (17 persen), mengindikasikan adanya tingkat kebutuhan kredit yang rendah.

Sebagian besar anggota keluarga sampel yang mengelola usaha di bidang pertanian merupakan pemilik lahan dan seperlima dari nelayan merupakan pemilik perahu, namun, perahu motor tempel yang umumnya berukuran kecil, yang dimiliki sebagian besar anggota keluarga sampel, tidak dapat dijadikan agunan. Ini berbeda dengan lahan pertanian. Selama memiliki bukti kepemilikan, lahan tersebut dapat menjadi agunan dengan nilai kredit tergantung dari seberapa kuat bukti kepemilikan lahan tersebut. Lebih dari setengah anggota keluarga sampel yang mengelola lahan milik sendiri memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah atas nama mereka, sedangkan sepertiganya tidak memiliki sertifikat tanah yang sah.

Tiga faktor yang melatarbelakangi rendahnya permintaan kredit di antara anggota keluarga penerima PKH, yaitu:

1. **Preferensi pada bank syariah.** Umumnya anggota keluarga penerima PKH menyadari bahwa aset yang mereka miliki dapat menjadi agunan untuk mengakses pinjaman di lembaga keuangan formal. Namun beberapa di antara mereka berkeinginan meminjam pada bank syariah yang umumnya tidak tersedia.
2. **Tidak merasa ada kebutuhan untuk mengambil pinjaman,** khususnya pada pelaku usaha pada subsektor pertanian tanaman pangan, karena hasil panen hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Mereka tidak berkeinginan untuk mengembangkan usaha dengan menambah modal, apalagi jika bersumber dari pinjaman.

3. **Ketidakberanian untuk mengambil risiko.** Anggota keluarga penerima manfaat umumnya tidak berani mengambil risiko atas pinjaman pada lembaga formal karena khawatir akan gagal angsur (lihat juga **Bab 3**). Fenomena ini ditemukan pada pelaku usaha subsektor peternakan dan perikanan. Meskipun demikian, terdapat seorang responden di Pacitan yang sukses mengembangkan usaha ternak ayam petelur dengan modal dari lembaga keuangan formal, dengan dorongan dan binaan dari pengusaha ternak ayam petelur lain. Hal ini memperlihatkan bahwa dukungan modal usaha untuk pengembangan usaha pertanian perlu diiringi dengan dorongan dan pendampingan dari pelaku usaha lain yang bisa menjadi contoh atau mentor.

Hanya 37 persen petani mengambil pinjaman, dan hanya 10 persen pinjaman tersebut berasal dari lembaga keuangan formal.

Infrastruktur

Kondisi jalan dan ketersediaan sarana transportasi memengaruhi cara petani memasarkan hasil pertanian mereka, yang sebagian besar menjual ke pedagang perantara. Rerata jarak dari tempat tinggal anggota keluarga sampel yang menjadi pengusaha pertanian ke pasar adalah 10,6 kilometer di Pacitan, 7,8 kilometer di Indramayu, dan 4,4 kilometer di Bandung Barat. Meskipun kepemilikan sepeda motor di antara anggota keluarga sampel yang menjadi pengusaha pertanian cukup tinggi (71 persen), diperlukan waktu tempuh yang panjang untuk mencapai pusat kota dan pasar di Pacitan dan Indramayu. Di Pacitan, kondisi jalannya curam dan licin, sedangkan di Indramayu ada jalan rusak dan jalan tanah yang becek saat hujan. Meskipun 70 persen pelaku usaha tani di Pacitan menyatakan bahwa akses jalan dari tempat tinggal ke jalan utama desa dapat dilewati dengan sepeda motor sepanjang tahun, 30 persen lainnya mengatakan bahwa jalan tertutup ketika longsor atau sepanjang musim hujan. Adapun kondisi jalan dan sarana transportasi di Bandung Barat yang merupakan daerah semi-perkotaan, relatif tidak bermasalah.

Meskipun kondisi jalan dan kurangnya sarana transportasi dapat menghambat akses ke pusat perdagangan, namun tidak tampak ada hubungan yang signifikan antara jarak ke pasar dan keputusan menjual hasil pertanian ke pasar. Di Pacitan dan Bandung Barat, misalnya, hanya dua petani yang menjual produk mereka di pasar (walaupun jaraknya kurang dari 5 km) yang menunjukkan bahwa preferensi pelaku usaha pertanian untuk menjual hasil usaha melalui pedagang perantara dipengaruhi oleh faktor-faktor selain kondisi modal fisik.

Modal Sosial

Sebagaimana dibahas di bagian modal manusia, mayoritas anggota keluarga sampel yang menjadi pengusaha pertanian tidak mendapat pelatihan atau penyuluhan karena hanya 18 persen yang tergabung dalam kelompok tani/nelayan. Padahal, keanggotaan dalam kelompok tani/nelayan merupakan modal sosial yang penting, karena setiap pelatihan dan dukungan datang melalui kelompok ini, termasuk: (i) pemberian subsidi pupuk dan benih bersubsidi; (ii) dukungan fasilitas produksi tanaman pangan; dan (iii) dukungan terkait perikanan. Petani yang bukan anggota kelompok, harus membayar harga penuh untuk benih dan pupuk. Sementara pengusaha perikanan tangkap dan nelayan tidak dapat menikmati akses pada bantuan alat tangkap dan input perikanan.

Rendahnya kepesertaan anggota keluarga penerima PKH di kelompok tani/nelayan antara lain karena mereka tidak dapat memenuhi prasyarat keanggotaan kelompok tani atau nelayan.¹⁵ Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/2016, salah satu dasar pembentukan kelompok tani atau poktan adalah anggotanya harus memiliki kegiatan usaha tani sebagai mata pencarian utama. Penentuan mata pencarian utama ini tampaknya tergantung kondisi wilayah. Menurut salah satu petugas penyuluh lapangan (PPL) pertanian yang diwawancarai di Pacitan, meskipun mayoritas anggota keluarga penerima PKH bekerja sebagai petani, mereka dianggap sebagai petani serabutan karena lahan yang dimiliki sangat kecil. Karena itu, mereka tidak bisa tergabung dalam kelompok tani. Hal berbeda ditemukan di Bandung Barat. Meskipun lahan yang dikelola anggota keluarga penerima PKH—dengan sistem sewa sebagaimana telah dijelaskan di bagian sumber daya alam—lebih kecil dari yang diusahakan anggota keluarga penerima PKH di Pacitan, mereka masih bisa tergabung dalam kelompok tani karena penguasaan dan luas lahan bukan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan keanggotaan poktan.

Relasi sosial juga memengaruhi cara pemasaran hasil pertanian/nelayan, yang sebagian besar menjual hasil pertaniannya ke pedagang pengumpul. Pada subsektor usaha perikanan tangkap di Indramayu, relasi sosial antara pedagang pengumpul dan nelayan sangat penting. Sebagai contoh, nelayan dapat berutang ke pedagang pengumpul untuk modal melaut serta meminjam untuk memenuhi kebutuhan saat paceklik ketika berlangsung musim baratan, dan sebagai imbalannya pedagang pengumpul mendapat kepastian pasokan ikan dari nelayan tersebut. Namun apabila nelayan tersebut belum menyelesaikan pinjamannya, tengkulak dapat menetapkan harga beli yang lebih rendah daripada harga pasar. Relasi sosial seperti inilah yang menggagalkan upaya pemerintah daerah membangun tempat pelelangan ikan (TPI), yang akan mempermudah akses pemasaran ikan di kecamatan studi. Sekalipun terdapat sarana pemasaran yang memungkinkan nelayan untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, nelayan tetap menjual ke tengkulak dengan harga jual yang lebih rendah tetapi bisa memperoleh jaminan modal dan pinjaman saat paceklik.

“Perlu adanya tempat pelelangan ikan (TPI) di desa sebelah yang menampung hasil tangkapan ikan. Situasinya adalah TPI sulit berkembang karena ada perlawanan dari tengkulak. Dahulu, tahun 2009, pernah ada upaya menghidupkan TPI namun hanya berjalan satu bulan karena dihalangi tengkulak yang menahan perahu para nelayan yang berutang kepada tengkulak.”

(Informan W, 39 tahun, laki-laki, pedagang produk perikanan, Indramayu, 19 Maret 2019).

Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Karakteristik Umum

Sekitar 16 persen responden dalam angkatan kerja memiliki UMKM. Lebih dari setengahnya (58 persen) adalah perempuan dan sebagian besar (85 persen) berada di kelompok usia 31-59 tahun (lihat Tabel 8). Namun komposisi gender berbagai kelompok umur berbeda-beda. Pada kelompok usia 41-59 tahun laki-laki lebih dominan, sedangkan pada usia yang lebih muda (31-40 tahun) perempuanlah yang lebih banyak. Kebanyakan pengusaha UMKM perempuan menjalankan usahanya untuk menambah penghasilan utama yang berasal dari suami mereka yang merupakan kepala keluarga.

¹⁵ Alasan lainnya dijelaskan pada Bab 3, yang meliputi lebih merasa cocok bekerja individual daripada bekerja dalam kelompok, menghindari risiko rawan konflik dalam kelompok, tidak mengetahui bagaimana cara tergabung dalam kepesertaan kelompok, dan lain-lain.

Tabel 8: Karakteristik Demografis Pemilik Usaha UMKM

Subsektor lapangan usaha	Kelompok Usia			Total (n=69)	Jenis Kelamin		Total (n=69)
	15-30 tahun	31-40 tahun	41-59 tahun		Perempuan	Laki-laki	
Pengolahan	1,4	2,9	5,8	10,1	2,9	7,2	10,1
Perdagangan dan Rumah Makan	13	23,2	43,5	79,7	49,3	30,4	79,7
Transportasi, konstruksi, Jasa (Jasa)	0	7,2	2,9	10,1	5,8	4,3	10,1
Total	14,5	33,3	52,2	100	58	42	100

Sumber: Diolah dari hasil survei 2019

Keterangan: Angka-angka dibulatkan ke atas sampai dengan satu desimal yang mengakibatkan perbedaan kecil

Tingkat pendidikan anggota keluarga sampel yang menjadi pengusaha UMKM berbeda-beda antar kelompok usia. Pengusaha UMKM usia dewasa (31-59 tahun) umumnya berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah. Sedangkan pengusaha UMKM usia muda (15-30 tahun) mayoritas berpendidikan SMP. Usia pengusaha UMKM yang termuda adalah 23 tahun.

Dari 20 persen responden yang merupakan pemilik usaha, lebih dari setengahnya adalah perempuan. Pemilik usaha dalam kisaran usia 15-30 umumnya memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kisaran usia 31-59.

Secara umum, jenis bisnis yang dijalankan oleh pemilik usaha dalam penelitian kami dapat dibagi menjadi tiga subsektor: (i) perdagangan dan restoran; (ii) transportasi, konstruksi dan jasa (subsektor layanan); dan (iii) pengolahan makanan dan non-makanan. Kegiatan usaha di subsektor perdagangan dan restoran meliputi perdagangan makanan dan minuman; menjual barang bekas, suku cadang mesin, garmen atau hewan; menjalankan kios atau warung menjual barang kebutuhan pokok; dan melakukan perdagangan online. Kegiatan bisnis di subsektor pengangkutan, konstruksi dan jasa meliputi servis elektronik; tukang parkir; penjahit; pengemudi ojek; dan layanan binatu. Sementara itu, bisnis di subsektor pengolahan dapat melibatkan kerajinan tangan dan penambangan (batu dan pasir).

Sebagian besar pengusaha UMKM yang menjadi sampel studi ini bergerak di subsektor perdagangan dan rumah makan (80 persen). Jenis usaha ini dianggap mudah dikerjakan karena bahan baku untuk membuat makanan maupun produk yang diperdagangkan mudah didapatkan. Selain itu, usaha perdagangan dan makanan dilakukan di rumah atau lokasi yang tidak jauh dari rumah, sehingga dapat dikerjakan sambil mengurus keluarga atau dikerjakan oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

Tidak banyak anggota keluarga sampel yang menjalankan usaha di subsektor lainnya, meskipun ada peluang. Pengusaha UMKM di subsektor pengolahan memiliki keterampilan dari pekerjaan sebelumnya dan dapat memperoleh bahan baku yang bisa diolah secara kreatif. Pengusaha UMKM yang memilih untuk menjalankan usaha di subsektor jasa pun memiliki alasan serupa, yaitu adanya peluang dan telah memiliki keterampilan khusus.

80 persen pemilik usaha menjalankan usaha perdagangan dan makanan karena fleksibilitas menjalankan usaha dari rumah. Ini memungkinkan perempuan untuk mengelola usaha sambil memenuhi tanggung jawab dalam mengurus keluarga.

Pengelolaan UMKM dan Sumberdaya Penghidupan

Secara keseluruhan, proses UMKM dapat diamati melalui alur produksi barang dan jasa pada umumnya, yaitu mulai dari input, produksi, pengemasan, hingga pemasaran, meskipun intensitas dalam tiap tahapan berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Tahapan yang lengkap mulai dari input hingga pemasaran dilalui pada usaha perdagangan dan rumah makan serta pengolahan. Sedangkan pada usaha jasa, umumnya hanya melalui tahapan input dan pemasaran.

Di sebagian besar bisnis, **input** utama adalah penguasaan keterampilan (modal manusia) dan ketersediaan bahan baku yang berkesinambungan (modal alam). Pada subsektor jasa, kesinambungan bahan baku bisa jadi kurang relevan karena keterampilan pelaku usaha secara intrinsik merupakan “bahan baku” utama. Meskipun tingkat pendidikan dan keterampilan mayoritas anggota keluarga sampel yang menjadi pengusaha UMKM relatif rendah, namun dalam hal akses terhadap bahan baku mereka tidak mengalami banyak kesulitan karena kebanyakan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar.

Tiga elemen penting dalam proses **produksi** adalah kemampuan untuk berproduksi secara berkelanjutan, menggunakan metode produksi (dan peralatan) yang memenuhi standar/permintaan, dan kepemilikan izin usaha agar produk dapat menjangkau pasar yang lebih besar. Dari ketiga hal tersebut, kendala terbesar yang kerap dihadapi anggota keluarga sampel yang menjadi pengusaha UMKM adalah teknik produksi (peralatan) dan izin usaha. Pada batas tertentu, mereka dapat memperoleh bahan baku yang kontinu dengan mudah, namun belum terpenuhinya teknik yang sesuai standar/permintaan—misalnya, standar higienis atau variasi produk yang lebih menarik— sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan keterampilan dan peralatan. Akibatnya, keripik singkong yang dihasilkan salah satu responden, misalnya, diproduksi dengan varian rasa yang terbatas.

Dalam hal ketersediaan peralatan, sebagian pengusaha UMKM sampel menyatakan kurangnya dukungan alat yang memadai. Pada subsektor jasa angkutan, misalnya, penyedia jasa ojek tidak selalu memiliki sepeda motor—sebagian menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari temannya. Berikut ini kutipan yang menggambarkan pentingnya peralatan bagi anggota keluarga penerima PKH yang menjadi pengusaha UMKM.

“Belum punya mesin penyerap minyak, tidak berani menjual keripik yang dikemas sudah lebih dari satu minggu. Takut apek, soalnya kan minyak enggak diperas pakai alat. Makanya saya jadi belum berani ngejual di tempat jauh.”

(Wawancara mendalam, keluarga penerima PKH tidak sukses, Bandung Barat, 16 Maret 2019).

“Selama ini alat menjahit dan alat sablon yang dipakai berkualitas rendah. Obrasan kurang rapi karena mesin berspesifikasi tiga benang. Sementara, standar pasaran saat ini adalah obrasan empat benang dengan mesin overdeck sehingga lebih rapi. Bahkan Makloon pun tidak berminat [menggunakan jasa informan] karena mesin yang tidak sesuai standar pasar.”

(Wawancara mendalam, keluarga penerima PKH tidak sukses, Bandung Barat, 17 Maret 2019)

Pada umumnya, anggota keluarga penerima bantuan PKH yang menjadi pengusaha pengolahan makanan belum memiliki izin usaha, seperti izin produk industri rumah tangga (PIRT). Padahal, izin semacam itu dibutuhkan agar produk yang dihasilkan dapat dipasarkan di pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern. Pengusaha UMKM sampel ini pun kebanyakan tidak mengetahui cara memperoleh izin tersebut. Dari 69 pengusaha UMKM, hanya lima yang memiliki izin usaha dan tiga di antaranya adalah pengusaha pengolahan makanan. Izin PIRT yang dimiliki sebagian kecil pengusaha ini diperoleh berkat bantuan program fasilitasi perizinan usaha, yang di antaranya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Bandung Barat melalui kecamatan, akan tetapi, informasi tentang program tersebut tidak disebarluaskan secara luas.

Di salah satu lokasi studi di Bandung Barat, fasilitasi perizinan usaha pernah diupayakan pemerintah desa namun belum direspons dengan tindak lanjut oleh pemda.

“Sementara itu, untuk membantu agar produk-produk yang dihasilkan dapat masuk ke pasaran formal, sudah ada fasilitasi perizinan dari desa yang diteruskan ke kecamatan meskipun tidak ada tindak lanjutnya.”

(Wawancara mendalam, tokoh masyarakat/PKK, Bandung Barat, 18 Maret 2019)

Selain belum memiliki izin usaha, sebagian besar pengusaha UMKM tersebut belum melakukan pembukuan untuk mengetahui keuntungan usahanya. Pembukuan memungkinkan pemilik usaha untuk mengevaluasi usaha yang dilakukan dan mengembangkan bisnis yang sesuai akan tetapi hanya 12 persen dari pengusaha tersebut yang melakukan pembukuan tertulis. Sekitar 32 persen dari mereka hanya membandingkan dengan kecukupan kebutuhan harian, sedangkan sebagian kecil lainnya (2 persen) hanya membandingkan hasil usahanya dengan usaha lain.

Terkait dengan pengemasan, tidak banyak pengusaha UMKM di subsektor perdagangan dan rumah makan serta subsektor pengolahan yang mampu menyajikan produknya dalam kemasan yang menarik dan dapat meningkatkan nilai tambah. Dalam studi ini, di Bandung Barat pernah dijalankan program peningkatan kemasan, yaitu melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan pelatihan serupa oleh Program PEKKA¹⁶. Inisiatif ini terhambat oleh penyebaran informasi dan jumlah pesertanya terbatas, serta para pengusaha tersebut tidak memiliki alat untuk mengemas produk olahannya secara modern.

Para pengusaha tersebut sering kali menghadapi kendala terbatasnya saluran pemasaran yang efektif. Tantangan yang dihadapi di daerah perkotaan, semi-perkotaan dan perdesaan berbeda-beda karena perbedaan kondisi infrastruktur perekonomian serta infrastruktur jalan dan transportasi. Selain itu, bagi anggota keluarga sampel pengusaha UMKM, potensi saluran pemasaran ke pasar modern/minimarket dan pemasaran daring belum tergarap dengan baik. Sebagian pasar modern/minimarket juga menerapkan sistem konsinyasi dengan mekanisme pembayaran secara tak langsung—pembayaran hasil penjualan produk dilakukan setiap periode tertentu (mingguan/bulanan) yang tidak cocok untuk industri kecil menengah yang mengutamakan perputaran modal usaha yang cepat (Pinti 2013). Sementara itu, pemasaran daring tak tergarap baik oleh anggota KPM PKH karena mereka belum mengetahui cara-cara bertransaksi secara daring dan produk yang dihasilkan anggota KPM PKH masih sederhana misalnya keripik, kue, atau hasil jahitan, yang tidak memiliki permintaan online yang tinggi.

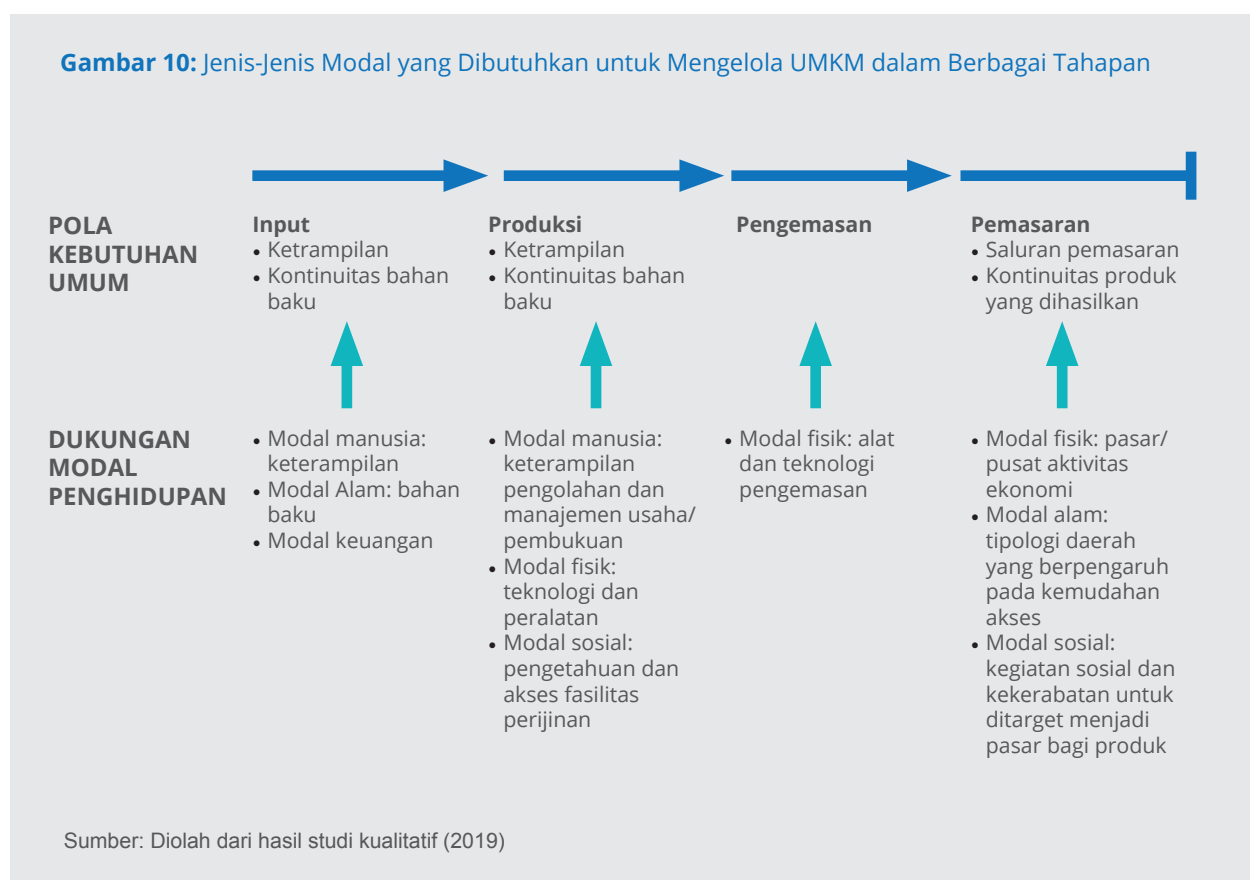
Terbatasnya alternatif saluran pemasaran, membuat sebagian besar pengusaha UMKM sampel (84 persen) memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen akhir, seperti di warung atau konter di rumah. Hanya 20 persen yang menjual langsung produknya di pasar, selain menjual di warung di rumah mereka. Di Bandung Barat, ada seorang anggota keluarga penerima PKH yang sengaja menjadi kader lingkungan/pengurus RW agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial sehingga bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memasarkan produk jahitan suaminya.

¹⁶ PEKKA = Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

"[Saya] menjadi kader RW agar lebih banyak mengenal warga. Tujuannya dua, [yaitu] untuk memperkenalkan diri karena termasuk warga pendatang [yang baru pindah pada 2007] di desa ini. Yang kedua, dimanfaatkan untuk membangun jaringan pasar dari baju-baju [jahitan] yang diproduksi."

(Wawancara mendalam, anggota keluarga penerima PKH tidak sukses, Bandung Barat, 17 Maret 2019)

Seperti yang ditunjukkan Gambar 10, UMKM membutuhkan berbagai sumber daya di setiap tahap siklus bisnis, yang dapat menciptakan hambatan bagi pengusaha miskin.



Sebagian besar pemilik usaha PKH memiliki keterbatasan alat produksi dan tidak dapat memenuhi persyaratan pembeli perantara. Hanya sedikit dari mereka memiliki izin usaha, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk menjual produknya ke pasar yang lebih luas. **Hanya 12 persen pemilik usaha PKH yang memiliki catatan pembukuan tertulis.**

Sumber Daya Manusia

Selain terbatasnya tingkat pendidikan anggota keluarga sampel yang menjadi pengusaha UMKM dalam penelitian kami, sangat sedikit yang pernah mengikuti pelatihan berkualitas tinggi dalam bidang usahanya masing-masing (Tabel 9). Agar usaha tersebut dapat bersaing, diperlukan keterampilan yang dapat mendorong kreativitas dalam pengembangan produk ataupun jasa. Di Indramayu, misalnya, bentuk usaha yang dijalankan umumnya berupa warung kebutuhan sehari-hari, padahal usaha sejenis pun banyak dibuka oleh warga lain sehingga persaingannya ketat.

“Usaha warung saya pernah agak besar saat saingan belum banyak dan barang dagangan [juga] lengkap.”
(Wawancara mendalam, keluarga penerima PKH tidak sukses, Indramayu, 18 Maret 2019)

Tabel 9: Kepesertaan Anggota Keluarga PKH pada Pelatihan Bersertifikat

Subsektor lapangan usaha	Pernah Mengikuti Pelatihan Bersertifikat (%)
Pengolahan	0
Perdagangan dan Rumah Makan	4,3
Transportasi, konstruksi, Jasa	1,4
Total	5,7

Sumber: Diolah dari hasil survei 2019.

Di subsektor jasa, terbatasnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka menjadi juru parkir, ojek, atau buruh cuci untuk rumah tangga. Mereka rentan digantikan oleh pelaku baru karena pekerjaannya tidak memerlukan keterampilan khusus. Sejumlah anggota keluarga sampel yang memiliki keterampilan khusus membuka usaha jasa menjahit, servis elektronik, dan bengkel las. Anggota keluarga sampel yang membuka usaha jasa menjahit di Bandung Barat mendapatkan keahlian dari pekerjaannya di masa lalu sebagai buruh pabrik konveksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja dengan keterampilan khusus mendukung pengembangan usaha individu di sektor jasa bagi anggota keluarga penerima PKH.

Banyak pula keterampilan pengusaha UMKM sampel di subsektor jasa yang diperoleh secara turun-temurun, baik dari keluarga maupun teman. Keterampilan yang diperoleh dengan cara ini bergantung pada kualitas modal sosial di masyarakat. Seorang pengusaha sampel di Indramayu yang baru saja membuka usaha las mengakui:

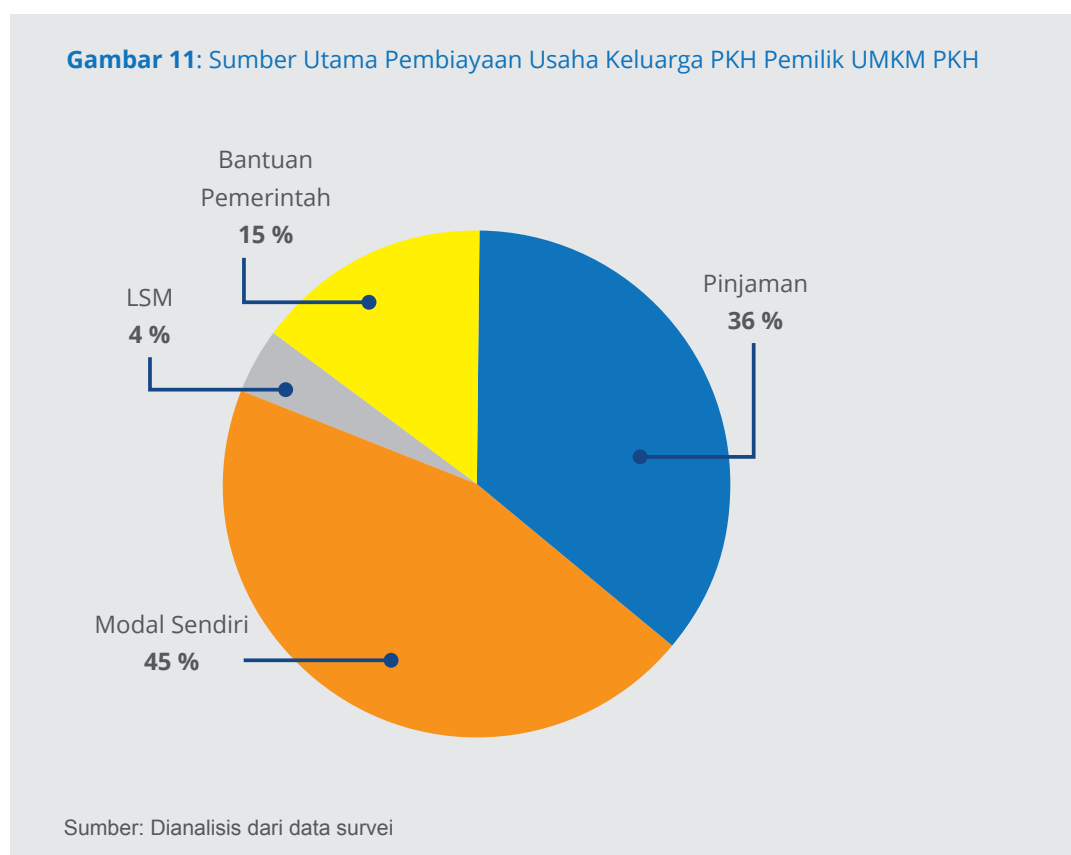
“[Saya] bisa las dari hasil memperhatikan teman yang [terlebih dahulu] bisa las.”
(Wawancara mendalam, Indramayu, 16 Maret 2019)

Sumber Daya Alam

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, anggota keluarga sampel yang menjadi pengusaha UMKM, khususnya di subsektor pengolahan, menggunakan bahan baku yang tersedia di sekitarnya, namun ketersediaannya sangat bergantung pada musim. Di Indramayu dan Pacitan, bahan baku yang digunakan berasal dari hasil pertanian/perikanan setempat. Di Indramayu, misalnya, usaha pengolahan hasil laut oleh pengusaha UMKM dapat terhenti saat musim ombak laut tinggi. Meskipun mereka tetap memperoleh bahan baku dari wilayah lain atau dari perikanan budi daya, namun harganya lebih tinggi.

Finansial

Dalam hal sumber modal usaha, 45 persen pemilik UMKM dalam penelitian ini mempergunakan dana mereka sendiri untuk membiayai modal awal usaha (Gambar 11), sementara sekitar 36 persen membiayai bisnisnya menggunakan pinjaman. Lima belas persen lainnya mendapat modal utama atau modal tambahan dari bantuan pemerintah dan 4 persen dari bantuan dari lembaga non-pemerintah. Dominannya sumber permodalan dari aset pribadi tersebut menjadi salah satu penghambat pengembangan usaha mereka.



Infrastruktur

Meskipun ketersediaan dan kondisi infrastruktur tidak terlalu memengaruhi akses untuk mendapatkan bahan baku, hal tersebut menimbulkan efek negatif pada saluran pemasaran pemilik UMKM dalam penelitian ini. Di Surakarta, pemilik UMKM penerima PKH dapat membeli bahan baku untuk membuat produk olahan makanan di pasar terdekat di mana bahan-bahan tersebut banyak tersedia di pasar yang lokasinya dekat dengan tempat usaha. Di Bandung Barat, pengusaha yang bergerak dalam bidang jahit-menjahit dan kerajinan aksesoris dapat membeli bahan baku dari pasar limbah tekstil yang telah menjadi pendukung utama bagi mereka.

Akan tetapi, sekitar 32 persen dari pengusaha UMKM mengalami kesulitan untuk memasarkan produk mereka karena tempat pemasaran yang terbatas. Tingkat kesulitan yang dihadapi di daerah perkotaan, semi-perkotaan, dan pedesaan berbeda-beda. Di perkotaan seperti Surakarta, tersedia lebih banyak alternatif pemasaran—di sekitar lingkungan perumahan, pinggir jalan, atau bahkan melalui online. Bahkan jasa pribadi seperti juru parkir, ojek, dan binatu lebih mudah ditawarkan pada konsumen lokal mengingat jumlah orang dan kedekatan dengan pasar.

Meskipun sebagian besar daerah di Bandung Barat biasanya semi-perkotaan, jarak dari pusat-pusat ekonomi berdampak negatif bagi pemilik bisnis yang tidak tinggal dekat dengan pusat-pusat ini. Penduduk desa dalam penelitian kami, misalnya, harus menyeberangi waduk atau memutar sejauh lebih dari 10 kilometer untuk mencapai kantor desa atau pasar kecamatan. Di Pacitan, pemasaran sangat sulit karena jauhnya jarak dengan pusat aktivitas perekonomian dan kurangnya kegiatan ekonomi secara umum.

Modal Sosial

Secara umum, pemilik usaha dalam penelitian kami memiliki modal sosial horisontal yang memadai dengan sesama pengusaha dan tetangga, namun tidak memiliki hubungan sosial vertikal dengan orang-orang yang berpengaruh. Sekitar 86% dari mereka terlibat dalam kegiatan sosial di desa atau lingkungan tempat tinggal mereka dan beberapa pemilik mengakui bahwa partisipasi mereka dalam kegiatan sosial adalah untuk tujuan bisnis, seperti untuk mendapatkan modal, bahan baku, dan pemasaran. Seorang penerima bantuan PKH tingkat desa di Kabupaten Bandung Barat mengakui bahwa keaktifannya sebagai kader RW memang secara sadar ditujukan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk jahitannya pada pertemuan warga maupun lingkungan desa secara umum. Di Kota Surakarta, ada beberapa penerima bantuan PKH yang menggunakan tempat milik tetangganya untuk membuka warung makanan (di lokasi setempat dikenal dengan istilah “HIK”). Selain itu, di lokasi yang sama, seorang penerima manfaat PKH yang mengerjakan usaha pembuatan sangkar burung juga membekali anggota lainnya dengan modal pengetahuan. Akan tetapi, hubungan sosial vertikal dengan orang-orang yang berpengaruh (mis. pedagang, pengusaha, pemberi pinjaman, dll.) tidak ada, sehingga, meskipun hubungan horizontal bermanfaat, hubungan sosial yang ada tidak dapat direalisasikan menjadi akses atau peluang yang lebih menguntungkan.

Pemilik usaha PKH umumnya memiliki jaringan sosial yang memadai dengan rekan-rekan mereka, tetapi tidak memiliki hubungan sosial vertikal dengan orang-orang yang berpengaruh seperti pedagang besar, pengusaha, pemberi pinjaman. Meskipun jejaring sebaya bermanfaat, tetapi jarang diterjemahkan menjadi peluang penghasilan yang lebih menguntungkan bagi pemilik usaha PKH.

Pekerja/Karyawan Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa

Karakteristik Umum

Banyak anggota keluarga PKH dalam penelitian ini yang bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa (38 persen). Jumlah laki-laki mencapai 69 persen dari pekerja ini. Distribusi kelompok umur cukup merata (sekitar 30% di setiap kelompok umur) (**Tabel 10**). Fenomena ini berbeda dengan komposisi buruh tani dan pengusaha UMKM yang didominasi oleh perempuan. Perbedaan ini kemungkinan terkait dengan kecenderungan perempuan yang harus mengurus keluarga. Di antara pekerja perempuan, sekitar 23 persen harus mengurus rumah tangga, sedangkan di antara pekerja laki-laki, hanya 4 persen yang juga mengurus rumah tangga.

Anggota keluarga dalam penelitian ini yang menjadi pekerja cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pengusaha pertanian, buruh tani, dan pengusaha UMKM. Akan tetapi, proporsi terbesar dari para pekerja tersebut hanya berpendidikan SD ke bawah (38 persen), diikuti SMP (35 persen), SMA (25 persen), dan perguruan tinggi (1 persen). Namun terlihat perbedaan yang signifikan antarkelompok usia. Pada kelompok usia 41-59 tahun, paling banyak berpendidikan terakhir SD ke bawah, sementara pada kelompok usia 15-30 tahun mayoritas berpendidikan SMP dan SMA (**Tabel 10**). Sebagaimana dibahas sebelumnya, hal tersebut mencerminkan peluang yang lebih besar bagi generasi yang lebih muda untuk mendapatkan pendidikan.

Tabel 10: Persentase Anggota Keluarga Sampel yang Bekerja di Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa Menurut Kelompok Usia dan Tingkat Pendidikan Tertinggi (%)

Kelompok Usia	Pendidikan Tertinggi (%)				Total (n=142)
	SD dan lebih rendah (n=54)	SMP (n=50)	SMA (n=36)	Universitas (n=2)	
15-30 tahun	2,8	11,3	14,1	1,4	29,6
31-40 tahun	13,4	14,8	5,6	0	33,8
41-59 tahun	21,8	9,2	5,6	0	36,6
Total	38	35,3	25,3	1,4	100

Sumber: Diolah dari hasil survei 2019.

Karyawan dalam lingkup studi ini bekerja di instansi pemerintah atau LSM; perusahaan, usaha perseorangan,¹⁷ dan rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga). Sebagian besar responden bekerja pada usaha pribadi (58 persen), diikuti bekerja di perusahaan (28 persen), rumah tangga (10 persen), dan instansi pemerintah atau lembaga nonpemerintah (5 persen) (**Tabel 11**).

Terdapat lebih banyak perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki, meskipun ini adalah jenis pekerjaan yang paling tidak populer kedua bahkan untuk perempuan (Tabel 11). Baik pria maupun wanita bekerja terutama sebagai karyawan dalam bisnis pribadi, tetapi perbedaan

¹⁷ Badan usaha pribadi adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan. Sebagian besar responden PKH merupakan karyawan pada "usaha pribadi".

di antara mereka sangat mencolok (masing-masing 44 persen dan 13 persen) yang mungkin disebabkan oleh norma gender yang terkait dengan jenis pekerjaan tertentu (pekerjaan rumah tangga dianggap lebih sesuai untuk perempuan).

Pengusaha sektor formal jarang menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel. Perempuan seringkali harus menyeimbangkan pengurusan keluarga dengan pekerjaan, dan hal ini berkontribusi pada **fakta bahwa hanya 30 persen perempuan yang terlibat sebagai karyawan dengan upah.**

Tabel 11: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa berdasarkan Tempat Kerja, Kelompok Usia dan Jenis Kelamin (%)

Jenis tempat kerja	Kelompok Usia			Total (n=142)	Jenis Kelamin		Total (n=142)
	15-30 Tahun (n=42)	31-40 Tahun (n=48)	41-59 Tahun (n=52)		Perempuan (n=44)	Laki-laki (n=98)	
Pemerintah/ lembaga non profit	2,1	0,7	2,1	4,9	1,4	3,5	4,9
Perusahaan	12	9,2	6,3	27,5	10,6	16,9	27,5
Usaha perorangan	14,1	21,1	22,5	57,7	13,4	44,4	57,7
Rumah tangga	1,4	2,8	5,6	9,9	5,6	4,2	9,9
Total	29,6	33,8	36,6	100	31	69	100

Sumber: Diolah dari hasil survei 2019.

Pekerja di usaha pribadi dan rumah tangga cenderung berpendidikan tingkat SD ke bawah, sedangkan mereka yang bekerja di pemerintah atau perusahaan biasanya lulusan SMP atau SMA (Tabel 12). Hal ini mencerminkan adanya prasyarat khusus tingkat pendidikan minimal, serta perbedaan peluang yang cukup besar antar tingkat pendidikan, sebagaimana yang akan dibahas lebih jauh pada bagian selanjutnya.

Tabel 12: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa Berdasarkan Tempat Kerja dan Tingkat Pendidikan Tertinggi (%)

Jenis tempat kerja	Pendidikan Tertinggi (%)				Total (n=142)
	SD ke Bawah (n=54)	SMP (n=50)	SMA (n=36)	Perguruan Tinggi (n=2)	
Pemerintah/ lembaga non profit	0	0,7	4,2	0	4,9
Perusahaan	6,3	7,7	12	1,4	27,5
Usaha perorangan	26,1	22,5	9,2	0	57,7
Rumah tangga	5,6	4,2	0	0	9,9
Total	38	35,2	25,4	1,4	100

Sumber: Diolah dari hasil survei 2019.

Catatan: Total kurang sedikit dari 100% karena pembulatan.

Kondisi Pekerja dan Kaitannya dengan Modal Penghidupan

Anggota keluarga PKH dalam penelitian ini umumnya menghadapi tiga hambatan utama dalam mengakses pekerjaan: (i) minimnya akses terhadap informasi peluang kerja; (ii) terbatasnya lapangan pekerjaan non-pertanian di lokasi tertentu, dan (iii) beban mengurus keluarga/rumah tangga. Di Surakarta dan Bandung Barat, informasi lowongan kerja tidak tersedia secara merata sehingga lebih banyak didapat dari jaringan sosial yang bersifat informal. Sedangkan di Indramayu dan Pacitan, selain minimnya informasi, lapangan pekerjaan non-pertanian juga sangat terbatas sehingga anggota keluarga sampel banyak yang mencari pekerjaan di luar daerah—yang membutuhkan biaya pencarian kerja yang lebih mahal.

Sebagian anggota keluarga sampel juga menghadapi kendala terkait dengan jam kerja dan jarak ke lokasi kerja yang jauh karena harus mengurus keluarga dan rumah tangga. Di Pacitan, sebagian anggota keluarga sampel enggan meninggalkan keluarga, terutama jika ada lansia atau anak di keluarga mereka yang tidak bisa ditinggalkan. Fenomena ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun beban perempuan cenderung lebih berat. Dalam kondisi seperti ini, anggota keluarga sampel memilih untuk bekerja serabutan. Menjadi pekerja serabutan menjadi pola umum di daerah yang pekerjaannya dipengaruhi musim, seperti menjadi kuli bangunan atau kuli angkut yang dikerjakan sebagian anggota keluarga sampel di Pacitan ketika musim kemarau.

Bagi yang berhasil mendapatkan pekerjaan pun masih rentan karena tidak memiliki kontrak kerja, baik secara tertulis atau bahkan lisan (69 persen) (Tabel 13). Sebagian besar pekerja yang tidak memiliki kontrak tersebut bekerja di usaha perseorangan (50 persen). Dari berbagai wawancara mendalam juga terungkap bahwa umumnya anggota keluarga sampel yang menjadi pekerja terus-menerus berstatus pekerja kontrak. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memperoleh pekerjaan tetap (yang terutama terjadi di organisasi-organisasi “formal” seperti perusahaan, instansi pemerintahan atau LSM) dan pekerjaan tersebut tidak banyak yang tersedia.

Tabel 13: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa dengan Kontrak dan Tanpa Kontrak Berdasarkan Tempat Kerja (%)

Jenis tempat kerja	Memiliki kontrak kerja		
	Ya (n=44)	Tidak (n=98)	Total (n=142)
Pemerintah/ lembaga non profit	3,5	1,4	5
Perusahaan	19,1	8,5	27,7
Usaha perorangan	7,8	49,6	57,4
Rumah tangga	0,7	9,2	9,9
Total	31,2	68,8	100

Sumber: Diolah dari hasil survei 2019.

Catatan: Total kurang sedikit dari jumlah keseluruhan sebenarnya karena pembulatan

Upaya untuk mendapatkan pekerjaan di sektor industri, perdagangan, dan jasa dapat dianalisis dari aspek kemampuan kerja (*employability*) dan aksesibilitas (*accessibility*). Kemampuan kerja merujuk pada hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi pekerja, sedangkan aksesibilitas merujuk pada faktor-faktor yang memengaruhi proses dalam mengakses pekerjaan tersebut, setelah memiliki kemampuan kerja tertentu. Sebagai contoh, untuk bisa bekerja di perusahaan di luar kota, mereka memerlukan tingkat pendidikan tertentu (bagian dari faktor kemampuan kerja) dan mereka harus memiliki uang untuk mengikuti proses rekrutmen di kota tersebut (faktor aksesibilitas).

Pendidikan dan keterampilan merupakan modal penghidupan utama yang dibutuhkan dalam hal kemampuan kerja, sementara itu untuk mengakses pekerjaan dipengaruhi oleh modal sosial dan modal finansial. Berbagai komponen modal penghidupan tersebut dibahas pada bagian berikut.

69 persen pekerja dengan upah dalam keluarga PKH di sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa tidak memiliki kontrak tertulis atau lisan.

Sumber Daya Manusia

Terkait dengan tingkat pendidikan, anggota keluarga dalam penelitian ini yang bekerja sebagai pekerja kebanyakan berpendidikan SMP ke bawah, akan tetapi pekerja yang berusia muda cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sekitar 14 persen dari seluruh anggota keluarga sampel yang menjadi pekerja berusia 15-30 tahun dan berpendidikan terakhir SMA/ sederajat (**Tabel 10**). Sebagian anggota keluarga sampel berusia muda yang tidak menempuh pendidikan hingga SMA atau tidak tamat SMA, biasanya tidak melanjutkan sekolah karena adanya dorongan untuk segera berkontribusi pada ekonomi keluarga dan mereka cenderung memilih pekerjaan yang tidak mensyaratkan tingkat pendidikan khusus, seperti buruh angkut, buruh bengkel motor, dan buruh bangunan.

Menariknya, mayoritas anggota keluarga sampel yang menjadi pekerja tidak pernah mengikuti pelatihan keterampilan tersertifikasi (89 persen). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya informasi mengenai pelatihan ataupun tidak adanya dana. Sekitar 75 persen dari mereka tidak mengetahui keberadaan lokasi pelatihan (**Tabel 14**). Sedangkan mereka yang sudah tahu terkendala oleh jauhnya jarak ke tempat pelatihan, sementara mereka tidak memiliki uang yang cukup selama tidak bekerja ketika mengikuti pelatihan, atau untuk biaya transportasi dan kebutuhan terkait lainnya. Karena itu, mereka sulit mengikuti pelatihan meskipun pelatihan tersebut gratis. Di Bandung Barat, salah satu pekerja sampel menuturkan keinginan untuk mengikuti pelatihan asalkan tidak ada biaya transportasi, akomodasi, dan ongkos lain yang perlu dikeluarkan. Minimnya informasi mengenai kepastian manfaat dari pelatihan dalam memperoleh pekerjaan membuat mereka enggan mengeluarkan dana apa pun meskipun pelatihan tersebut gratis.

Tabel 14: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa yang Mengetahui Lokasi Pelatihan Dilaksanakan Berdasarkan Tempat Kerja (%)

Jenis tempat bekerja	Tidak Mengetahui (n=107)	Mengetahui (n=35)	Total (n=142)
Pemerintah/ lembaga non profit	4,2	0,7	4,9
Perusahaan	14,8	12,7	27,5
Usaha perorangan	47,2	10,6	57,7
Rumah tangga	9,2	0,7	9,9
Total	75,4	24,6	100

Sumber: Diolah dari hasil survei (2019)

Dengan demikian, para responden setidaknya menghadapi tiga hambatan utama terkait dengan kemampuan kerja, yaitu: (i) kualifikasi pendidikan; (ii) keterbatasan keterampilan, dan (iii) keterbatasan akses ke program pelatihan kerja. Tingkat pendidikan merupakan hambatan utama untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan dan pemerintahan karena umumnya mensyaratkan tingkat pendidikan minimal SMA/ sederajat. Namun demikian, ini adalah pekerjaan yang banyak diinginkan oleh para responden.

Patut dicatat bahwa responden anggota keluarga sampel dengan kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat pun tidak secara otomatis memiliki kesempatan kerja yang lebih baik karena tingkat pendidikan mereka. Hal ini dipengaruhi oleh adanya prasyarat keterampilan (*skillset*) khusus yang belum dikuasai atau yang perlu dibuktikan dengan sertifikasi khusus.

73 persen pekerja dengan upah dalam keluarga PKH telah menyelesaikan pendidikan SMP atau di bawahnya, sementara **89 persen tidak pernah memiliki pelatihan bersertifikasi atau kejuruan, sehingga membatasi kesempatan kerja mereka.**

Finansial

Beberapa responden mengalami kesulitan keuangan ketika berupaya untuk mengakses pekerjaan di luar daerah. Hal ini terutama ditemukan di daerah yang tidak banyak memiliki peluang bekerja di perusahaan, seperti di Pacitan dan Indramayu. Setiap orang yang ingin bekerja di perusahaan harus ke luar daerah, seperti ke Surabaya untuk yang berasal dari Pacitan dan ke Karawang untuk yang berasal dari Indramayu. Biaya yang diperlukan dalam proses pencarian pekerjaan, seperti untuk ikut serta dalam proses rekrutmen, mengakibatkan terbatasnya jumlah responden yang dapat mengikuti proses tersebut.

Di sisi lain, akses untuk mendapatkan modal sangat terbatas. Meskipun 93 persen dari responden yang menjadi pekerja mengetahui keberadaan penyedia pinjaman, hanya 26 persen yang telah mengambil pinjaman. Sebagian besar pinjaman ini (69 persen) berasal dari lembaga keuangan informal dengan persyaratan

yang tidak terlalu memberatkan. Dalam beberapa kasus, responden meminjam dari lembaga ‘non-bank’ formal¹⁸ yang menawarkan pinjaman tanpa agunan yang mampu menjangkau pasar bawah untuk peminjam miskin lebih efektif daripada lembaga keuangan formal. Dalam kasus lainnya, responden meminjam dari lintah darat (“bank plecit”, “bank emok”), yang lebih mencekik leher.¹⁹

Sebagian besar responden PKH tidak mampu melakukan perjalanan ke pusat-pusat ekonomi untuk mencari pekerjaan.

Infrastruktur

Jarak dari tempat tinggal ke aktivitas ekonomi atau penunjang aktivitas ekonomi menjadi faktor penentu aksesibilitas. Responden yang menjadi pekerja di rumah tangga cenderung tinggal jauh dari pusat kota, lembaga keuangan formal, dan ke pasar—lebih jauh daripada pekerja di ketiga jenis tempat kerja lainnya (**Tabel 15**). Sebaliknya, responden yang bekerja di perusahaan dan pemerintahan/lembaga nirlaba cenderung rata-rata tinggal lebih dekat dengan pusat kota, lembaga keuangan formal, dan pasar. Meskipun, kemungkinan fenomena ini dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik desa studi (di Pacitan, desa studi cenderung jauh dari pusat kota). Hal ini mengindikasikan bahwa jarak yang lebih dekat ke pusat aktivitas ekonomi akan meningkatkan peluang dan akses terhadap peluang kerja.

Tabel 15: Jarak Rata-rata dari Rumah ke Aktivitas Ekonomi : Responden yang Menjadi Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa (Berdasarkan Jenis Tempat Kerja)

Jenis tempat bekerja	Rata-rata Jarak dari Rumah (dalam Kilometer)		
	Ke pusat kota	Ke lembaga keuangan terdekat	Ke pasar terdekat
Pemerintah/lembaga non profit	5,8	5,3	3,5
Perusahaan	9	2,8	2,8
Usaha perorangan	11,3	3,8	3,1
Rumah Tangga	16,8	9,5	9,4
Rata-rata	11	4,2	3,6

Sumber: Diolah dari hasil survei (2019)

¹⁸ Di Indramayu dan Bandung Barat, ada lembaga formal non-bank yang memberikan pinjaman tanpa agunan, seperti unit pelaksana kegiatan berbasis desa (UPK) yang mengelola dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri yang sekarang sudah tidak berfungsi. (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan).

¹⁹ “Bank plecit” atau “bank emok” merupakan istilah lokal untuk rentenir.

Modal Sosial

Modal sosial merupakan faktor yang sangat menentukan akses untuk mendapatkan pekerjaan. Terbatasnya akses terhadap informasi peluang kerja merupakan hambatan yang ditemukan di semua daerah studi. Bahkan di lokasi yang memiliki lebih banyak peluang kerja, seperti di Bandung Barat dan Surakarta, dibutuhkan koneksi pribadi untuk mendapatkan informasi peluang kerja. Di Indramayu dan Pacitan, selain minimnya informasi, peluang kerja yang tersedia juga sangat terbatas dan karenanya orang memerlukan informasi tentang peluang kerja di daerah lain.

Karena minimnya kualifikasi yang dimiliki anggota keluarga PKH, mereka cenderung lebih bisa mengandalkan hubungan informal, seperti koneksi personal, dalam mencari hingga mendapatkan pekerjaan tersebut. Dari semua anggota keluarga sampel yang menjadi pekerja, sebanyak 89 persen di antaranya memperoleh pekerjaan melalui kenalan/koneksi personal, 7 persen yang mendaftar langsung ke pemberi kerja, 3,5 persen melalui bursa kerja, dan 0,7 persen lainnya melalui agen penyalur tenaga kerja (**Tabel 16**).

Sebagian besar anggota keluarga yang telah bekerja memiliki koneksi dengan pemberi kerja (63 persen). Di Pacitan, misalnya, untuk mendapat pekerjaan sebagai buruh bangunan atau pembantu rumah tangga di luar kota, responden mengandalkan tetangga yang sudah memiliki pengalaman bekerja di luar kota atau dapat menghubungkan ke pekerjaan tersebut. Di Bandung Barat, salah satu responden yang diwawancarai menjadi mandor karena menggantikan saudaranya yang sebelumnya bekerja sebagai mandor, meskipun tidak memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan yang dibutuhkan.

Tabel 16: Persentase Pekerja di Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Proses Pencarian Kerja

Jenis tempat bekerja	Cara memperoleh pekerjaan				Total (n=142)
	Bursa Kerja (n=5)	Agen Penyalur Tenaga Kerja (n=1)	Mendaftar Langsung ke Pemberi Kerja (n=10)	Melalui Jaringan Sosial (n=126)	
Pemerintah/ lembaga non profit	0,7	0,7	0,7	2,8	4,9
Perusahaan	1,4	0	3,5	22,6	27,5
Usaha perorangan	1,4	0	2,1	54,2	57,7
Rumah tangga	0	0	0,7	9,2	9,9
Total	3,5	0,7	7	88,8	100

Sumber: Diolah dari hasil survei (2019)

Sebaliknya, ketergantungan pada kontak tersebut membuat responden yang tidak memiliki koneksi personal berada pada posisi tawar yang lemah dalam mengakses pekerjaan. Akhirnya, sogokan kepada “orang dalam” ditempuh sebagai pilihan, sehingga menciptakan hubungan informal antara pihak yang dapat menyediakan pekerjaan dan pihak yang membutuhkan pekerjaan melalui transaksi materialistis.

Proses ini menjadi lebih rumit ketika ada praktik percaloan dalam mengakses pekerjaan. Praktik ini ditemukan, terutama, untuk pekerjaan di pabrik atau industri skala besar (perusahaan) di Bandung Barat. Selain “orang dalam” sebagai koneksi, ada juga “orang dalam” pabrik yang dapat disogok untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik tersebut. Besaran sogokan tersebut bisa mencapai Rp2 juta. Hal ini dianggap sebagai cara alternatif untuk bisa mengakses pekerjaan di pabrik, terutama jika tidak memiliki koneksi personal ataupun kualifikasi yang dibutuhkan.

“Di sini umur 15 tahun banyak yang udah nikah. Padahal ini udah zaman begini. Ya mau gimana lagi, kerja juga enggak dapet, susah banget. Mau masuk pabrik kalau enggak nyogok atau [enggak] ada orang dalem ya enggak bisa, padahal, ya, ijazahnya SMA.”

(SD, anggota keluarga penerima PKH, Bandung Barat, 17 Maret 2019)

Komponen modal sosial yang menjadi mengemuka adalah jejaring dan keterhubungan (*network and connectedness*), baik hubungan vertikal (dengan pemberi kerja) maupun hubungan horizontal (dengan sesama pekerja). Koneksi sosial anggota keluarga sampel didukung dengan partisipasi kelompok ini yang menjadi pekerja dalam kegiatan sosial (78 persen). Hal ini senada dengan argumen Granovetter (1973) bahwa keterhubungan itu sendiri menjadi poin penting—walaupun tanpa komponen kedekatan secara personal—bagi seseorang dapat menerima informasi yang beragam, seperti peluang pekerjaan. Karena itu, peran modal sosial yang begitu penting dalam mengakses pekerjaan selama ini merupakan penanda bahwa modal sosial telah berfungsi substitutif atas keterbatasan modal manusia atau keuangan.

89 persen pekerja dengan upah dari keluarga PKH memperoleh pekerjaan melalui koneksi personal, calo, atau perantara/makelar.

2.3 Profil Anggota Keluarga Penerima PKH yang Tidak Bekerja

Bagian ini membahas situasi dari 164 anggota keluarga PKH dalam penelitian ini yang berusia kerja (15-59 tahun) tetapi menganggur atau bukan bagian dari angkatan kerja. Dari 539 responden yang berusia kerja, 3 persen adalah pengangguran terbuka (sedang mencari pekerjaan) dan 28 persen berada di luar angkatan kerja (tidak mencari pekerjaan).²⁰ Angka tersebut sedikit lebih rendah daripada angka nasional, yaitu 4 persen pengangguran dan 32 persen bukan angkatan kerja (Susenas 2018). Karena kedua kelompok ini berpotensi menjadi tenaga kerja dan berkontribusi aktif bagi perekonomian di masa mendatang, atau ketika terjadi guncangan ekonomi, karakteristik dan modal penghidupan keduanya penting juga untuk dianalisis²¹.

Profil Pengangguran

Dari semua anggota keluarga dalam penelitian ini, hanya 15 orang yang menganggur—dalam arti saat dilaksanakannya survei mereka tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan (Tabel 17). Karakteristiknya adalah laki-laki, berusia antara 15-23 tahun, berpendidikan SMP, belum kawin, dan bukan penyandang disabilitas. Pada umumnya pengangguran tersebut adalah anak muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan formal. Mereka memilih menganggur atau bekerja serabutan untuk sementara waktu sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang diminati.

Banyak lulusan sekolah melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu sambil menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang menarik minat mereka. Sejalan dengan temuan ini, dalam survei terdapat satu orang anggota keluarga dalam penelitian ini perempuan lulusan diploma III (D3) di Surakarta yang menganggur selama hampir enam bulan dan sedang mencari pekerjaan dengan menanggapi iklan lowongan pekerjaan, serta mencari informasi dari teman. Ada juga dua orang anggota keluarga dalam penelitian ini yang memanfaatkan bursa kerja. Salah satunya perempuan berusia 18 tahun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bandung Barat yang mengakses bursa kerja yang disediakan oleh pemerintah, swasta, dan kampus. Seorang lainnya laki-laki berusia 16 tahun lulusan SMP di Pacitan juga mengakses bursa kerja online.

Tabel 17: Karakteristik Demografis Anggota Keluarga Sampel yang Tidak Bekerja

Kategori		Kegiatan seminggu yang lalu			
		Menganggur	Bersekolah	Mengurus rumah tangga	Kegiatan lainnya
Jenis kelamin (%)	Perempuan	26,7	52,1	94	27,3
	Laki-laki	73,3	47,9	6	72,7
Kelompok umur (%)	15-18	46,7	95,8	10,4	18,2
	19-23	26,7	4,2	13,4	18,2
	24-30	13,3	0	11,9	18,2
	31-59	13,3	0	64,2	45,5

Sumber: Diolah dari data survei 2019.

²⁰ Anggota keluarga penerima manfaat yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15-49 tahun dan tidak mencari kerja/bekerja/membantu aktivitas untuk memperoleh penghasilan.

²¹ Kusumawardhani et al., 2016: 63

Kategori		Kegiatan seminggu yang lalu			
		Menganggur	Bersekolah	Mengurus rumah tangga	Kegiatan lainnya
Kelompok pendidikan (15th+) (%)	SD ke bawah	6,7	23,9	67,2	72,7
	SMP	66,7	74,6	25,4	27,3
	SMA	20	1,4	7,5	0
	Perguruan tinggi	6,7	0	0	0
Status perkawinan (%)	Belum kawin	93,3	100	9	54,5
	Kawin	6,7	0	88,1	36,4
	Cerai	0	0	3	9,1
Disabilitas (%)	Ya	0	2,8	7,5	72,7
Sampel (n)		15	71	67	11

Catatan: Total sedikit kurang dari 100% karena efek pembulatan

Umumnya anggota keluarga dalam penelitian ini berusia muda dengan pendidikan formal yang lebih tinggi dan cenderung lebih selektif dalam mencari pekerjaan. Sementara, peluang kerja yang tersedia kurang atau tidak mereka minati karena berbagai alasan, seperti:

- Lokasi kerja dianggap jauh dari tempat tinggal,
- Lokasi kerja terpencil,
- Tidak memiliki kendaraan pribadi untuk digunakan ke tempat kerja,
- Jenis pekerjaan dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pekerja,
- Memerlukan kerja fisik yang berat tetapi besaran upahnya dinilai tidak seimbang, dan
- Waktu kerja yang tidak fleksibel.

Singkatnya, mereka cenderung memilih tidak bekerja daripada melakukan pekerjaan yang tidak diminati.

Salah seorang peserta menyatakan, ingin bekerja di perusahaan yang berada di kota tempat tinggalnya dengan upah di atas upah minimum kota/kabupaten (UMK), sedangkan lowongan kerja yang tersedia di kota tersebut memberikan upah sesuai UMK. Lowongan kerja dengan upah yang lebih tinggi tersedia di kabupaten tetangga yang bisa ditempuh sekitar 30 menit menggunakan sepeda motor, tetapi ia memilih menganggur sambil terus menunggu pekerjaan yang sesuai minatnya.

Sesungguhnya anggota keluarga dalam penelitian ini yang menganggur tersebut mempunyai kualifikasi yang cukup untuk mengisi lowongan kerja formal, seperti di perusahaan atau industri skala besar.

Pekerjaan di sektor formal tersebut sering kali mensyaratkan batasan usia minimal dan maksimal karena mempertimbangkan kekuatan fisik untuk bekerja, dan memiliki preferensi jenis kelamin pekerja, yaitu perempuan, karena dianggap lebih disiplin dan lebih mampu melakukan pekerjaan yang monoton daripada laki-laki. Preferensi lainnya adalah belum menikah atau belum memiliki anak karena biasanya pemberi kerja tidak memberikan izin absen bekerja untuk keperluan keluarga, menyoroti bahwa ini adalah masalah gender yang lebih berdampak pada perempuan daripada laki-laki. Dengan adanya kualifikasi dan preferensi tersebut, pekerjaan di pabrik di Bandung Barat lebih banyak diakses perempuan muda. Namun hasil FGD di Surakarta menemukan bahwa sebagian besar perempuan muda peserta FGD mengaku kurang berminat bekerja di pabrik, meskipun mereka memenuhi kualifikasi dan preferensi yang disyaratkan pabrik. Selain persoalan upah dan waktu kerja, persoalan senioritas sering kali menjadi pertimbangan yang membuat mereka lebih memilih mencari kerja di tempat lain atau menganggur hingga mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Sebaliknya, anggota keluarga dalam penelitian ini yang usianya lebih tua hanya berpendidikan formal hingga SD dengan penguasaan keterampilan yang terbatas tidak dapat mengakses pekerjaan di sektor formal.

Mereka yang berada dalam kelompok usia 15-30 dapat dipekerjakan tetapi mencari peluang yang tepat, menggambarkan bahwa tingkat pendidikan tinggi memiliki aspirasi profesional yang lebih tinggi.

Bukan Bagian dari Angkatan Kerja

Dari mereka yang bukan angkatan kerja dalam sampel survei, sebanyak 13 persen masih bersekolah, 12 persen mengurus rumah tangga, dan 2 persen tidak bekerja karena 'alasan lain'.

Di antara yang masih bersekolah, angka partisipasi murni (APM)²² dan angka partisipasi kasar (APK)²³ untuk jenjang SD sangat tinggi, sebagian karena pemerintah sudah memberlakukan pendidikan gratis untuk seluruh SD negeri (Tabel 18). Adapun APM SMA mencapai 56 persen dengan APK 81 persen. Sedangkan APM perguruan tinggi hanya 4 persen dengan APK 6 persen. Rendahnya APM SMA dan perguruan tinggi kemungkinan karena anggota keluarga sampel tersebut sudah memasuki usia angkatan kerja, yaitu dalam kisaran umur 15 tahun ke atas, sehingga mereka memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan.

²²Angka partisipasi murni (APM) untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. (sumber: sirusa.bps.go.id).

$$\text{Contoh perhitungan APM SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD sederajat usia 7 - 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

²³ Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah dengan jenjang pendidikannya. Angka APK yang melebihi 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya.

$$\text{Contoh perhitungan APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$$

Tabel 18 : Angka Partisipasi Murni dan Kasar Sampel Survei (%)

Kategori		Wilayah				Total
		Indramayu	Bandung Barat	Surakarta	Pacitan	%
SD ke bawah (7-12 tahun)	APM	86,6	97,1	91,4	92,3	92,1
	APK	103,3	108,6	94,3	94,9	100
SMP/ sederajat (13-15 tahun)	APM	55,5	75	65	84,6	67,5
	APK	70,4	85	95	92,3	83,8
SMA/ sederajat (16-18 tahun)	APM	61,9	54,2	58,8	47,2	55,7
	APK	100	66,7	94,1	64,7	81
Perguruan Tinggi (19-24 tahun)	APM	0	0	18,8	0	4,2
	APK	0	0	25	0	5,6

Sumber: Diolah dari data survei 2019.

Keterangan: APM = Angka Partisipasi Murni , APK = Angka Partisipasi Kasar

Mayoritas anggota keluarga dalam penelitian ini yang mengurus rumah tangga adalah perempuan dan berstatus kawin dengan rincian 75 persen berpendidikan SMP/ sederajat dan 64 persen berusia antara 31-59 tahun.

Dari 63 perempuan yang mengurus rumah tangga, 49 orang di antaranya beralasan tidak mencari pekerjaan karena mengurus keluarga, yaitu: tidak memperoleh izin suami dan mengurus anak yang menyandang disabilitas. Berdasarkan hasil FGD, ketiadaan izin suami dan keluarga pada perempuan yang berstatus menikah dan memiliki anak usia balita menjadi alasan utama tidak bekerja. Biasanya, suami akan mengizinkan mereka bekerja ketika tidak ada lagi anak berusia balita. Meski demikian, peluang kerja yang bisa diakses terbatas pada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah atau setidaknya yang berlokasi dekat rumah dan waktunya yang fleksibel.

Ini patut diperhatikan, terutama mengingat sebagian besar anggota keluarga yang mengurus rumah tangga tersebut memiliki modal penghidupan yang dapat mendukung mereka masuk angkatan kerja. Dari sisi modal sosial, sebanyak 58 persen sudah terlibat dalam kegiatan sosial-ekonomi, seperti kelompok pengajian dan arisan. Selain itu, 88 persen sudah mengetahui penyedia layanan pinjaman di daerah sekitar tempat tinggalnya dan 23 persen sudah pernah meminjam uang untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan keperluan lainnya (Tabel 19). Sejumlah kecil telah mengambil pinjaman dari lembaga non-perbankan, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk menjamin pinjaman mereka dan membayar dengan angsuran mingguan atau bulanan. Adapun responden lainnya lebih memilih untuk meminjam dari orang terdekat seperti keluarga atau tetangga yang lebih fleksibel pengembaliannya, dan tidak memerlukan jaminan.

Di antara anggota keluarga dalam penelitian ini yang tidak mencari pekerjaan karena 'alasan lain', sebagian besar adalah laki-laki (73 persen), setengahnya berusia di bawah 30 tahun (55 persen), mayoritas berpendidikan SD ke bawah (73 persen), dan setengahnya belum kawin (55 persen). Berdasarkan hasil FGD, hal ini terutama terjadi pada anggota keluarga penerima PKH usia muda yang masih dibiayai oleh orang tua, sehingga mereka menjadi malas dan kurang termotivasi untuk bekerja. Ada pula di antara mereka yang menyandang disabilitas, yang meliputi keterbatasan mental dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain.

Tabel 19: Karakteristik Demografi Anggota Keluarga Sampel yang Bukan Angkatan Kerja

Indikator modal penghidupan	Menganggur (n = 15)	Bersekolah (n = 71)	Mengurus rumah tangga (n = 67)	Kegiatan lainnya (n = 11)
Modal Manusia				
Mampu membaca dan menulis (%)	100	100	88,1	54,6
Pendidikan tertinggi tamat SMA (%)	20	1,4 ²⁴	7,5	0
Pernah mengikuti pelatihan bersertifikat (%)	0	5,6	28,4	54,6
Mengalami disabilitas (%)	0	2,8	1,5	9,1
Memiliki penyakit kronis (%)	20	7	28,4	54,6
Modal Sosial				
Terlibat dalam kegiatan/kelompok sosial ekonomi (%)	93,3	66,2	58,2	54,6
Modal Keuangan				
Mengetahui penyedia layanan pinjaman (%)	66,7	73,8	87,7	16,7
Mengakses penyedia layanan pinjaman (%)	0	2,9	22,7	0
Mengambil pinjaman dari lembaga keuangan formal (%)	0	0	7,5	0

²⁴ Angka ini merujuk pada mereka yang telah menyelesaikan SMA dan melanjutkan ke universitas

Indikator modal penghidupan	Menganggur (n = 15)	Bersekolah (n = 71)	Mengurus rumah tangga (n = 67)	Kegiatan lainnya (n = 11)
Modal Alam				
Terdapat anggota keluarga yang mengelola lahan (%)	53,3	36,6	32,8	54,6
Total lahan yang dikelola oleh keluarga < 2 hektare (%)	100	100	100	100
Status kepemilikan lahan terluas adalah milik sendiri (%)	25	26,9	36,4	16,7
Modal Fisik				
Rata-rata jarak dari tempat tinggal ke pasar terdekat (km)	3,7	4,1	4,5	5,3
Rata-rata jarak dari tempat tinggal ke ibu kota kabupaten (km)	15	13,7	16,3	16,3
Rata-rata jarak dari tempat tinggal ke lembaga keuangan pemberi modal (km)	4,4	4,9	4,8	6,3
Jalan dari rumah dapat dilalui sepanjang tahun dengan kendaraan roda dua (%)	100	95,8	88,1	100

Sumber: Diolah dari data survei 2019.

BAB 03

PROGRAM MATA PENCARIAN KOMPLEMENTER

Bab ini menjelaskan program pengembangan mata pencarian di tingkat kabupaten, kota dan desa, serta bagaimana pengalaman keluarga penerima PKH terkait dengan program-program tersebut. Intervensi ini dibagi menjadi empat kelompok sasaran utama: (i) pemilik dan pengelola pertanian/perikanan; (ii) pemilik UMKM (iii) karyawan; dan (iv) penerima manfaat PKH.

Sebagian besar program yang ditemukan dalam penelitian ini dilaksanakan oleh pemerintah dan ditujukan untuk masyarakat luas yang telah terlibat dalam kegiatan ekonomi sektor-sektor tertentu. Tidak banyak ditemukan program pengembangan mata pencarian yang menargetkan masyarakat miskin. Dan tidak ada satu pun program yang mengintegrasikan penerima manfaat program dengan target program PKH, kecuali bagi program yang dijalankan Kementerian Sosial khusus untuk penerima PKH (**lihat Bagian 3.4**). Kegiatan program yang paling umum adalah kursus pelatihan dan hibah atau bantuan untuk peralatan produksi.

Akibatnya, hanya sebagian kecil anggota keluarga (22 responden) dalam studi ini yang mendapatkan manfaat dari program pengembangan mata pencarian yang diimplementasikan selama setahun terakhir.

3.1 Program Intervensi Mata Pencarian bagi Pemilik dan Pengelola Pertanian

Program pengembangan mata pencarian bagi mereka yang terlibat dalam sektor pertanian dirangkum dalam Tabel 20. Akan tetapi, mungkin ada program tingkat kabupaten lain di luar wilayah penelitian²⁵. Di Indramayu, misalnya, pelatihan dan sertifikasi ditawarkan untuk pekerja pertanian dan perikanan tetapi desa penelitian bukan bagian dari program ini.

²⁵ Informasi tentang program pengembangan mata pencarian untuk pemilik bisnis dan pekerja di sektor pertanian di tingkat kabupaten hanya diperoleh dari informan di kantor pertanian dan kelautan dan perikanan sesuai dengan tipologi daerah (Pacitan dan Indramayu). Sementara itu, di tingkat desa / masyarakat dan kecamatan, informasi serupa diperoleh dari informan di semua wilayah penelitian tanpa kecuali (lihat Bab 1).

Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan menjalankan program pengembangan mata pencarian dukungan pemerintah untuk sektor pertanian di daerah penelitian. Dinas ini berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, termasuk kepada anggota keluarga PKH, mengenai program dan kriteria untuk partisipasi.

Sebagian besar program yang berlangsung di daerah penelitian ditujukan untuk pemilik atau pengelola pertanian daripada buruh tani. Hanya satu buruh tani yang berpartisipasi dalam pelatihan penanaman padi gogorancah²⁶ yang terbuka untuk masyarakat umum – bukan karena status mereka sebagai penerima PKH, tetapi karena mereka memenuhi persyaratan partisipasi lainnya.

Program untuk mengembangkan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan ditemukan terutama di Pacitan, sementara program untuk perikanan lebih menonjol di Indramayu. Di daerah perkotaan Surakarta, sebuah program berfokus pada bidang tanah kecil untuk menanam tanaman hortikultura skala rumah tangga. Tidak ada program pertanian ditemukan di Bandung Barat, yang merupakan kawasan industri.

Tabel 20: Uraian tentang Intervensi Mata Pencarian di Bidang Pertanian

Program	Uraian	Persyaratan/biaya partisipasi	Lembaga pelaksana dan tingkatnya
Pelatihan bagi petani	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kelas (dikombinasikan dengan latihan praktis) tentang teknik budidaya untuk padi, hortikultura, perikanan, peternakan dan produksi pupuk. • Petugas pertanian, perikanan dan penyuluh ternak dari masing-masing dinas setempat memimpin kursus pelatihan • Pemilik bisnis yang berpengalaman berpartisipasi sebagai narasumber. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis • Peserta biasanya adalah pemilik atau pengelola lahan pertanian • Terkadang terbuka untuk buruh tani (seperti penanaman padi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kabupaten oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan. • Diimplementasikan di tingkat kabupaten, kecamatan & desa

²⁶ Padi Gogorancah adalah padi yang ditanam di sawah tadah hujan. Ditanam ketika sawah masih kering tetapi setelah hujan, sawah tergenang dan beras diperlakukan seperti beras lainnya

Program	Uraian	Persyaratan/biaya partisipasi	Lembaga pelaksana dan tingkatnya
Produksi input pertanian (melalui Program PKKPM) ²⁷	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih, bibit, pupuk, peralatan pertanian, alat pengolahan pasca panen dan limbah pertanian • Diberikan kepada pemilik lahan pertanian individu atau kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Biasanya diminta untuk menjadi bagian dari kelompok nelayan atau petani 	<ul style="list-style-type: none"> • Program nasional oleh Kementerian Desa. • Diimplementasikan di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan.

Pengalaman Penerima Manfaat PKH dalam Program Pengembangan Mata Pencarian Pertanian

Responden menilai manfaat intervensi mata pencarian pertanian berdasarkan beberapa faktor:

- Kemudahan bagi anggota keluarga PKH untuk memenuhi persyaratan berpartisipasi;
- Kesesuaian pelatihan dengan pekerjaan anggota keluarga PKH yang menjadi peserta saat ini;
- Kemampuan peserta untuk menerapkan pengetahuan dari pelatihan ke kegiatan pertanian harian mereka dalam hal sumber daya alam yang tersedia dan modal mata pencarian lain yang mereka miliki;
- Ketersediaan kegiatan tindak lanjut pasca pelatihan, misalnya, pendampingan dan pemantauan untuk memastikan para peserta menerapkan pengetahuan baru secara efektif; dan
- Penyediaan alat usaha gratis, dukungan modal, dan fasilitas lainnya setelah pelatihan

²⁷ PKKPM: Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat. Kelayakan didasarkan pada mereka yang dianggap miskin sesuai Basis Data Terpadu (BDT)

Tabel 21: Dampak Program Pengembangan Mata Pencarian pada Sektor Pertanian²⁸

Lokasi	Ragam Program	Skor
Indramayu	Pelatihan penanaman padi gogorancah	4
	Pelatihan budidaya udang	1
	Bantuan aki dan lampu untuk nelayan bagan*	4
	Bantuan alat traktor	2
	Bantuan jaring dan mesin perahu	2
	Bantuan bibit udang	2
Bandung Barat	-	
Surakarta	Pelatihan menanam sayur	4
	Pelatihan menggunakan limbah sayur/buah untuk pupuk cair	1
Pacitan	Pelatihan perawatan sapi perah dan pengolahan limbahnya	2
	Pelatihan penanaman buah	2
	Bantuan traktor pada program PKKPM	4
	Bantuan benih jagung, padi, dan pupuk	4
	Bantuan alat giling padi	3
	Bantuan anak kambing	2
	Bantuan alat giling pakan ternak	2
	Pelatihan pengolahan pupuk dari limbah kotoran ternak	1
Bantuan alat pengolahan pupuk dari limbah kotoran ternak	0	

Sumber: Hasil FGD kecamatan 2019.

Keterangan: 0 = tidak berdampak; 1 = berdampak sangat kecil; 2 = berdampak kecil; 3 = berdampak besar; 4 = berdampak sangat besar

*Jenis alat tangkap tradisional.

Pelatihan menanam padi gogorancah di Indramayu dianggap berhasil karena sesuai dengan mata pencarian anggota keluarga PKH. Kursus ini terbuka bagi pemilik pertanian, pengelola lahan, dan pekerja pertanian. Keuntungan dari sistem budidaya padi gogorancah adalah mengurangi kerja bercocok tanam, tenaga pemeliharaan, dan menghemat waktu (Balingtan, 2016) yang sesuai dengan petani skala kecil seperti yang ada dalam penelitian ini. Responden yang bekerja sebagai buruh tani juga meningkatkan keterampilan mereka, mempermudah mereka untuk menemukan pekerjaan dibandingkan dengan buruh tani lainnya yang tidak terlatih.

²⁸ 'Dampak' intervensi dinilai melalui FGD dan mencerminkan persepsi responden tentang kegunaan dan penerapan hasil pelatihan untuk memperkuat peluang pendapatan mereka.

Pelatihan penanaman sayuran di Surakarta juga dianggap bermanfaat karena kursus ini terbuka untuk siapa saja yang tertarik dan melayani peserta dengan sebidang tanah kecil di daerah perkotaan. Hasil bumi ditanam untuk keluarga sebagai cara untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga meskipun beberapa dapat dijual dalam jumlah terbatas.

Sebaliknya, pelatihan tentang budidaya udang ternyata berdampak kecil pada responden penelitian. Para peserta harus merupakan pemilik atau pengelola tambak udang tetapi hanya sedikit anggota keluarga PKH dalam penelitian ini yang memiliki tanah dan memiliki akses ke modal untuk membangun bisnis tambak udang (meskipun beberapa bekerja sebagai buruh tani udang). Selain itu, pelatihan tidak menawarkan tindak lanjut meskipun peserta membutuhkan bimbingan dalam menerapkan apa yang telah mereka pelajari.

Pelatihan penanaman buah di Pacitan tampaknya juga terbatas pemanfaatannya walaupun beberapa anggota keluarga di desa penelitian bekerja sebagai petani dan beberapa sudah menanam pohon buah. Pelatihan ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi petani tetapi tidak mendistribusikan benih buah berkualitas atau menawarkan bantuan keuangan meskipun petani memiliki akses terbatas ke input ini. Responden sampai pada kesimpulan yang sama tentang pelatihan pupuk di Pacitan. Meskipun panitia membagikan alat pengolahan pupuk untuk mendukung pelatihan, mereka tidak memberikan informasi yang memadai tentang penggunaan dan pemasaran pupuk. Hasilnya, pelatihan menambah pengetahuan para peserta, tetapi tidak memperkuat mata pencarian mereka.

Suatu persyaratan yang sering sulit dipenuhi oleh anggota keluarga PKH adalah keikutsertaan mereka dalam kelompok tani atau nelayan (lihat Bagian 2.1 dari laporan ini), karena beberapa alasan:

- Mereka tidak memiliki tanah atau perahu sendiri untuk melaut, suatu kondisi umum untuk bergabung dengan suatu kelompok;
- Mereka lebih suka bekerja secara individu daripada secara kolektif;
- Mereka ingin menghindari risiko konflik yang dapat terjadi dalam kelompok;
- Mereka tidak tahu bagaimana cara bergabung dalam kelompok.

Bentuk bantuan juga harus sesuai dengan kebutuhan kontekstual petani jika mereka ingin mendapat manfaat dari intervensi. Sebagai contoh, bantuan traktor yang disediakan dalam PKKPM di Pacitan tampaknya memiliki dampak besar, sementara bantuan yang sama di sebuah desa penelitian di Indramayu dianggap memiliki dampak yang kecil.

Berdasarkan persyaratan program PKKPM, intervensi tambahan harus mendukung ekonomi lokal dan ditentukan oleh kebutuhan para peserta. Peserta program (termasuk anggota keluarga PKH) meminta bantuan traktor berdasarkan kebutuhan mereka sebagai pemilik dan pengelola lahan. Dari semua wilayah penelitian, anggota keluarga PKH di Pacitan rata-rata memiliki tanah terbanyak dan mereka dapat menggunakan traktor yang disediakan dalam kegiatan pertanian sehari-hari mereka. Di sisi lain, anggota keluarga PKH di Indramayu kebanyakan bekerja sebagai buruh tani atau nelayan dan tidak mendapat manfaat dari traktor dengan cara yang sama. Terbatasnya anggaran untuk program bantuan juga memengaruhi jumlah fasilitas produksi yang dapat dihasilkannya – artinya tidak semua orang yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat.

Terakhir, informasi tentang intervensi cenderung disebarluaskan tidak merata dan tidak menjangkau seluruh masyarakat karena sebagian besar disampaikan dari mulut ke mulut dan poster atau selebaran yang hanya tersedia di kantor desa. Orang-orang yang tinggal agak jauh dari kantor desa atau di desa-desa terpencil, seperti banyak anggota keluarga PKH, tidak mungkin mendengar tentang program-program pelatihan atau melihat pengumuman. Selain itu, para pengelola program tidak memiliki rencana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi ke desa-desa terpencil.

Untuk berpartisipasi dalam pelatihan pertanian dan program pendukung mata pencarian lainnya, petani seringkali harus menjadi bagian dari kelompok tani. Karena keterbatasan lahan, modal, dan jaringan sosial, sebagian besar petani miskin tidak dapat memenuhi persyaratan ini.

3.2 Intervensi Tambahan untuk Pemilik UMKM

Intervensi tambahan bagi mereka yang terlibat dalam UMKM dirangkum dalam Tabel 22. Sementara penelitian mengidentifikasi beberapa program pengembangan mata pencarian bagi pemilik UMKM, perlu dicatat bahwa, program yang menawarkan konsultasi bisnis, perizinan bisnis, dan bantuan pemasaran produk belum dijalankan di wilayah penelitian selama tiga tahun terakhir hingga 2019.

Tabel 22: Uraian tentang Intervensi tambahan untuk Pemilik UMKM

Program	Uraian	Persyaratan/biaya partisipasi	Lembaga pelaksana dan tingkatnya
Pelatihan bagi petani	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengolahan makanan dan produk non-pangan, berdasarkan bahan baku yang tersedia di setiap lokasi • Tujuannya adalah untuk mengajarkan peserta bagaimana mengolah bahan mentah menjadi barang jadi (dijual ke konsumen) atau barang setengah jadi (dijual ke pembeli perantara) • Beberapa pelatihan termasuk sesi tentang pengemasan dan pemasaran produk • Terkadang pelaku sektor swasta diundang sebagai pembicara 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi tidak dipungut biaya • Peserta harus membayar biaya transportasi dan akomodasi mereka sendiri untuk berpartisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Nasional (Kementerian Koperasi dan UMKM) • Diimplementasikan di tingkat kabupaten dan kecamatan oleh pemerintah daerah setempat

Program	Uraian	Persyaratan/biaya partisipasi	Lembaga pelaksana dan tingkatnya
Kegiatan Diseminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan/acara pemberian informasi kepada pemilik UMKM tentang bisnis apa yang harus mereka pilih, bagaimana mereka dapat mengakses keterampilan, modal dan pembukuan • Fasilitator dari badan pembangunan daerah. • Peserta juga dapat mengajukan pinjaman selama acara berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia bagi semua pemilik UMKM (tidak diperlukan verifikasi) • Peserta harus membayar biaya perjalanan dan akomodasi untuk berpartisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Intervensi tingkat kabupaten oleh berbagai dinas dan terkadang ditawarkan secara online²⁹
Hibah, pinjaman, dan input produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah atau pinjaman yang diberikan adalah untuk memulai bisnis baru atau memperluas bisnis yang sudah ada • Penyediaan mesin penggilingan untuk menghasilkan pasta udang, mesin jahit dan peralatan produksi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Harus membuktikan kelayakan bisnis melalui catatan akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat nasional (Kementerian Koperasi dan UKM). • Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi dan kabupaten juga menawarkan input produksi melalui program mereka sendiri. • Didistribusikan di tingkat kabupaten dan kecamatan • Aktor non-pemerintah seperti perusahaan dan LSM juga menerapkan intervensi serupa

²⁹ Tidak ada diseminasi acara secara online di wilayah penelitian

Secara umum, intervensi yang dijelaskan dalam Tabel 23 dijalankan oleh berbagai dinas setempat, termasuk Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Kelautan dan Perikanan; atau Dinas Pertanian (kecuali Surakarta, dimana banyak LSM yang menjalankan program ini). Intervensi umumnya disesuaikan dengan sumber daya yang ada dan jenis bisnis yang lazim di daerah tersebut. Di Indramayu, Bandung Barat dan Pacitan di mana sektor pertanian tumbuh, program terkait dengan pemrosesan produk pertanian. Sementara di Surakarta, daerah penelitian dekat TPA dan program cenderung terkait dengan daur ulang limbah.

Seperti halnya intervensi pertanian, Dinas terkait yang menjalankan program untuk pemilik UMKM berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk membantu menyebarkan informasi tentang program intervensi ini kepada masyarakat, termasuk kepada anggota keluarga PKH. Meskipun tidak ada persyaratan partisipasi atau biaya langsung, beberapa faktor berkontribusi pada fakta bahwa hanya 12 dari 69 pemilik UMKM dalam penelitian yang mendapat manfaat dari layanan ini.

Pengalaman Penerima Manfaat PKH terkait Intervensi Tambahan UMKM

Penilaian peserta tentang manfaat intervensi tambahan bagi pemilik UMKM dapat dilihat dalam Tabel 23. Dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti: (i) kemudahan partisipasi; (ii) dukungan di semua siklus bisnis; (iii) kompetensi pelatih; (iv) responsif terhadap kebutuhan bisnis anggota keluarga PKH; (v) kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang baru mereka temukan dalam kegiatan bisnis mereka.

Tabel 23: Dampak Program Pengembangan Mata Pencarian bagi Pemilik UMKM

Lokasi	Ragam Program	Skor
Indramayu	Pelatihan pengolahan ikan asin dan terasi, termasuk cara pengemasan dan pemasarannya	4
	Sosialisasi permodalan usaha	3
	Sosialisasi usaha yang sedang tren dan penjualan lewat daring	1
Bandung Barat	Pelatihan pengolahan hasil pertanian, termasuk cara pengemasan dan pemasaran	3
	Pinjaman lunak pada program PEKKA	3
	Program UPPKS*	3
	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1
Surakarta	Pelatihan memasak, membuat kue, dan melakukan pengemasan	4
	Pelatihan pengelolaan daur ulang sampah menjadi kerajinan	4
	Pelatihan makanan olahan berbahan dasar tahu tempe	3
	Bantuan modal untuk UMKM	1
Pacitan	Bantuan peralatan pembuatan kue	2

Sumber: Hasil FGD kecamatan 2019.

Keterangan: Penilaian berdasarkan FGD kecamatan 0 = tidak berdampak; 1 = berdampak sangat kecil; 2 = berdampak kecil; 3 = berdampak besar; 4 = berdampak sangat besar

* -Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Pelatihan keterampilan yang ditawarkan untuk mengolah ikan asin dan terasi di Indramayu, misalnya, memiliki dampak positif dan siapa pun yang tertarik dapat berpartisipasi. Bahan baku tersedia di lingkungan sekitar dan mudah diperoleh. Pelatihan ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta yang sudah menjalankan bisnis pengolahan ikan asin dan terasi, membantu mereka meningkatkan kualitas produknya. Pelatihan termasuk sesi pengemasan dan pemasaran. Pelatihan serupa dilakukan di Surakarta tentang memanggang dan memasak serta daur ulang. Pelatihan ini berhasil karena produk yang bersangkutan dapat dipasarkan secara lokal dan tidak memerlukan peralatan produksi yang mahal.

Dalam hal kegiatan diseminasi, Indramayu adalah satu-satunya daerah penelitian yang telah mengadakan kegiatan seperti itu, dimana anggota keluarga PKH yang bersangkutan mengatakan hal itu berdampak positif pada bisnis mereka. Di sisi lain, informasi yang disebarkan melalui saluran online berdampak terbatas. Meskipun pemberi materi pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM kompeten, para peserta (termasuk anggota keluarga PKH) tidak ditargetkan dengan baik karena mereka adalah orang dewasa yang telah menjalankan bisnis mereka secara konvensional dan tidak semua menggunakan ponsel pintar atau memiliki akses ke internet. Lebih jauh lagi, ternyata anggota keluarga muda PKH di Indramayu yang memiliki bisnis online tidak diundang ke acara tersebut.

Sementara akses ke modal penting bagi anggota keluarga PKH, tidak semua skema bantuan keuangan berdampak positif bagi responden. Sebagai contoh, pemerintah daerah di Bandung Barat menawarkan layanan kredit mikro kepada pemilik UMKM yang telah mendirikan usaha dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. Faktanya, banyak bisnis yang dijalankan oleh masyarakat miskin, termasuk anggota keluarga penerima PKH, mengoperasikan bisnis skala kecil dengan pembukuan terbatas, sehingga sulit untuk membuktikan kelayakan finansial. Banyak responden juga khawatir tentang ketidakmampuan mereka untuk membayar angsuran tepat waktu. Skema serupa di Surakarta juga memiliki dampak kecil karena bantuan keuangan yang dibatasi maksimum sebesar Rp 260.000 yang tidak memenuhi kebutuhan bisnis responden.

Di sisi lain, pinjaman lunak yang diberikan oleh program-program seperti PEKKA dan UPPKS berdampak besar di Bandung Barat. Melalui program-program ini, para penerima manfaat miskin berhasil mengakses pinjaman usaha dan belajar bagaimana cara menabung, mengelola bisnis mereka, dan membentuk kelompok-kelompok pendukung sehingga para anggota dapat saling memberikan dukungan dan saran dalam menjalankan usaha. Ini menyoroti bahwa pemilik UMKM yang miskin, seperti mereka yang berada dalam keluarga PKH, sangat membutuhkan keterampilan manajemen keuangan dan usaha dibandingkan dengan bantuan keuangan.

Sekali lagi, informasi cenderung disebarluaskan tidak merata dan tidak menjangkau seluruh masyarakat karena sebagian besar disampaikan dari mulut ke mulut dan poster atau selebaran hanya tersedia di kantor desa. Selain itu, pelatihan diadakan di tingkat kabupaten dan anggota keluarga PKH merasa kesulitan untuk hadir karena kendala transportasi, keuangan dan lainnya.

“Bahkan jika lokasinya jauh, saya masih ingin berpartisipasi (dalam pelatihan) ... tetapi harus ada tempat tinggal karena saya tidak punya kendaraan untuk membawa saya ke sana dan kemudian ada biayanya. Bahkan jika saya mau, jika tidak ada transportasi atau uang (untuk makanan dan penginapan) ... naik ojek ke jalan utama akan dikenakan biaya Rp15.000 per perjalanan. Untuk pulang ke rumah akan dikenakan biaya IDR15.000 lagi.”
(Responden perempuan, 56 tahun)

Pemangku kepentingan setempat telah mencoba cara inovatif untuk memperluas layanan ini. Di Indramayu, misalnya, industri lokal, Dinas Koperasi dan UKM bekerja sama dengan kecamatan untuk mendelegasikan wewenang dalam mengeluarkan izin usaha mikro dan kecil ke 31 kecamatan di Indramayu. Sementara itu di Pacitan, fasilitator PKH telah bekerja sama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten untuk mengatur bantuan bagi keluarga PKH (**Kotak 1**).

Kotak 1.

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)

PLUT-KUMKM dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2014. Secara nasional, terdapat 73 PLUT-KUMKM yang berlokasi di 32 provinsi dan 45 kabupaten/kota. Di Jawa Timur, terdapat enam PLUT-KUMKM, salah satunya di Pacitan. Ada lima tenaga konsultan di PLUT-KUMKM Pacitan. Setiap konsultan membidangi bidang pendampingan sebagai berikut:

- Kelayakan bisnis dan pengembangan proposal.
- Pembukuan, profitabilitas dan kerugian.
- Pemasaran, branding, pengemasan (termasuk melalui pemasaran online).
- Pembiayaan dan ekspansi bisnis.

Cakupan sasaran PLUT-KUMKM Pacitan terdiri dari UMKM dari 12 kecamatan. PLUT-KUMKM terbuka untuk umum. Pelaku UMKM dapat melakukan konsultasi secara langsung di kantor PLUT-KUMKM. Konsultan melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan untuk mensosialisasikan kegiatan PLUT-KUMKM, menyebarkan pamflet, dan menyiarkannya di radio. PLUT-KUMKM Pacitan terbatas anggarannya sehingga tidak dapat mengunjungi setiap UMKM di wilayah tersebut. PLUT-KUMKM dan PKH berpotensi untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima PKH. PLUT-KUMKM dapat membantu mendampingi anggota keluarga penerima PKH yang menjadi pengusaha UMKM dalam kegiatan usaha. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, di tingkat nasional, sudah ada nota kesepahaman bersama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM tentang kerja sama pemanfaatan PLUT-KUMKM sebagai pendampingan bagi penerima manfaat perlindungan sosial.

Pemilik usaha miskin, seperti keluarga PKH, membutuhkan kombinasi pengembangan keterampilan bisnis dengan bantuan keuangan. Menurut mereka, pinjaman tanpa peningkatan kapasitas hanya memberikan hasil yang terbatas.

3.3 Program untuk Membantu Anggota Keluarga PKH Memasuki Pasar Tenaga Kerja

Walaupun ada program untuk membantu masyarakat mengakses pasar tenaga kerja di semua wilayah penelitian, akan tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan intervensi tambahan bagi pemilik agribisnis dan pengelola UMKM, serta tidak ditujukan secara khusus bagi masyarakat miskin. Seperti skema lainnya yang sebelumnya dijelaskan dalam bab ini, anggota keluarga PKH hanya memiliki sedikit pengetahuan dan partisipasi dalam skema pasar kerja ini.

Sebagian besar intervensi pasar tenaga kerja biasanya dilaksanakan melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Namun, Dinas Koperasi dan UKM di Bandung Barat dan Dinas Pendidikan di Surakarta dan kolaborasi antara pemerintah/LSM juga terlibat dalam mendukung skema ini. Intervensi pasar tenaga kerja yang ada di bidang penelitian dirangkum dalam **Tabel 24**.

Tabel 24: Uraian tentang Intervensi Pasar Tenaga Kerja

Program	Uraian	Persyaratan/biaya partisipasi	Kementerian/ Lembaga terkait
Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> Menawarkan pelatihan dan magang bersertifikat serta peluang kerja di sektor formal Peserta menerima sertifikat kompetensi setelah pelatihan selesai Dinas tenaga kerja setempat (Disnaker) menyediakan kursus singkat (selama beberapa hari) mengenai pengelasan, perbaikan alat pendingin, perbaikan mobil dan komputer, dan layanan lainnya. Beberapa menawarkan sertifikat, tetapi mereka tidak memiliki bobot yang sama dengan kursus berbasis kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> Gratis Menyediakan makan dan biaya transportasi harian Tidak ada persyaratan partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> Nasional (Kementerian Tenaga Kerja) Pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan di tingkat kabupaten oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kursus singkat dilaksanakan di tingkat kabupaten (Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UKM)

Program	Uraian	Persyaratan/biaya partisipasi	Kementerian/ Lembaga terkait
Pusat pengembangan keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Sama seperti BLK • Menawarkan pelatihan keterampilan dalam kelas tentang pengelasan, reparasi alat pendinginan, dan keterampilan kejuruan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis. • Tidak ada persyaratan partisipasi. • Tidak ada bantuan biaya transportasi yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nasional (Kementerian Tenaga Kerja) • Diimplementasikan di tingkat kabupaten oleh Disnaker bekerja sama dengan pusat pelatihan atau pendidikan setempat
Pameran/Bursa Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuannya adalah untuk menghubungkan perusahaan formal dengan kandidat yang memenuhi syarat mencari pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuka untuk masyarakat umum • Tidak ada persyaratan kepesertaan • Tidak ada transportasi atau uang saku yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nasional (Kementerian Tenaga Kerja) • Diimplementasikan di tingkat kabupaten oleh Disnaker dan BLK, bekerja sama dengan perusahaan swasta yang telah menandatangani MoU dengan kedua lembaga ini
Beasiswa untuk program kesetaraan sekolah menengah atas	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pendidikan kesetaraan dan sertifikat bagi mereka yang belum menyelesaikan pendidikan formal. ☐ Kejar Paket A, B dan C³⁰ tersedia di semua lokasi penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Terbuka untuk umum, tetapi peserta diharuskan membayar untuk layanan tersebut (tidak disubsidi) ☐ Beasiswa ditawarkan untuk masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pendidikan kesetaraan disediakan secara nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) ☐ Program beasiswa yang diberikan oleh kabupaten (Dinas Pendidikan)

Sumber: FGD Kecamatan 2019.

³⁰ Kesetaraan tingkat Pendidikan SD (Paket A), SMP (Paket B), dan SMA (Paket C)

Pengalaman Anggota PKH dengan Intervensi Pasar Tenaga Kerja

Dari semua wilayah penelitian, Surakarta telah menunjukkan inisiatif terbesar untuk mengimplementasikan skema pasar tenaga kerja lokal untuk memungkinkan orang memasuki pasar kerja sektor formal. Misalnya, Surakarta adalah satu-satunya kabupaten yang telah mengembangkan fasilitas 3-in-1 yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan penempatan, dan telah menandatangani perjanjian dengan ratusan perusahaan swasta untuk merekrut pekerja magang dan karyawan baru dengan upah minimum regional.

Dalam hal pelatihan kejuruan berbasis kompetensi, anggota keluarga yang berusia antara 15-29 tahun yang telah bersekolah di SMP atau SMA atau sederajat memiliki potensi terbesar untuk mendapatkan manfaat dari skema ini dan memasuki pasar tenaga kerja formal. Meskipun demikian, hanya beberapa responden di Pacitan yang menghadiri kursus BLK dan beberapa berpartisipasi dalam kursus singkat non-BLK di Bandung Barat. Anggota keluarga PKH biasanya mencari tahu tentang pelatihan ini melalui perangkat desa, kader lokal atau teman. Semakin aktif mereka secara sosial, semakin besar kemungkinan mereka mendengarnya dan berpartisipasi. Pusat Pengembangan Keterampilan (SDC) yang berlokasi di Bandung Barat dan Surakarta akan sesuai untuk lulusan SMA atau sederajat, tetapi anggota keluarga PKH dalam penelitian ini tidak tahu tentang program intervensi ini. Mengingat mandat mereka yang tumpang tindih dengan BLK, Kota Surakarta berencana untuk mengintegrasikan kedua skema di mana SDC dirancang sebagai pelatihan keterampilan tingkat pemula dan BLK diperuntukkan bagi mereka yang mencari keterampilan tingkat lanjut.

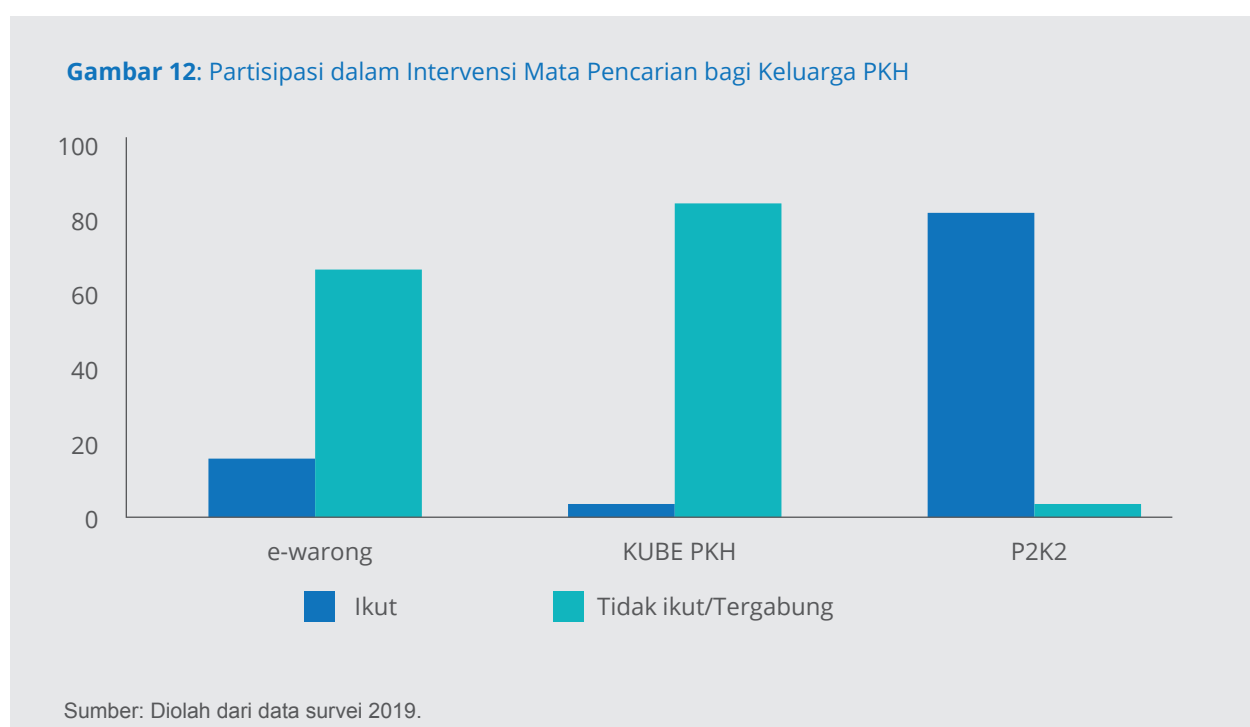
Bursa kerja cocok untuk anggota keluarga PKH yang telah lulus SMA tetapi masih menganggur (atau ingin berganti pekerjaan). Anggota keluarga PKH yang bekerja untuk pemerintah atau LSM lebih akrab dengan bursa kerja daripada mereka yang bekerja di tempat lain. Sementara mereka yang bekerja di rumah sama sekali tidak mengetahui pameran tersebut. Selain itu, hanya segelintir anggota keluarga PKH yang memanfaatkan bursa kerja pemerintah atau daring untuk mencari pekerjaan karena responden tidak yakin bahwa bursa kerja benar-benar akan menghasilkan pekerjaan, oleh karena itu, tidak menganggapnya sebanding dengan biaya perjalanan ke ibukota kabupaten.

Dinas Pendidikan Surakarta adalah satu-satunya yang menawarkan beasiswa bagi masyarakat miskin untuk mendaftar ke program kesetaraan SMA. Salah satu anggota keluarga PKH dalam penelitian ini telah mendapatkan manfaat dari beasiswa, tetapi sebagian besar belum mendengar tentang hal itu meskipun anggota keluarga PKH adalah target yang tepat untuk intervensi ini (khususnya mereka yang berusia di atas 17 tahun dan belum menyelesaikan SMA).

Sebagian besar responden tidak mendapat manfaat dari pelatihan kejuruan dan layanan pencarian pekerjaan, terutama karena informasi tentang intervensi ini tidak mencapai keluarga PKH.

3.4 Program Pengembangan Mata Pencarian bagi Penerima Manfaat PKH

Selain intervensi yang dijelaskan sebelumnya, Kementerian Sosial juga menjalankan program pengembangan mata pencarian yang menargetkan anggota keluarga PKH di semua wilayah penelitian. Program-program ini termasuk *Family Development Session* (P2K2)³¹; Kelompok Usaha Bersama (KUBE PKH); kios elektronik berbasis komunitas (e-Warong KUBE PKH). Dari tiga program, P2K2 (**Gambar 12**) memiliki tingkat partisipasi tertinggi karena sesi ini berlangsung di semua wilayah penelitian sementara program e-Warong KUBE PKH hanya berjalan di Surakarta. KUBE PKH berada di dua lokasi penelitian, meskipun tidak ada yang aktif berjalan pada saat penelitian dilakukan.³²



Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses pembelajaran terstruktur yang dirancang untuk membantu anggota keluarga PKH mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan perilaku yang lebih baik terhadap kesehatan, pendidikan dan manajemen keuangan (PKH, 2017). P2K2 mulai diujicobakan pada 2015 terdiri dari empat modul: (i) kesehatan dan gizi; (ii) perawatan dan pendidikan anak; (iii) ekonomi keluarga; dan (iv) perlindungan anak. P2K2 dilaksanakan satu kali sebulan dengan fasilitasi fasilitator PKH menggunakan metode interaktif-partisipatif dengan durasi 2 jam – 2 jam 30 menit (PKH, 2016b). Hampir semua keluarga PKH dalam penelitian ini (97 persen) telah berpartisipasi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (**Gambar 12**).

³¹ Arti akronim P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga).

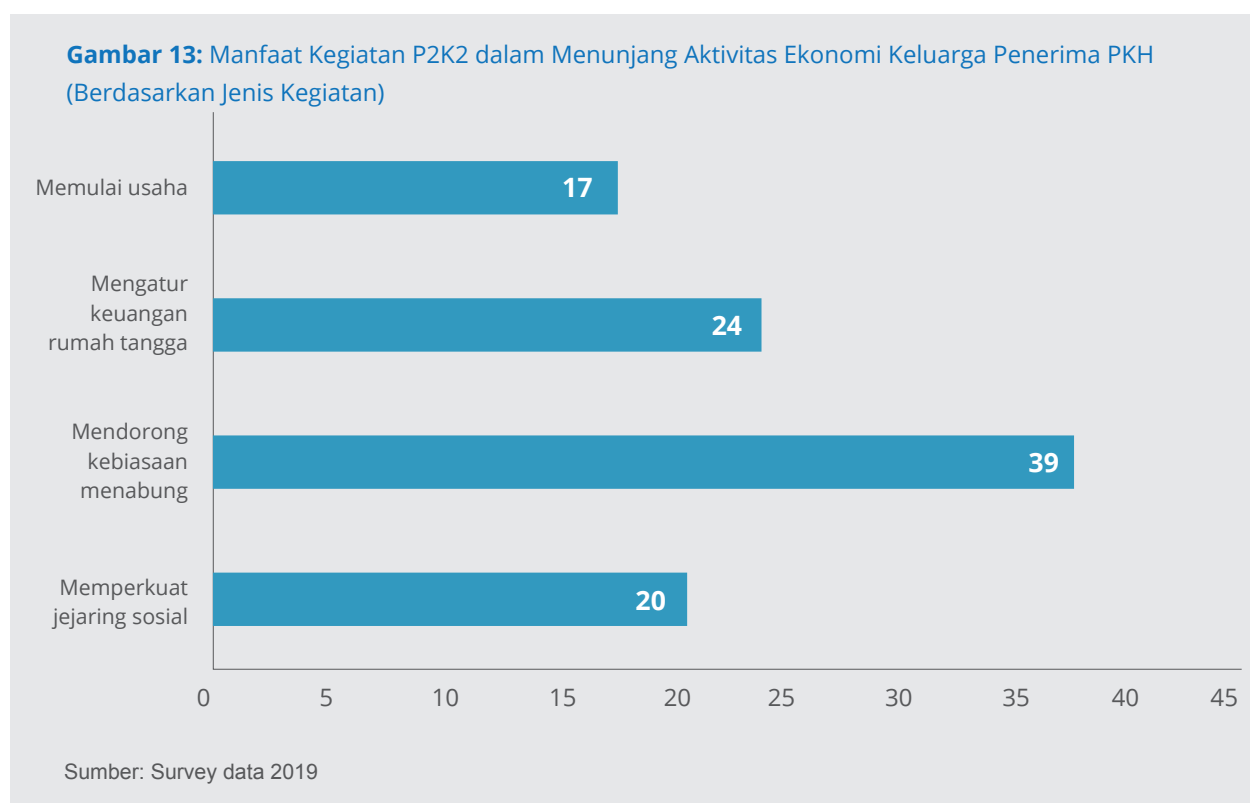
³² Jumlah KUBE PKH di setiap desa penelitian di Indramayu dan Bandung Barat adalah 1–13 kelompok (atau sekitar 10–130 orang per desa). Sementara itu, survei hanya dilakukan dengan 50 keluarga penerima per kabupaten dan pemilihan dilakukan secara acak. Dengan demikian, tingkat partisipasi dalam KUBE PKH bisa lebih besar dari 1 persen yang disebutkan di sini.

Modul manajemen keuangan/ekonomi keluarga mencakup topik-topik seperti pengelolaan pengeluaran rumah tangga, menabung, perencanaan usaha, dan bagaimana menjalankan usaha yang efektif. Menurut fasilitator PKH di Indramayu dan Bandung Barat, penyampaian materi pada modul manajemen keuangan/ekonomi keluarga dilakukan masing-masing pada tahun 2015 dan 2018, dan mereka berencana untuk mengulangi penyampaian modul-modul ini pada tahun 2019 sebagai penyegaran bagi penerima manfaat yang sebelumnya sudah menerima materi dan bagi keluarga PKH baru yang belum pernah menerima materi ini.

Secara keseluruhan, sebagian besar responden (63%) merasa bahwa modul manajemen keuangan/ekonomi keluarga dalam P2K2 sangat berguna. Responden merasa materi tersebut:

- Mendorong mereka untuk menabung (39 persen);
- Membantu mereka mengelola keuangan keluarga (24 persen);
- Memberi tahu mereka cara memulai usaha baru (17 persen); dan
- Memberi informasi tentang peluang kerja dan pesanan dari pelanggan baru bagi usaha mereka (20 persen) **(Gambar 13).**

Namun demikian, 37 persen keluarga PKH mengatakan bahwa P2K2 tidak membawa manfaat apa pun bagi kegiatan ekonomi mereka, secara umum karena fasilitator tidak memberikan informasi tentang peluang kerja sebagai bagian dari pertemuan tersebut.



Sebagian besar responden merasa bahwa P2K2 berguna dalam mempromosikan kebiasaan menabung, mengelola keuangan keluarga, dan memotivasi individu untuk memulai usaha.

Program KUBE PKH

KUBE merupakan salah satu program Kementerian Sosial yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan memberikan modal usaha untuk pengembangan usaha (Kementerian Sosial, 2017). Program ini menawarkan cara untuk meningkatkan upaya ekonomi produktif, mempromosikan pengembangan diri dan berbagi pengalaman di antara anggotanya. KUBE PKH diharapkan dapat memotivasi masyarakat miskin untuk: (i) menjadi maju secara ekonomi dan sosial; (ii) meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok; (iii) memperkuat budaya kewirausahaan; dan (iv) membangun kemitraan sosial-ekonomi dengan pelaku pasar (PKH 2016a). Kelompok ini terdiri dari 10 anggota, dan modal awal dapat digunakan baik untuk usaha individu (dikelola melalui kelompok) atau usaha kelompok. Kelompok ini menerima Rp 20 juta sebagai modal awal dan bagaimana menginvestasikannya dipandu oleh Fasilitator KUBE PKH. Fasilitator membimbing kelompok selama satu tahun, dimana usaha yang terbangun diharapkan dapat berkelanjutan.

KUBE PKH adalah desain ulang dari program KUBE reguler dan berusaha untuk memperbaiki inefisiensi program KUBE³³ (TNP2K, 2015b). KUBE PKH dirancang ulang, misalnya, untuk memasukkan pertemuan bulanan dengan fasilitator untuk mengembangkan keterampilan manajemen bisnis anggota dan indikator sistematis untuk memantau kemajuan (ibid), meskipun tidak ada bukti untuk menentukan apakah reformasi ini telah dilaksanakan (**lihat Kotak 2**).

Seperti halnya KUBE, KUBE PKH didirikan atas dasar filosofis dan nilai-nilai 'dari, oleh dan untuk masyarakat' dan perlu mewakili kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan (PKH 2016a). Meskipun dana KUBE PKH didistribusikan ke empat kelompok di Bandung Barat, 20 kelompok di Indramayu dan tiga kelompok di Surakarta antara 2016 dan 2017, hanya sejumlah kecil responden yang menjadi bagian dari kelompok ini dan pada saat penelitian ini dilakukan kondisinya sudah tidak aktif. Pada saat pelaksanaan penelitian ini, program tersebut sudah tidak lagi berjalan karena sebab-sebab berikut ini:

- Fasilitator memilih jenis usaha tanpa melibatkan anggota kelompok. Pilihan jenis usaha tersebut tidak selalu sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi lingkungan penerima bantuan, yang mengakibatkan kurangnya rasa kepemilikan terhadap usaha yang dilakukan.
- Fasilitator hanya ada selama satu tahun pertama dari program tersebut dan tidak memantau kegiatan pasca-pencairan bantuan. Akibatnya, kegiatan berhenti sesaat setelah bantuan dicairkan.
- Dana tidak selalu digunakan untuk tujuan usaha

Di Bandung Barat, misalnya, fasilitator memilih memutuskan bahwa peserta harus memelihara domba sebagai usaha mereka dan dengan demikian memilih penerima manfaat dengan pengalaman dalam pengembangbiakan domba. Meskipun saat ini jumlah domba telah meningkat dari 10 menjadi 17, peserta kelompok tidak merasa intervensi ini memiliki banyak dampak. Para peserta merasa bisnis ini tidak sesuai untuk daerah mereka (karena mereka memiliki lahan penggembalaan yang terbatas), dan akibatnya domba tidak dirawat dengan baik. Menurut penerima manfaat, "kami tidak setuju jenis usaha ini, fasilitator tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip KUBE, jadi pada gilirannya, kami tidak mendukung program ini." Wawancara juga menunjukkan bahwa fasilitator KUBE PKH tidak memiliki pengalaman usaha dan gagal dalam meningkatkan kapasitas anggota untuk mengelola usaha mereka.

³³ Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah program pemberdayaan sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 1983 untuk mendorong usaha mikro berbasis kelompok. KUBE menawarkan hibah modal sebesar 20,000,000 IDR kepada grup yang terdiri dari 7-10 orang, dibayar sebagai transfer satu kali begitu proposal bisnis grup disetujui. Keuntungan biasanya diinvestasikan kembali ke dalam bisnis tetapi juga dapat dibagikan di antara para peserta. Evaluasi KUBE sebelumnya menunjukkan bahwa program tersebut tidak memperkuat pendapatan anggota karena jumlah modal tidak mencukupi, tidak meningkatkan keterampilan manajemen bisnis mereka, dan tidak ada sistem untuk melacak kemajuan bisnis (TNP2K, 2015b).

KOTAK 2:**2015 – Ringkasan Temuan Evaluasi KUBE PKH 2015**

Pada tahun 2019, KUBE PKH mencapai 110.000 penerima manfaat dengan rencana untuk memperluas program pada tahun 2020. Evaluasi tahun 2015 tentang KUBE PKH menyoroti bahwa program tersebut mencapai 14.740 anggota pada tahun 2015, di mana mayoritas adalah perempuan dengan pendidikan SD dan tidak memiliki pengalaman bisnis sebelumnya. Sementara mereka mengklaim bahwa program ini membantu mereka untuk menandatangani nama mereka sendiri dan meningkatkan modal sosial mereka dalam kelompok, program tersebut tidak secara seragam meningkatkan keterampilan manajemen usaha mereka. Evaluasi 2015 menyoroti bahwa memiliki 'agen perubahan' yang kuat untuk membimbing penerima manfaat (mis. Fasilitator dengan pengalaman usaha dan pemimpin kewirausahaan lokal) sangat penting untuk keberhasilan program, meskipun ini secara sporadis diimplementasikan di seluruh lokasi (TNP2K, 2015a).

Rekomendasi untuk meningkatkan KUBE PKH termasuk pertemuan bulanan rutin dengan fasilitator berpengalaman untuk mengembangkan keterampilan pembukuan penerima manfaat, meningkatkan akses mereka ke pasar, dan memantau kemajuan bisnis mereka melalui indikator sistematis dan alat pemantauan yang kuat. Rekomendasi juga termasuk menghubungkan dengan pemangku kepentingan lain untuk membangun literasi keuangan anggota dan pengembangan UMKM; memperkuat kapasitas usaha fasilitator KUBE PKH; dan menggunakan *tablet e-learning* sehingga fasilitator dapat memberikan pelatihan keterampilan bisnis standar kepada penerima manfaat (TNP2K, 2015b). Dengan tidak adanya evaluasi lanjutan, tidak diketahui sejauh mana rekomendasi ini dilaksanakan.

Program e-Warong KUBE PKH

KUBE mendirikan program kios berbasis komunitas elektronik, yang disebut sebagai e-Warong KUBE PKH. Kios dioperasikan oleh penerima PKH dan tujuannya adalah untuk: (i) mengucurkan uang tunai dan/atau makanan pokok kepada penerima manfaat perlindungan sosial; (ii) menjual dan memasarkan barang-barang yang diproduksi oleh kelompok KUBE PKH; (iv) memberikan peluang menghasilkan pendapatan bagi pengelola kios dan kelompok KUBE PKH. Kios ini dioperasikan oleh 10 penerima manfaat PKH secara bergiliran sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan dari intervensi ini.³⁴ Kios ini hanya dapat didirikan di lokasi yang: (i) memiliki listrik dan koneksi internet yang baik; (ii) memiliki kemampuan untuk melayani 500–1.000 keluarga PKH; (iii) disetujui oleh anggota dewan KUBE; dan (iv) memiliki kemampuan untuk mencairkan tunjangan bantuan sosial (Kementerian Sosial, 2017).

Platform e-Warong KUBE PKH hanya terdapat di Surakarta karenanya hanya 19 persen keluarga penerima PKH dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa mereka pernah berpartisipasi dalam program ini (Gambar 12). Program ini dilaksanakan di Surakarta sejak tahun 2016, tetapi e-warong di lokasi penelitian baru dimulai pada tahun 2017 dan lainnya pada tahun 2018. Satu kecamatan memiliki satu kios dan tiga kios lainnya yang menjual berbagai barang termasuk makanan pokok dan barang-barang rumah tangga (misalnya sabun dan perlengkapan mandi).

³⁴ Tidak ada syarat khusus untuk menjadi operator e-Warong KUBE PKH (Mawardi et al., 2017). Selain itu, operator memutuskan di antara mereka sendiri seberapa sering laba dibagi.

Walikota dan Dinas Sosial Kota Surakarta mendukung program e-Warong KUBE PKH³⁵ dengan mendanai empat dari 50 kios di daerah tersebut dari anggaran daerah mereka. Dinas Sosial juga telah menetapkan kebijakan afirmatif, di mana 65 persen transfer bantuan sosial didistribusikan melalui e-Warong KUBE PKH yang dioperasikan oleh penerima manfaat PKH ini, dan hanya 35 persen dari transfer bantuan sosial yang didistribusikan melalui e-Warong lain yang dioperasikan oleh agen perbankan komersial (Agen e-Warong).

Selain itu, fasilitator PKH juga mendorong keluarga PKH untuk berbelanja di e-Warong KUBE PKH ketika mereka mencairkan uang bantuan sosial mereka. Pendamping merekomendasikan bahwa setiap keluarga PKH membelanjakan uangnya setidaknya Rp10.000 per bulan melalui e-Warong KUBE PKH, dan karenanya pengelola e-Warong KUBE PKH berupaya untuk selalu membina hubungan baik dengan para keluarga penerima PKH. Dengan makin banyaknya transaksi, semakin besar pula bagi hasil yang diperoleh pengelola e-Warong KUBE PKH.

Responden dalam penelitian ini mengaku tidak berkeberatan dengan anjuran fasilitator PKH untuk berbelanja Rp10.000 per bulan di e-Warong KUBE PKH karena mereka memahami manfaatnya dan ingin membantu sesama penerima PKH.

“Kalau segitu [Rp10.000 per bulan] ya gak berat. Karena pasti dalam sebulan ada belanjanya. Jajanan anak, tisu, telur, macam-macam. Ini kan hanya bedanya belanjanya di sana [e-Warong KUBE PKH]. Tapi ya saya ke sana sebulan sekali saja. Kan disuruhnya sebulan sepuluh ribu, yang penting di bukunya sudah dicatat kalau sudah belanja sepuluh ribu. Kalau yang sehari-hari ya belanjanya di warung dekat sini saja, atau sekalian di pasar.”
(Perempuan, 51 tahun, Surakarta, 2019).

Menurut wawancara dengan Dinas Sosial di Surakarta, e-Warong KUBE PKH memerlukan beberapa penyesuaian operasional jika ingin intervensi berkelanjutan. Misalnya, pemetaan agen bank e-Warong dan agen e-Warong KUBE PKH diperlukan sehingga kedua operator tidak saling bersaing secara langsung. Kedua, mengingat bahwa tidak ada prasyarat atau kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi operator e-Warong KUBE PKH, tidak semua operator memiliki keterampilan untuk menjalankan kiosnya dengan sukses. Ini juga berkontribusi pada kesulitan mereka dalam bersaing dengan kios-kios yang ada di daerah dan memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, pengelola e-Warong KUBE PKH membutuhkan pelatihan keterampilan manajerial usaha. Selain itu, proses penyaringan dapat membantu mengidentifikasi pengelola yang memiliki keterampilan dan pengalaman usaha dalam mengelola suatu usaha.

Tidak semua pengelola e-Warong KUBE PKH merupakan wirausahawan. Tahapan penyaringan untuk mengidentifikasi penerima manfaat PKH yang telah memiliki keterampilan usaha dan memberikan mereka pelatihan manajemen usaha dapat membantu memastikan bahwa intervensi tersebut berjalan secara lebih berkesinambungan.

³⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 25/2016, e-Warong KUBE PKH adalah fasilitas bisnis yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk makanan pokok dan/atau elektronik, kebutuhan bisnis, seperti serta memasarkan produk anggota KUBE.

BAB 04

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Kesimpulan

Laporan ini berupaya menyoroti tantangan ketenagakerjaan yang dialami oleh penerima bantuan langsung tunai di Indonesia dan menampilkan upaya untuk memperkuat berbagai intervensi tambahan untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi. Tiga bab sebelumnya telah menyajikan uraian rinci tentang: (i) profil ekonomi anggota keluarga PKH usia kerja; (ii) kendala mata pencarian yang dihadapi oleh petani/nelayan, pengusaha kecil, dan karyawan dengan upah dalam keluarga ini; serta (iii) pengalaman keterlibatan mereka dengan program pemerintah yang dirancang untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

Hampir setengah anggota keluarga PKH (40 persen di tingkat nasional dan 48 persen dari sampel penelitian) adalah angkatan kerja, artinya mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi atau sedang mencari pekerjaan. Meskipun tingkat pengangguran relatif rendah (4 persen secara nasional dan 3 persen untuk sampel studi), sekitar seperlima dari angkatan kerja ini nyaris menganggur.

Sebagian besar mereka yang tidak bekerja adalah kaum muda yang baru saja lulus SMA dan sedang mencari pekerjaan, sementara sebagian besar yang menganggur hanya memiliki pendidikan SMP atau setara. Selain itu, sekitar 13 persen anggota keluarga usia kerja masih bersekolah dan akan membutuhkan pekerjaan segera. Setengah dari pengangguran adalah perempuan yang telah lulus SMP atau lebih tinggi. Fokus utama mereka adalah mengurus keluarga, meskipun memiliki potensi untuk memilih dan memasuki dunia kerja sebagai pekerja berkeahlian menengah hingga tinggi.

Mereka yang memiliki pekerjaan menghadapi keterbatasan dalam mata pencarian berkelanjutan, meskipun keterbatasan ini memiliki bentuk yang berbeda dan tergantung pada konteksnya. Sementara itu pertanian adalah sumber mata pencarian utama bagi lebih dari 50 persen responden, akan tetapi petani PKH biasanya memanfaatkan keterampilan yang diperoleh dari generasi sebelumnya, sehingga membatasi produktivitas mereka. Mayoritas juga memiliki pendidikan SD atau kurang, dan tidak memiliki jaringan sosial berkualitas tinggi, sumber daya keuangan dan modal fisik (tanah dan alat) untuk mendapatkan upah yang layak dari kegiatan pertanian mereka. Namun demikian, sebagian besar berorientasi komersial dan 62 persen petani bercita-cita untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Lebih dari sepertiga anggota keluarga PKH adalah pemilik usaha kecil atau bekerja sebagai karyawan untuk orang lain. Pemilik usaha PKH mengalami berbagai hambatan di semua siklus usaha, termasuk: (i) ketidakmampuan untuk mengakses izin bisnis; (ii) kurangnya kepemilikan alat untuk menghasilkan komoditas

berkualitas tinggi; (iii) kelangkaan sumber modal dan pembiayaan; dan (iv) akses pasar terbatas. Anggota keluarga PKH yang dipekerjakan biasanya tidak memiliki kontrak dengan majikan mereka, membuatnya rentan terhadap pemutusan hubungan kerja dan risiko lainnya.

Anggota keluarga PKH yang masih dalam usia kerja tidak memiliki modal sumber daya manusia, keuangan, sosial, fisik dan alam yang diperlukan untuk menangkap peluang mata pencarian yang menguntungkan. Misalnya, sebagian besar keluarga PKH yang dipekerjakan memiliki pendidikan SD atau lebih rendah, meskipun saat ini hal tersebut terus berubah. Anggota keluarga PKH yang berusia antara 15-30 tahun mencapai tingkat pendidikan SMP dan SMA, yang menunjukkan meningkatnya persediaan sumber daya manusia dalam rumah tangga ini.

Meskipun sebagian besar responden mengetahui cara mengakses pinjaman, sebagian besar tidak dapat memenuhi persyaratan pemberi pinjaman atau enggan mengambil pinjaman. Kurangnya modal finansial membuat: (i) petani tidak berinvestasi untuk peralatan produksi; (ii) pemilik usaha UMKM tidak memperluas usahanya; dan (iii) calon karyawan tidak terlibat secara efektif dalam proses pencarian pekerjaan.

Meskipun sebagian besar responden tinggal relatif dekat dengan pusat-pusat perekonomian, kualitas jalan yang buruk dan pilihan transportasi yang terbatas berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk mengakses pasar dan program pencarian pekerjaan. Sebagian kecil pemilik usaha di daerah perkotaan mulai menggunakan internet untuk pemasaran online, walaupun tidak banyak yang memiliki ponsel.

Dengan tidak adanya sumber modal lain, hubungan sosial sangat penting untuk membuka akses peluang mata pencarian. Mayoritas pemilik usaha dan karyawan dari anggota keluarga PKH bergantung pada koneksi pribadi mereka untuk memasarkan produk, mencari pekerjaan, atau mengakses pinjaman informal. Namun, anggota usia kerja keluarga PKH tidak memiliki hubungan dengan orang atau kelompok yang berpengaruh. Petani dan nelayan penerima manfaat PKH, misalnya, tidak dapat mengakses program mata pencarian bagi kelompok nelayan atau kelompok petani, dan karenanya kehilangan kesempatan memperoleh pupuk bersubsidi dan input lainnya; akses ke skema bantuan pemerintah; dan saluran pemasaran yang menguntungkan. Akibatnya, sebagian besar dari mereka mengandalkan pedagang perantara untuk memperoleh akses ke peluang mata pencarian yang menguntungkan (misalnya, peluang kerja musiman, pekerjaan formal, pinjaman, dan pasar), meskipun dengan mengorbankan keuntungan kecil akibat diperas dan biaya broker/perantara yang tinggi.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan berbagai program pengembangan mata pencarian, seperti pelatihan kejuruan dan keterampilan; bantuan modal dan input bagi petani/nelayan; jasa konsultasi bisnis untuk pemilik usaha; bursa kerja dan layanan pencarian pekerjaan lainnya. Namun, hanya sebagian kecil responden yang telah mengakses program-program ini di masa lalu. Sebagian besar skema pemerintah memiliki persyaratan partisipasi (misalnya, kepemilikan tanah atau menjadi bagian dari kelompok petani/nelayan) yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga PKH. Informasi tentang skema ini juga didistribusikan secara tidak merata dan biasanya tidak menjangkau keluarga PKH yang tinggal jauh dari pusat kabupaten. Kementerian Sosial juga melaksanakan beberapa program yang dirancang khusus untuk anggota keluarga PKH, meskipun dampaknya terbatas.

Pemerintah daerah telah mengadopsi mekanisme inovatif untuk menjembatani beberapa kesenjangan ini. Misalnya, Pemerintah Kota Surakarta telah menandatangani perjanjian dengan ratusan pengusaha untuk menyediakan program pelatihan kejuruan serta mempekerjakan peserta pelatihan dengan upah minimum regional. Selain itu ada juga potensi untuk sinergi yang lebih luas di tingkat nasional. Misalnya, Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM telah menandatangani MoU, sehingga layanan usaha yang lebih luas dapat ditawarkan kepada keluarga PKH, meskipun perjanjian ini belum dilaksanakan di kabupaten tempat penelitian.

4.2 Rekomendasi

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menjelaskan strategi ketenagakerjaan yang digunakan oleh penerima manfaat perlindungan sosial sehingga pemerintah dan mitra pembangunan dapat berpikir kritis tentang cara menghubungkan dua domain tersebut secara lebih efektif. Bab ini memberikan saran praktis untuk memperkuat peluang usaha mikro dan memungkinkan akses ke pekerjaan formal. Yang pertama adalah untuk mengatasi hambatan siklus usaha keluarga PKH yang umumnya dialami oleh pemilik agribisnis dan pengelola UMKM. Mengingat bahwa tidak semua anggota keluarga PKH memiliki kapasitas atau minat untuk menjadi pengusaha, maka akan ada juga saran yang menjelaskan jalur alternatif bagi mereka yang memiliki keterampilan dan kualifikasi untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan keterampilan rendah. Hal ini sangat relevan bagi mereka yang berada dalam kelompok usia 15-30 yang memiliki pendidikan menengah ke atas dan berpotensi untuk mengubah ekonomi rumah tangga mereka melalui pekerjaan yang menguntungkan. Strategi praktis untuk mengatasi hambatan mata pencarian di antara penerima perlindungan sosial membutuhkan mekanisme koordinasi antara lembaga pelaksana di tingkat lokal serta kolaborasi antar kementerian di tingkat kebijakan.

Memperkuat Peluang Usaha Mikro

- **Memfasilitasi petani PKH untuk menghasilkan komoditas dengan potensi penghasilan lebih besar dan sesuai dengan permintaan pasar.** Saat ini sebagian besar petani PKH memiliki produktivitas terbatas dan hanya menghasilkan panen yang cukup untuk konsumsi dan berpendapatan minimal. Petani di daerah pedesaan memiliki potensi untuk menanam tanaman palawija bernilai tinggi (seperti jagung) yang membutuhkan lebih sedikit lahan dan irigasi, serta memiliki pemasok terbatas di pasar dan permintaan lokal yang besar. Memproduksi ayam dan telur puyuh di Pacitan dan membudidayakan ikan lele di Indramayu adalah contoh komoditas bernilai tinggi lainnya yang dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan di daerah pedesaan dan pesisir. Hubungan dengan pengusaha pertanian yang sukses dapat memotivasi petani dan mendukung mereka dengan pengetahuan teknis dan input yang dibutuhkan. Sebagai contoh, peternak unggas PKH di Pacitan menjelaskan bahwa mereka mempelajari perdagangan unggas dari pengusaha sukses di desa, dimana ia juga mengajari mereka keterampilan membesarkan unggas, menjual pakan ayam, dan membeli telur.
- **Menumbuhkan hubungan pasar yang lebih kuat antara keluarga PKH dan pembeli lokal.** Jejaring sosial yang terbatas dari keluarga PKH pemilik usaha, menghalangi kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan pelaku pasar. Pembeli lokal mencari untuk membeli komoditas berkualitas tinggi dan bersedia untuk terlibat langsung dengan anggota keluarga PKH pemilik usaha dan menutup keterlibatan perantara yang eksploitatif. Instansi pemerintah daerah dapat memfasilitasi MoU antara pelaku pasar dan anggota keluarga PKH pemilik usaha. Hal ini akan memungkinkan pembeli untuk mengomunikasikan persyaratan pembelian mereka kepada pemilik usaha, dan para pemilik usaha ini akan lebih cenderung menghasilkan barang sesuai preferensi pembeli. Hubungan tersebut dapat memungkinkan petani miskin untuk memaksimalkan efisiensi dan pendapatan, jika ketentuan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Karena anggota keluarga PKH pemilik usaha membutuhkan uang tunai segera untuk membiayai putaran produksi berikutnya, dan hal ini dapat menjadi tantangan bagi beberapa pembeli.
- **Memfasilitasi pengelola UMKM untuk mendapatkan izin usaha industri rumah tangga (PIRT).** Hal ini akan memberikan kesempatan bagi pemilik usaha pengolahan makanan yang miskin (yang sebagian besar adalah perempuan) secara signifikan meningkatkan basis pelanggan mereka dan dengan percaya diri menjalankan usahanya tanpa takut akan otoritas yang berwenang. Intervensi ini akan membutuhkan kolaborasi antara

Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja (baik di tingkat nasional dan lokal) untuk mencapai beberapa tujuan: memastikan bahwa proses mendapatkan izin disederhanakan bagi pemilik usaha miskin; prosesnya disosialisasikan, khususnya kepada keluarga penerima PKH; dan bahwa layanan aplikasi izin tersedia di tingkat desa sehingga mudah diakses.

- **Menyediakan intervensi tambahan untuk semua anggota keluarga PKH yang masih dalam usia kerja.** Intervensi mata pencarian PKH yang ada hanya menargetkan penerima PKH, meskipun mereka mungkin bukan titik masuk yang paling tepat. Studi ini telah menyoroti bahwa banyak wanita dibebani dengan tugas perawatan tambahan, dan anggota rumah tangga lain mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengelola usaha. Sebagian besar anggota usia kerja PKH yang menganggur termasuk dalam kelompok usia 15-30 dan hampir setengahnya telah memperoleh pendidikan SMP atau SMA, yang menandakan keterampilan melek huruf dan berhitung yang lebih kuat daripada orang tua mereka. Mereka juga berpotensi lebih terbuka untuk memanfaatkan teknologi (smartphone) untuk tujuan usaha dan menunjukkan perilaku pengambilan risiko yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui peluang mata pencarian yang menguntungkan, ada kebutuhan untuk memasang jaring lebih luas bagi semua anggota usia kerja dalam keluarga.
- **Mereformasi KUBE PKH menjadi suatu percontohan inklusi produktif untuk keluarga PKH dengan potensi dan minat kewirausahaan yang besar (lihat Lampiran 4 untuk penjelasan rinci).** KUBE PKH adalah intervensi mata pencarian utama yang tersedia untuk keluarga PKH, meskipun partisipasi, dampak, dan keberlanjutan program ini terbatas. Mengikuti praktik terbaik internasional, direkomendasikan agar Kementerian Sosial mendesain ulang KUBE PKH menjadi program inklusi produktif sehingga anggota keluarga PKH dengan kapasitas kewirausahaan terlibat dalam program mata pencarian yang berkelanjutan (**lihat Lampiran 4**). Model inklusi produktif telah diterapkan di lebih dari 30 negara dengan dampak ekonomi yang signifikan, dan telah dikaitkan dengan program bantuan tunai bersyarat nasional, seperti di Kolombia, Paraguay, Ethiopia, dan Filipina.

Sebagai bagian dari skema ini, keluarga PKH dengan kapasitas wirausaha. Mereka belum tentu penerima PKH, karena penelitian menunjukkan bahwa jika intervensi wirausaha diberikan kepada penerima manfaat PKH akan menimbulkan beban bagi perempuan yang harus memikul tanggung jawab tambahan. Selain itu, kaum muda mungkin menjadi target yang lebih baik untuk skema usaha mengingat kemampuan baca-tulis, berhitung, keterbukaan terhadap peluang baru dan penggunaan teknologi (IZA World of Labour, 2018). Para calon wirausahawan ini akan menerima uang tunai tambahan untuk investasi usahanya, membangun hubungan dengan pembeli sektor swasta, dan adanya sesi rutin 'pelatihan usaha' dari fasilitator usaha selama dua tahun. Fasilitator usaha selanjutnya dapat menghubungkan usaha yang menguntungkan dengan layanan keuangan mikro pada tahun ketiga untuk memastikan keberlanjutan.

Untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan efisiensi, fasilitator PLUT dapat dimanfaatkan sebagai fasilitator usaha. Fasilitator PLUT memiliki kapasitas untuk melakukan pendampingan khusus di berbagai tahap siklus usaha, dan juga dapat melatih fasilitator KUBE PKH untuk menjadi pendamping usaha yang lebih efektif. Intervensi 'pemberian modal dan pendampingan' ini akan mengatasi tantangan utama yang dihadapi para pemilik usaha dari anggota keluarga PKH, termasuk modal yang tidak mencukupi; keterampilan usaha dan pembukuan yang terbatas; dan kurangnya pengalaman dalam membangun hubungan pasar. Implementasi yang sukses akan membutuhkan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian fasilitator PLUT di tingkat daerah. Lihat **Lampiran 4** untuk rincian lebih lanjut tentang uji coba inklusi produktif PKH.

Membangun Kesempatan Pekerjaan di Sektor Formal

- **Memfasilitasi partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar melalui penyediaan pusat penitipan anak.** Hanya 30% perempuan dalam keluarga PKH yang terlibat dalam pekerjaan berupah karena kebutuhan mereka pekerjaan yang fleksibel yang tidak ditawarkan oleh sebagian besar pemberi kerja. Studi ini juga menunjukkan bahwa banyak wanita dalam keluarga PKH didorong untuk tetap di rumah sampai anak-anak mereka masuk usia sekolah, di mana pada saat itu mungkin sulit untuk kembali dalam sektor pekerjaan (khususnya untuk pekerja wanita berketerampilan tinggi dan berpendidikan). Menurut laporan ODI baru-baru ini (2019), “mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan berarti memprioritaskan pengasuhan anak sebagai bagian dari infrastruktur publik,” dan dengan demikian, negara-negara seperti India, Meksiko, dan Afrika Selatan menyediakan pusat-pusat pengasuhan anak usia dini (biasanya untuk anak-anak dari 6 bulan hingga 6 tahun) untuk mendorong perkembangan manusia, memungkinkan para ibu untuk kembali bekerja, dan mengurangi kemungkinan saudara kandung yang lebih tua dikeluarkan dari sekolah untuk merawat adik kandung. Meskipun rincian rekomendasi ini melampaui kepentingan penelitian ini, akan tetapi ada kebutuhan lokal yang kuat untuk mengimplementasikan layanan penitipan anak sehingga perempuan yang rentan, seperti penerima PKH, dapat berpartisipasi dalam angkatan kerja jika mereka menginginkannya.
- **Memetakan kebutuhan pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja bagi anggota keluarga PKH dengan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja.** Dinas Tenaga Kerja di Surakarta telah mulai mengembangkan database pelatihan dan kebutuhan penempatan pemberi kerja bagi mereka yang saat ini belum bekerja. Pengumpulan data dilakukan oleh desa, dengan tujuan menyediakan layanan pencarian kerja lokal yang sesuai dengan minat dari pencari kerja. Jika ada inisiatif seperti itu, fasilitator usaha PKH atau fasilitator PLUT yang ditugaskan dapat memainkan peran dalam memetakan informasi ini untuk keluarga PKH dan memasukkannya ke dalam sistem tersebut.
- **Mengatur mekanisme koordinasi antar kementerian sehingga penerima manfaat perlindungan sosial dapat mengajukan kartu pra-kerja.** Ketika pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja, perlu memastikan bahwa penerima perlindungan sosial memiliki akses ke program tersebut. Skema subsidi menawarkan pelatihan teknis dan sertifikasi untuk memberikan para lulusan baru keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan mereka saat ini, serta memberikan dukungan saat pencarian pekerjaan. MoU antara Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja akan membantu memastikan bahwa segmen penduduk termiskin mendapat manfaat dari kebijakan baru ini.
- **Seperti yang dipraktikkan di Surakarta, pemerintah daerah dapat menilai subsektor yang tumbuh di daerahnya dan mengidentifikasi keterampilan yang sangat diminati oleh pengusaha setempat.** Mereka kemudian dapat menawarkan pelatihan keterampilan dan layanan ini (bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan kualitas) tanpa prasyarat bagi peserta. Dengan membuat perjanjian dengan calon pemberi kerja, pemerintah daerah dapat membantu peserta pelatihan mendapatkan pekerjaan formal dengan upah sesuai dengan standar upah minimum regional. Akhirnya, Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk menugaskan fasilitator PLUT menyebarkan informasi tentang peluang ini kepada keluarga PKH. Akan tetapi, tentunya mekanisme semacam itu membutuhkan kolaborasi antar kementerian di tingkat nasional dan koordinasi lintas lembaga di tingkat lokal.

- **Fasilitator PKH dapat berperan dalam memastikan bahwa keluarga PKH diberitahu tentang program ketenagakerjaan di daerah tersebut.** Mereka dapat memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi tentang bursa kerja dan program terkait pekerjaan lainnya kepada keluarga PKH, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi. Di Bandung Barat ada permintaan kuat untuk tenaga kerja berketerampilan tinggi dari pabrik-pabrik tekstil besar dan tenaga kerja berketerampilan rendah dari perusahaan-perusahaan tekstil kecil. Meskipun peraturan pameran pekerjaan dilakukan, keluarga PKH jarang terinformasikan. Nota Kesepahaman antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial di daerah akan membantu memastikan bahwa pelaksana program PKH secara rutin memperbarui informasi mengenai program ketenagakerjaan yang ditawarkan di daerah tersebut, dan dapat membantu mensubsidi biaya bagi anggota keluarga PKH agar dapat memanfaatkan layanan ini.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

PROSES PEMILIHAN KABUPATEN/ KOTA DAN DESA/KELURAHAN LOKASI PENELITIAN

Proses penentuan lokasi studi dilakukan dengan 4 tahap yaitu:

- i. **Tahap pertama: MAHKOTA menetapkan lima indikator dengan setiap indikator memiliki bobot yang berbeda.** Indikator tersebut terdiri dari: (i) Jumlah penduduk miskin (10 persen); (ii) Persentase penduduk miskin (10 persen); (iii) Persentase rumah tangga miskin yang menerima program Beras Sejahtera (Rastra) (10 persen); (iv) Persentase penduduk miskin di sektor perekonomian terkait (50 persen); dan (v) Pertumbuhan ekonomi (20 persen). Data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2017 dari BPS. Dari hasil pembobotan, dipilih sepuluh kabupaten/kota dengan skor tertinggi per tipologi sasaran, yaitu daerah pertanian, non-pertanian, dan industrial (didekati melalui persentase pengangguran terbuka dan bukan angkatan kerja).
- ii. **Tahap kedua: Beranjak dari 30 kabupaten/kota hasil penilaian MAHKOTA, SMERU memberikan informasi tambahan.** Ini termasuk: (i) ketenagakerjaan dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2017; (ii) persentase KPM PKH dari Susenas 2018; dan (iii) jumlah industri medium dan besar dari survei industri (tahun publikasi berbeda-beda tergantung provinsi) dari BPS. Pada tahap ini, SMERU memilih empat kabupaten/kota yang dianggap paling sesuai dengan tipologi yang menjadi sasaran MAHKOTA.
- iii. **Tahap ketiga: SMERU menggunakan data dari BDT, perincian tentang keluarga penerima manfaat PKH, keberadaan program Kelompok Usaha Bersama PKH (KUBE PKH) di daerah yang bersangkutan, dan e-Warong KUBE PKH yang disediakan oleh Kemensos untuk menganalisis berbagai jenis wilayah dan sektor mata pencarian masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.** Pada tahap ini dihasilkan kandidat satu kecamatan sampel pada tiap kabupaten/kota dan empat desa/kelurahan per kecamatan sampel yang ditetapkan berdasarkan proporsi masyarakat terbanyak yang bekerja pada sektor utama atau tipe mata pencarian yang dominan di masing-masing daerah. Tahap ini dilaksanakan oleh tim peneliti kuantitatif sebelum kegiatan turun lapangan.
- iv. **Tahap keempat: pada awal kegiatan pengumpulan data di lapangan, tim peneliti kualitatif SMERU mewawancarai Dinas Sosial dan pelaksana PKH (PPKH) di tingkat kabupaten/kota.** Wawancara bertujuan untuk mengonfirmasi kesesuaian kandidat kecamatan dan desa/kelurahan sampel hasil analisis kuantitatif pada tahap ketiga dengan kondisi riil di lapangan. Tim peneliti kualitatif SMERU selanjutnya menetapkan dua desa/kelurahan sampel dari tiap kecamatan sampel.

Tabel A1. Dasar Pemikiran Pemilihan Lokasi Studi

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Alasan Pemilihan
Jawa Barat	Indramayu	Cantigi	I1, I2	<ul style="list-style-type: none"> • Indramayu adalah daerah perdesaan, terletak di pantai utara Pulau Jawa. • Indramayu terkenal sebagai produsen utama beras dan perikanan. Indramayu juga dikenal karena kemiskinan latennya, pekerja migran perempuan, dan pernikahan anak. • Berdasarkan Susenas 2018, ada 51.410 (9,71%) penerima PKH di Indramayu. Pada Desa I1 terdapat 345 penerima PKH dan di Desa I2 terdapat 167 penerima PKH. • Berdasarkan Sakernas 2017, pangsa pekerjaan di sektor perikanan adalah 5,7 persen, yang menempati peringkat keempat terbanyak di Pulau Jawa. Pada Desa I1 terdapat 10,98 persen pekerja di sektor perikanan dan 21,14 persen pekerja di budi daya perikanan. • Terdapat program KUBE PKH di Desa I1 dan I2
Jawa Barat	Bandung Barat	Batujajar	B1, B2	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut BPS, terdapat 179 industri besar dan menengah pada 2014. • Berdasarkan Susenas 2018, terdapat 49.433 (10,7%) penerima PKH. Di Desa B1 terdapat 429 penerima PKH, sedangkan di Desa B2 terdapat 427 penerima PKH. • Berdasarkan Sakernas 2017, terdapat 16,6% pekerja yang bekerja di industri manufaktur. Tingkat pengangguran 9,33%. Di Desa B1 terdapat 22,3% pekerja yang bekerja di industri manufaktur, sedangkan di Desa B2 terdapat 27,4% yang bekerja di industri yang sama. • Terdapat KUBE PKH di Desa B1.

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Alasan Pemilihan
Jawa Tengah	Surakarta	Jebres	S1, S2	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk miskin yang bekerja di sektor non-pertanian masuk ke dalam subsektor dari rantai pasokan industri atau bisnis mikro informal. • Perwakilan Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Semarang dan Solo) secara aktif mempromosikan pengembangan usaha kecil dan menengah. • Berdasarkan Susenas 2018, terdapat 10.116 (6,7%) penerima PKH. Sebanyak 165 penerima PKH berada di Kelurahan S1 dan 1.172 penerima PKH di Kelurahan S2. • Berdasarkan Sakernas 2017, sebanyak 68,1% pekerja berada di sektor informal. Terdapat 21,56% pekerja di sektor manufaktur di Kelurahan S1 dan 32,44% di Kelurahan S2. • Terdapat e-Warong KUBE-PKH di Kelurahan S1 (sejak 2017) dan Kelurahan S2 (sejak 2018).
Jawa Timur	Pacitan	Tegalombo	P1, P2	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum, Pacitan adalah daerah perdesaan dengan wilayah pesisir dan dataran tinggi. • Produk pertanian Pacitan meliputi beras, tanaman, hortikultura, dan juga ternak. Koridor selatan Pulau Jawa melewati kabupaten ini, menghubungkannya dengan Surakarta di Jawa Tengah, dan dengan Ponorogo di Jawa Timur. • Berdasarkan Susenas 2018, terdapat 17.385 (10,5%) penerima PKH. Di Desa P1 terdapat 542 penerima PKH, sedangkan di Desa P2 terdapat 522 penerima PKH. • Berdasarkan Sakernas 2017, tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 79,48%, dan pangsa pekerjaan di sektor pertanian sebesar 56,2%. Di Desa P1 terdapat 67,96% pekerja pada subsektor tanaman pangan, sedangkan di Desa P2 jumlahnya 44,09%. • Di antara semua kabupaten di Pulau Jawa, Pacitan berada di peringkat lima terbanyak untuk jumlah pekerjaan di sektor pertanian tanaman pangan (Sakernas, 2015).

Sumber: Analisis data kuantitatif (2019)

LAMPIRAN 2:

GAMBARAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN DESA/KELURAHAN STUDI

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu berada di pesisir utara Pulau Jawa dengan terdiri dari 31 kecamatan dan 317 desa/kelurahan (BPS Kabupaten Indramayu, 2018a). Berdasarkan Susenas 2018, penduduk Indramayu berjumlah 1.715.431 jiwa. Sebanyak 40,65 persen merupakan penduduk usia dewasa (31-59 tahun) dengan jenis kelamin sebagian besar (41,37 persen) perempuan. Sebagian besar penduduk usia dewasa (70,39 persen) menyelesaikan pendidikan setara SD atau belum memiliki ijazah sama sekali.

Indramayu merupakan lumbung padi Jawa Barat sekaligus nasional.³⁶ Produksi padi di Indramayu setiap tahun dapat mencapai sekitar 1,7 juta ton Gabah Kering Panen (GKP). Hanya 0,5 juta ton GKP digunakan untuk konsumsi lokal, sisanya untuk penyediaan pangan nasional. Produksi padi didukung oleh luasan lahan sawah yang merupakan paling luas di antara seluruh kabupaten di Jawa Barat (Balittanah, 2018). Sebanyak 56 persen dari 209.942 hektare luas wilayah Indramayu berupa sawah (BPS, 2018a). Indramayu juga merupakan daerah penghasil aneka produk kelautan dan perikanan, seperti ikan segar, ikan asap, ikan/cumi asin, garam, rumput laut, terasi, kerupuk udang/ikan, dan lain-lain. Indramayu adalah pemasok 40 persen kebutuhan ikan di provinsi Jawa Barat. Jumlah nelayan Indramayu sebanyak 40.665 rumah tangga perikanan (RTP), yang terdiri dari 6.067 RTP (pemilik) dan 34.598 RTP (buruh) (BPS Kabupaten Indramayu, 2018a). Indramayu merupakan kabupaten/kota pemasok pekerja migran Indonesia (PMI)³⁷ terbanyak di Indonesia. Jumlah PMI dari Indramayu mencapai 17.658 orang pada 2017 dan 22.144 orang pada 2018 (BNP2TKI, 2019).

Lokasi penelitian di Indramayu adalah Kecamatan Cantigi. Mata pencarian sebagian besar masyarakat Cantigi adalah petani, buruh tani, nelayan, pedagang, dan swasta (BPS Kabupaten Indramayu, 2018b). Ada penduduk yang bekerja sebagai migran di dalam dan luar negeri. Potensi perikanan dan kelautan terdiri dari perikanan tangkap (laut), perikanan budi daya (air payau), dan pengolahan hasil perikanan. Cantigi merupakan tempat bagi sebagian besar penggunaan alat tangkap ikan tradisional (BPS Kabupaten Indramayu, 2018a). Desa studi I1 merupakan desa paling luas dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Cantigi. Di kedua desa studi (Desa I1 dan Desa I2), sektor mata pencarian yang dominan ditekuni masyarakat adalah pertanian pangan dan perikanan. Hasil pertanian pangan dan perikanan umumnya dijual kepada pedagang pengumpul di desa dan sekitarnya. Tidak ada pasar di kedua desa tersebut, namun terdapat beberapa kios, toko kelontong, dan warung makanan-minuman. Pasar yang biasa dikunjungi masyarakat berada di desa lain pada kecamatan yang sama dan kecamatan lain. Untuk transportasi lokal, masyarakat memanfaatkan kendaraan pribadi (mobil, sepeda motor pribadi). Kendaraan umum tersedia berdasarkan pesanan berupa ojek sepeda motor untuk transportasi lokal dan mobil travel untuk transportasi ke Jakarta dan sekitarnya.

³⁶ Di tingkat nasional, Jawa Barat adalah produsen padi terbesar kedua setelah Jawa Timur.

³⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, definisi pekerja migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia.

Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat dibentuk berdasarkan hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung pada 2007. Bandung Barat memiliki keunggulan kompetitif sebagai lokasi kegiatan industri karena merupakan bagian dari Metropolitan Bandung Raya dan dilalui jalan tol, jalur rel kereta, dan jalur kereta cepat. Meski demikian, Bandung Barat merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi campuran antara pertanian dan industri. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi utama yang ditekuni oleh mayoritas penduduk Bandung Barat, disusul oleh sektor industri dan sektor perdagangan. Namun, kontribusi sektor pertanian (13 persen pada 2016) pada PDRB tidak lebih besar dibanding sektor industri (40 persen pada 2016) dan sektor perdagangan (14 persen pada 2016). Padahal, aktivitas sektor industri sebagai kontributor ekonomi terbesar hanya terkonsentrasi di tiga kecamatan di wilayah tengah Bandung Barat, yaitu Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, dan Kecamatan Ngamprah.

Sebagian besar wilayah Bandung Barat kurang menguntungkan untuk pengembangan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi secara masif dilihat dari kondisi geografisnya. Hal tersebut didasarkan pada begitu banyaknya wilayah yang berupa cekungan, berbukit-bukit, rawan bencana alam tanah longsor, dan ancaman aktivitas Patahan Lembang. Di Bandung Barat, hanya Kecamatan Batujajar yang memiliki lereng datar dengan kemiringan 0-8 persen terluas sebesar 4.899 hektare.

Desa B1 merupakan desa terluas di Kecamatan Batujajar dengan luas mencapai 7,8 kilometer persegi atau 25 persen dari luas kecamatan. Guna lahan di Desa B1 terdiri dari lahan persawahan sebagai penggunaan terbesar, permukiman, dan industri berupa pabrik. Delineasi wilayahnya mencakup perairan Waduk Saguling yang membelah Desa B1 menjadi dua bagian, yaitu wilayah kecil dan besar. Wilayah kecil memiliki akses jalan yang baik serta menjadi lokasi beberapa pabrik. Dalam hal kependudukan, Desa B1 memiliki komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang seimbang dengan jumlah mencapai 11.287 jiwa. Penduduk berusia di bawah 30 tahun rata-rata telah mencapai jenjang pendidikan SMA. Sementara, mereka yang berusia lebih dari 35 tahun sebatas SD/SMP). Mata pencarian yang umum dijalani oleh penduduk desa ini adalah buruh tani, buruh industri, dan pedagang.

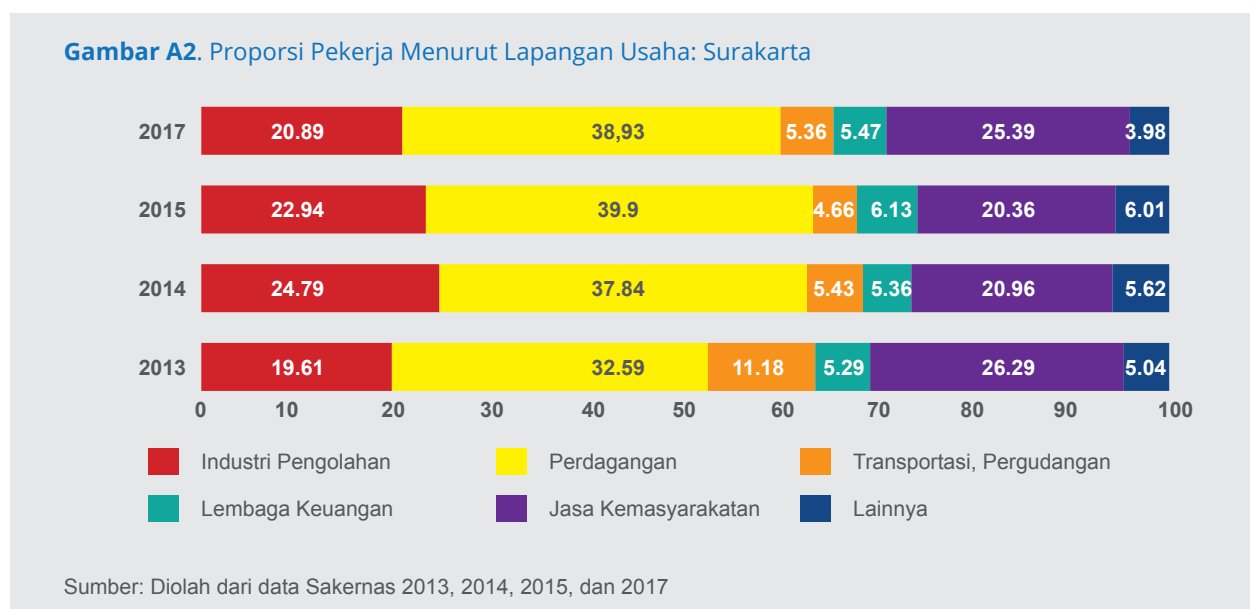
Desa B2 memiliki luasan sebesar 5,72 kilometer persegi. Topografi desa ini adalah kombinasi antara dataran dan bukit-bukit kecil. Guna lahan yang dominan pada desa ini adalah permukiman dan persawahan. Dalam penduduk, Desa B2 memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.010 jiwa dengan komposisi 5.791 penduduk laki-laki dan 6.219 penduduk perempuan. Angka ketergantungan di wilayah ini sebesar 48, yang berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung 48 penduduk tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Mata pencarian yang umum bagi masyarakat di desa ini adalah buruh tani, pedagang (buah-buahan dan olahan makanan), serta buruh serabutan.

Kota Surakarta

Kota Surakarta terbagi ke dalam lima kecamatan. Ibu kota kecamatan studi berjarak 3,5 kilometer dari pusat kota. Kecamatan studi merupakan kecamatan dengan ukuran luas terbesar kedua atau meliputi sekitar 28 persen luas wilayah Kota Surakarta. Kondisi jalan dan akses transportasi umum yang sangat baik menjadi peluang bagi kemudahan mobilitas masyarakat (termasuk KPM PKH) di kedua kelurahan studi. PKH diterapkan di Surakarta sejak 2015, sedangkan *e-Warong* mulai ada sejak 2016. Surakarta merupakan satu-satunya wilayah studi yang memiliki *e-Warong*.

Tiga lapangan usaha di Surakarta dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah perdagangan, industri pengolahan, dan jasa kemasyarakatan (**Tabel 4**). Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah (i)

dorongan Pemerintah Kota Surakarta agar masyarakat memiliki usaha sendiri, seperti berdagang atau menjadi perajin industri, daripada bekerja pada orang lain; (ii) Surakarta sebagai destinasi wisata budaya/sejarah dan wisata birokrasi (MICE); (iii) kebiasaan masyarakat yang gemar jajan hingga tengah malam; dan (iv) pemeliharaan sentra-sentra industri sebagai salah satu sumber mata pencarian masyarakat. Untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat, Pemerintah Kota Surakarta menggelar beberapa upaya, seperti merevitalisasi pasar (merenovasi pasar lama dan membangun pasar baru), menyediakan *shelter* pedagang kaki lima (PKL), memberikan berbagai pelatihan usaha/ekonomi kreatif, dan menyediakan berbagai ruang promosi UKM dan industri kecil menengah (IKM).



Berdasarkan data Susenas 2018, lebih dari setengah penduduk dewasa di Surakarta memiliki ijazah di atas SMP/ sederajat dan mayoritas pemudanya (16-30 tahun) memiliki pendidikan tinggi minimal SMA/ sederajat (71,1 persen). Sementara itu, lebih dari setengah penduduknya (72,5 persen) berusia produktif (15-64 tahun). Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta berada di bawah rata-rata nasional (5,5 persen), khususnya pada 2017, dengan TPT perempuan 4,5 persen dan TPT laki-laki 4,4 persen (Sakernas, 2017). Meskipun demikian, tingkat pengangguran usia muda (16-30 tahun) pada 2017 mencapai 53,24 persen. Beberapa karakteristik pekerja di Surakarta pada 2017 adalah 66,6 persen merupakan kelompok usia dewasa (31-59 tahun), 66,7 persen memiliki ijazah minimal SMP/ sederajat, dan 68,1 persen bekerja di sektor informal (Sakernas, 2017). Salah satu jenis pekerjaan di sektor informal yang paling banyak dijalani masyarakat adalah PKL. Berdasarkan jenis usahanya, sebanyak 45,8 persen PKL di Surakarta berdagang makanan dan minuman (BPS Kota Surakarta, 2018: 246).

Kelurahan S1 memiliki luas wilayah 37,3 hektare yang terbagi ke dalam 10 RW dan 35 RT. Kelurahan ini berada dekat dengan pusat kota dan Stasiun Jebres dengan jarak ke ibu kota kecamatan 1,4 kilometer. Di Kelurahan S1 terdapat tiga pasar tradisional dan beberapa toko skala besar. Di kelurahan ini juga terdapat rusunawa. Secara umum, kontur wilayah Kelurahan S1 relatif datar, seluruh jalan permukiman dalam kondisi baik, dan akses transportasi umum sangat mudah. Kelurahan S1 memiliki 4.891 penduduk, 1.612 kepala keluarga (KK), dan 165 KPM PKH. Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat minimal SMA/ sederajat dengan mata pencarian masyarakat umum dan rumah tangga miskin adalah wiraswasta (berusaha sendiri) dan pedagang.

Kelurahan S2 memiliki luas wilayah 532,9 hektare yang terbagi ke dalam 39 RW dan 191 RT. Kelurahan ini berada di daerah pinggiran kota yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Jarak Kelurahan S2 ke ibu kota kecamatan mencapai 3 kilometer. Di Kelurahan S2, terdapat dua pasar tradisional dan dua supermarket/

swalayan. Di kelurahan ini juga terdapat beberapa sentra industri, pabrik plastik, dan tempat pembuangan akhir Kota Surakarta. Secara umum, kontur wilayah Kelurahan S2 adalah datar dan berbukit, seluruh jalan permukiman dalam kondisi baik, dan akses transportasi umum sangat mudah. Kelurahan S2 memiliki 51.291 penduduk, 15.855 KK, dan 1.172 KPM PKH. Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat minimal SMA/ sederajat. Mata pencarian masyarakat umum adalah wiraswasta (berusaha sendiri), PNS/TNI/Polri, dan pedagang; sedangkan mata pencarian rumah tangga miskin adalah wiraswasta (misalnya perajin), pedagang, dan pekerja pabrik.

Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur dengan topografi wilayah pegunungan dan perbukitan. Luas tanah datar yang hanya mencakup 4 persen dari luas wilayah Pacitan³⁸ menandakan bahwa di Pacitan cukup sulit untuk mengembangkan sektor pertanian. Namun berdasarkan data Susenas tahun 2017 sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan di kabupaten ini, disusul dengan perdagangan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Pacitan berencana untuk fokus pada tiga sektor, yaitu pariwisata, pertanian, dan industri kelautan.

Pacitan cenderung rentan terhadap bencana longsor dan banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selama 2016-2019, bencana longsor terjadi 21 kali, sedangkan banjir terjadi delapan kali dari 36 kejadian bencana alam.³⁹ Secara spesifik dalam setiap tahunnya, bencana tanah longsor menjadi bencana alam yang paling sering terjadi dan berikutnya adalah bencana banjir (BNPB, 2019). Hal ini turut berpotensi memengaruhi pola kehidupan masyarakat Pacitan, terutama di titik-titik tertentu yang rawan bencana longsor, seperti Kecamatan Tegalombo dan Punung (RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021).

Berdasarkan data Susenas (2018), penduduk berusia produktif (15-64 tahun) di Pacitan berjumlah 67,19 persen penduduk. Dalam hal ini, mayoritas pemuda di Pacitan memiliki tingkat pendidikan terakhir SMP (42,95 persen) dan SMA (42,83 persen). Adapun mayoritas penduduk usia dewasa dan lansia memiliki tingkat pendidikan terakhir SD/ sederajat atau belum memiliki ijazah sama sekali (SD ke bawah). Untuk penduduk usia dewasa (31-59 tahun), persentase penduduk dengan tingkat pendidikan terakhir SD ke bawah dikenyam 56,27 persen penduduk usia dewasa. Untuk penduduk usia lansia, persentase tersebut meningkat menjadi 93,46 persen memiliki tingkat pendidikan terakhir SD ke bawah.

Melihat secara lebih rinci pada karakteristik penduduk yang bekerja, berdasarkan Sakernas 2017, data menunjukkan bahwa 57,13 persen pekerja memiliki pendidikan terakhir SD ke bawah. Pekerja di Pacitan pada umumnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan (56,21 persen). Jika melihat status ketenagakerjaannya, persentase yang cukup tinggi ditemukan pada pekerja yang memiliki status berusaha (39,83 persen) dan pekerja keluarga tidak dibayar (30,71 persen).

Desa P1 memiliki luas wilayah 2,212 hektare yang terdiri atas 28,3 persen lahan sawah, 62,7 persen lahan kering, dan 9 persen sisanya mencakup lahan perkebunan, fasilitas umum, serta hutan. Mata pencarian yang umum dikerjakan di Desa P1 adalah bertani dan ternak rumahan. Kedua pekerjaan tersebut dikerjakan secara simultan, di mana petani mengurus tanaman dan hewan ternak. Pusat kegiatan ekonomi terdekat adalah sebuah pasar besar di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari Desa P1. Pusat Kecamatan Tegalombo berjarak sekitar 18 kilometer.

Desa P2 merupakan desa yang terletak di atas wilayah perbukitan di Pacitan. Berdasarkan data Profil Desa

³⁸ Tanah datar dikategorikan dalam kelas kelerengan 0-5 persen (RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021).

³⁹ Jumlah kejadian secara kumulatif pada rentang waktu tersebut.

2017, dengan luas wilayah 1,585 hektare, Desa P2 hanya memiliki 4,8 persen lahan sawah, 58,4 persen lahan kering, 28,5 persen lahan perkebunan, dan 8 persen sisanya lahan fasilitas umum. Mata pencarian yang umum dikerjakan di Desa P2 cenderung sama dengan Desa P1, yaitu petani dan ternak rumahan. Kedua pekerjaan itu umumnya dikerjakan secara simultan atau bersamaan, dengan petani juga mengurus ternak rumahan. Selain itu, hasil kualitatif menemukan bahwa di Desa P2 masyarakatnya cenderung untuk bekerja merantau ke kota/kabupaten lain, seperti Ponorogo atau Surabaya dibandingkan dengan angkatan kerja di Desa P1. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi 12 kilometer dari kelurahan Tulakan, lebih jauh dari pasar dari desa P1 di Gemaharjo.

LAMPIRAN 3:

PROSEDUR PEMILIHAN SAMPEL KELUARGA PENERIMA PKH

Langkah yang dilakukan dalam pemilihan sampel keluarga penerima PKH adalah sebagai berikut:

Daftar keluarga penerima manfaat (KPM) PKH disusun sesuai alamat dan diberi nomor urut. Peneliti kemudian menghitung jarak antar setiap nomor urut yang diperoleh dari proporsi jumlah sampel 25 per desa/kelurahan, terhadap total KPM PKH di desa tersebut. Selanjutnya, peneliti menggunakan fungsi angka random di Microsoft Excel untuk menentukan nomor urut KPM PKH pertama yang menjadi sampel. Dengan metode ini, KPM PKH terpilih tersebar di hampir seluruh dusun/kampung di desa/kelurahan tersebut. Di setiap kecamatan, dua desa/kelurahan terpilih masing-masing akan memiliki 25 sampel KPM PKH, sehingga totalnya menjadi 50 KPM PKH per kabupaten/kota.

Berdasarkan daftar 25 KPM PKH terpilih di setiap desa/kelurahan, peneliti lalu bertemu dengan perwakilan dari kantor atau ketua kelompok KPM untuk melakukan validasi. Proses validasi bertujuan memastikan apakah nama sampel KPM PKH betul sesuai dengan yang terdaftar, masih aktif menerima PKH, masih tinggal di desa/kelurahan tersebut dan alamat rumahnya tepat, serta memastikan bahwa ada anggota keluarga yang berusia kerja. Pada saat pengumpulan data, enumerator kembali melakukan validasi kesesuaian KPM untuk studi ini. Bila KPM sampel tidak memenuhi kelayakan, akan diganti oleh KPM lain dari daftar KPM sampel yang sudah disiapkan peneliti.

Kriteria yang divalidasi ulang oleh enumerator adalah sebagai berikut:

1. KPM sampel masih aktif menerima PKH dan memenuhi syarat untuk menerima PKH. Prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah KPM tersebut aktif, yaitu:
 - Apakah KPM menerima undangan pertemuan pada saat pencairan dana terakhir?
 - Apakah KPM memiliki anggota keluarga, berdasarkan kartu keluarga (KK), yang menjadi faktor penentu yang membuat keluarga menjadi KPM PKH (Sebagai contoh, terdapat anggota keluarga yang hamil, anak bersekolah hingga tingkat SMA, atau lansia)?
 - Apakah KPM diundang/tidak diundang untuk menghadiri sesi family development session (FDS)/ Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2)?
2. KPM sampel menunjukkan KK milik anggota keluarga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan PKH.
3. KPM sampel setidaknya memiliki seorang anggota keluarga berusia kerja (15-59 tahun) dan berstatus kerja yang terdaftar pada KK.

4. Memenuhi syarat minimal keluarga sanggup untuk diwawancarai, yakni apakah anggota keluarga yang berusia kerja dapat diwawancarai secara langsung atau melalui telepon. Berikut daftar prioritasnya:
- 100 persen dari semua anggota keluarga berusia 15-59 tahun yang bekerja dapat diwawancarai secara langsung atau melalui telepon.
 - 50 persen dari semua anggota keluarga berusia 15-59 tahun bekerja dan dapat diwawancarai secara langsung atau melalui telepon dan sisanya dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang ada. Anggota keluarga yang mewakili tersebut paling tidak berusia 21 tahun, berada dalam KK yang sama, tinggal di rumah dan memahami situasi keluarga, dan dapat menjawab aktivitas sehari-hari selama seminggu yang lalu, jenis pekerjaan/usaha yang dilakukan, aktivitas lain—jika ada—selama tiga bulan terakhir, dan sebagainya, terhadap anggota keluarga yang diwakilkan.
 - Apabila kedua kriteria tidak dapat dipenuhi, perlu dipertimbangkan untuk mengganti KPM sampel yang bersangkutan.

LAMPIRAN 4:

RINCIAN MENGENAI PILOT INKLUSI PRODUKTIF

Pemerintah semakin menghubungkan inklusi produktif dengan program bantuan langsung tunai bersyarat nasional, dan meskipun bukti mengenai hal ini masih terbatas, evaluasi dampak baru-baru ini dari pemerintah yang mengimplementasikan skema inklusi produktif di Paraguay dan Kolombia menunjukkan peningkatan jumlah jam kerja sebesar 2 persen per tahun dan peningkatan harian 84 persen; peningkatan pendapatan rumah tangga sekitar \$ 20 USD sebulan; peningkatan 10 persen di tabungan bulanan, serta pengurangan signifikan dalam kerawanan pangan. Kedua program ini juga menyoroti peningkatan yang signifikan dalam aspirasi ekonomi dan tingkat kebahagiaan pada penerima manfaat.⁴⁰

Sejumlah pelajaran penting yang dapat dipertimbangkan pemerintah dari implementasi program inklusi produktif dan program CCT meliputi:

Pemberian modal usaha awal dinilai lebih hemat biaya (*cost-effective*) dan secara administratif lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan transfer aset barang. Evaluasi proses transfer aset dalam bentuk barang, seperti ternak atau perdagangan kecil, menunjukkan model ini secara administratif lebih mahal; mengarah pada kejenuhan pasar karena semua orang terlibat dalam usaha yang sama, sedangkan tempat pemasarannya terbatas; dan pasokan pasar terbatas—aset produktif tidak cukup untuk diberikan kepada semua orang. Ini juga membatasi kebebasan peserta untuk memilih.⁴¹ Modal usaha awal memberikan fleksibilitas dan otonomi bagi peserta/penerima bantuan dalam memilih usaha yang paling sesuai dengan kondisi mereka.⁴²

Dukungan bagi individu lebih efektif daripada dukungan berbasis kelompok. Model usaha kelompok bergantung pada asumsi bahwa semua peserta memiliki visi yang sama, dapat menginvestasikan jumlah sumber daya yang sama (waktu dan modal), dan akan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil bersama. Sebagaimana dibuktikan oleh KUBE PKH, usaha yang dijalankan secara berkelompok sangat sulit berkembang atau bertahan dalam jangka lama, biasanya karena perbedaan visi dari waktu ke waktu. Selain itu, peserta memberikan upaya yang berbeda dalam usaha bersama ini dan kurangnya pembukuan kelompok serta manajemen bisnis. Pelaku usaha lebih suka bekerja secara mandiri, meskipun bukti menunjukkan bahwa kelompok usaha yang menghasilkan hal yang sama sering memilih untuk bekerja sama guna meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan.⁴³

⁴⁰ Fundacion Capital, 2019

⁴¹ Huda, 2015; Huda dan Sengupta, 2014.

⁴² Pemerintah di Amerika Latin mentransfer US\$350-500 ke rekening bank individu untuk diinvestasikan di usaha pilihan mereka.

⁴³ Rincon, 2018.

Metode *e-learning* adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa fasilitator usaha memberikan pelatihan standar dan berkualitas tinggi kepada peserta. Ketika pemerintah memiliki skema program dengan skala yang berpotensi mencapai ratusan ribu penerima manfaat, merekrut dan melatih fasilitator usaha yang berkualitas berdampak signifikan terhadap kualitas implementasi. Dengan dukungan dari Fundación Capital, sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah untuk mengimplementasikan skema inklusi produktif berskala besar, memanfaatkan komputer tabel yang dilengkapi dengan modul tentang manajemen usaha, pendidikan keuangan, dan pembelajaran *peer-to-peer*. Pendekatan ini terbukti mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan peserta untuk belajar sesuai dengan ketersediaan waktu mereka sendiri, dan juga memberikan efek limpahan (*spillover*) bagi orang lain di dalam rumah tangga.

Pelajaran global tersebut dapat ditarik ke dalam konteks Indonesia untuk membangun skema inklusi produktif PKH. Elemen kunci dari kegiatan percontohan diuraikan secara singkat di bawah ini (**lihat Gambar A4**):

Gambar A4: Langkah-Langkah untuk Mengimplementasikan Program Inklusi yang Produktif bagi Pemilik Usaha Keluarga PKH



□ Siapkan pilot untuk menguji model dan melakukan penilaian pasar.

Konteks perdesaan, pesisir, dan perkotaan/semi-perkotaan memerlukan intervensi yang dirancang khusus agar sesuai dengan kondisi setempat. Percontohan inklusi produktif untuk keluarga penerima PKH dapat diuji di beberapa lokasi yang berbeda, dengan penilaian pasar di setiap lokasi harus menginformasikan desainnya. Misalnya, FGD dengan pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan pelaku pasar dapat menjaring mitra mana yang akan dilibatkan. Selain itu, membentuk komite kecil antara pemerintah dan pelaku pasar untuk meninjau dan menyetujui rencana usaha dan memberikan saran program secara berkelanjutan.

- *Asesmen Keterampilan – Identifikasi titik masuk dalam keluarga, khususnya yang memiliki kapasitas dan kemauan terbesar untuk terlibat secara produktif.*

Meskipun intervensi tambahan PKH yang ada dirancang untuk penerima manfaat PKH, mereka mungkin tidak memiliki keinginan atau keterampilan untuk mengambil peran ini, terutama jika tidak memiliki keterampilan melek huruf atau berhitung, dan dibebani tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Karena anggota keluarga penerima PKH lainnya memiliki keterampilan, kapasitas, dan minat yang berbeda, keluarga tersebut bisa mengidentifikasi siapa di dalam rumah tangga yang paling cocok untuk mengelola usaha. Fasilitator PKH dapat membantu proses ini dengan melakukan penilaian sederhana sebagai bagian dari modul manajemen keuangan P2K2

Demikian pula, tidak semua rumah tangga ingin berpartisipasi dalam skema ini. Banyak keluarga mengerahkan sumber dayanya untuk merawat orang yang sakit kronis atau penyandang disabilitas, dan mungkin tidak ingin terlibat. Partisipasi dalam skema semacam itu didasarkan pada keinginan untuk ikut serta dan diputuskan sendiri oleh keluarga.

- *Tugas fasilitator usaha harus diberikan kepada individu yang dipilih, dengan wewenang untuk membangun kapasitas usaha anggota keluarga penerima PKH.*

Fasilitator PKH direkrut untuk mengelola sesi P2K2 dan memungkinkan keluarga untuk meraih kesehatan dan pendidikan yang baik. Meskipun mengajarkan manajemen keuangan adalah bagian dari tugas fasilitator, menghubungkan keluarga dengan peluang ekonomi yang lebih baik tetap berada di luar jangkauan mereka. Inklusi ekonomi membutuhkan keahlian khusus dalam manajemen usaha. Menemukan dan mempertahankan fasilitator usaha yang berkualitas tinggi sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah yang melaksanakan program ini.

Memanfaatkan konsultan PLUT untuk memainkan peran sebagai fasilitator usaha keluarga penerima PKH dapat menjadi solusi. Keuntungannya, konsultan PLUT memiliki wewenang untuk membentuk UKM bagi masyarakat miskin dan melatih mereka untuk mengelolanya.⁴⁴ Melengkapi keterampilan yang ada dengan penggunaan alat tabel dan *e-learning* membantu memfokuskan upaya dalam memastikan bahwa materi tersebut dapat digunakan oleh penerima PKH. Mengingat bahwa MoU sudah ada di tingkat nasional antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM, strategi optimal yang perlu dijalankan adalah Kementerian Sosial dapat memberikan insentif keuangan kepada fasilitator PLUT sebagai kompensasi atas tambahan upaya dalam mendukung keluarga penerima PKH.

- *Fasilitator usaha harus mendukung peserta untuk membuat rencana bisnis usaha mereka.*

Pelajaran yang dipetik dari negara-negara lain menyoroti bahwa proses merumuskan rencana bisnis memungkinkan peserta untuk memikirkan “mur” dan “baut” dari usaha mereka—di mana mendapatkan input, bagaimana menjangkau pasar yang dituju, mengantisipasi laba, dan bagaimana memperluas usaha secara terus-menerus.⁴⁵ Evaluasi program di Paraguay dan Kolombia menunjukkan bahwa peserta mendapati proses penyusunan perencanaan bisnis memberdayakan mereka, karena meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri pada usaha pilihannya.

⁴⁴ Fasilitator PLUT dilatih oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada delapan bidang, termasuk manajemen, pemasaran, pemrosesan, cara memperoleh lisensi dan izin, hubungan dengan penyedia layanan keuangan, dan seterusnya. Kurikulum pelatihan dikembangkan oleh KOMPAK dan telah diarusutamakan di Kementerian Koperasi dan UKM melalui kursus secara daring.

⁴⁵ Rincon, 2019.

Menurut fasilitator usaha, upaya ini juga membantu memastikan bahwa penerima manfaat menggunakan dana secara efektif. Setelah rencana bisnis disetujui oleh komite kecil yang terdiri dari tokoh setempat, modal awal untuk memulai usaha harus ditransfer ke penerima manfaat, dengan ditetapkan pada batas atas, ditentukan oleh rencana bisnis, dan kebutuhan usaha tertentu.

- *Percontohan inklusi produktif harus berjalan selama 24-36 bulan dengan dukungan pelatihan, dan 12 bulan terakhir untuk memastikan keberlanjutan usaha.*

Sebagian besar skema inklusi produktif diimplementasikan selama 24 bulan, meskipun evaluasi dampak menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen bisnis gagal setelah dukungan ditarik.⁴⁶ Tambahan 12 bulan untuk memantau kemajuan usaha dan menghubungkan usaha-usaha yang sukses dengan skema keuangan mikro “pemula” seperti pembiayaan ultra mikro (UMI). Di Haiti dan di Bangladesh, keterkaitan dengan layanan keuangan mikro yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat mempertahankan modal dan memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Percontohan/uji coba program produktif inklusi di perkotaan dan perdesaan perlu mengadopsi pendekatan yang berbeda. Fasilitator usaha di perdesaan harus mendorong petani berproduksi untuk pasar dengan fokus pada tanaman dan komoditas bernilai tinggi, serta membuat perjanjian dengan pembeli lokal. Dengan demikian, peluang bagi petani terbuka untuk secara kolektif membeli input dari pembeli (untuk mengurangi biaya unit), berinvestasi dalam traktor dan alat-alat lain untuk meningkatkan produktivitas, dan secara kolektif menjual komoditas mereka sesuai dengan persyaratan dan standar pembeli. Di daerah perkotaan dengan UKM berkembang pesat, program semacam ini dapat membantu mengatasi hambatan dalam perizinan, pemrosesan, dan pemasaran, serta membantu usaha beroperasi lebih efektif.

⁴⁶ Huda dan Simanowitz, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Andreawan, M.K., I. S.Banuwa, dan I. Zulkarnain. 2015. "Pengaruh Sistem Olah Tanah terhadap Aliran Permukaan dan Erosi pada Pertanaman Singkong di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung". *Jurnal Teknik Pertanian Lampung* 4 (1): 27-34.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2019. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2018* [dalam jaringan]. http://www.bnptki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf. Diakses pada 22 Maret 2019.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir". dibi.bnpp.go.id. Diakses pada 7 April 2019.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2017. *Survei Angkatan Kerja Nasional 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2015. *Survei Angkatan Kerja Nasional 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2014. *Survei Angkatan Kerja Nasional 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2013. *Survei Angkatan Kerja Nasional 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2016. *Distribusi Persentase PDRB Kota Surakarta Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Persen)*. <https://surakartakota.bps.go.id/dynamictable/2017/07/06/14/distribusi-persentase-pdrb-kota-surakarta-tahun-dasar-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2016-persen-.html>. Diakses pada 22 Mei 2019.

_____. 2018. *Katalog: 8201022. Distribusi Perdagangan Komoditas Telur Ayam Ras Indonesia Tahun 2018*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2018. *Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2007-2017*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/10/29/1322/produksi-jagung-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-ton-2007-2017.html>. Diakses pada 25 Mei 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. 2018a. *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2018*. Kabupaten Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu.

_____. 2018b. *Kecamatan Cantigi dalam Angka dalam Angka 2018*. Kabupaten Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. 2014. *Luas Panen dan Produksi Menurut Jenis Komoditas (Tahun 2013)*. <https://pacitankab.bps.go.id/statictable/2014/11/01/17/luas-panen-dan-produksi-menurut-jenis-komoditas-tahun-2013-.html>. Diakses pada 25 Mei 2019.

_____ 2018. *Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ton) Tahun 2007-2017*. <https://jatim.bps.go.id/static/2018/10/29/1322/produksi-jagung-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-ton-2007-2017.html>. Diakses pada 25 Mei 2019.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2018. *Kota Surakarta dalam Angka 2018*. Kota Surakarta: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. 2016. *Potret Jagung Indonesia Menuju Swasembada Tahun 2017*.

Baird, S., McKenzie, D. dan Özler, B. 2018. "The Effects of Cash Transfers on Adult Labor Market Outcomes." *IZA Journal of Development and Migration* [dalam jaringan] 8(22). Tersedia di: doi.org/10.1186/s40176-018-0131-9. Diakses pada 25 April 2019.

Balai Latihan Kerja Surakarta. 2017. *Pelayanan* [dalam jaringan]. <http://www.blksurakarta.com/pelayanan.php>. Diakses pada 20 Mei 2019.

Balai Penelitian Tanah (Balittanah) Kementerian Pertanian. 2018. *Rapat Koordinasi Pengamanan Pertanaman Padi yang Terdampak Kekeringan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon* [dalam jaringan]. <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/1374-rapat-koordinasi-pengamanan-pertanaman-padi-yang-terdampak-kekeringan-di-kabupaten-indramayu-dan-kabupaten-cirebon>. Diakses pada 9 April 2019.

Banerjee, A.V., Hanna, R., Kreindler, G.E., dan Olken, B.A. 2017. "Debunking the Stereotype of the Lazy Welfare Recipient: Evidence from Cash Transfer Programs". *The World Bank Research Observers* [dalam jaringan] 32(2), 155-184. Tersedia di: [doi: 10.1093/wbro/lkx002](https://doi.org/10.1093/wbro/lkx002). Diakses pada 25 April 2019.

Bianchi, M. dan Bobba, M. 2012. "Liquidity, Risk, and Occupational Choices. *Review of Economics Studies*" [dalam jaringan] 80, 491-511. Tersedia di: [10.1093/restud/rds031](https://doi.org/10.1093/restud/rds031). Diakses pada 25 April 2019.

Cahyadi, Nur, Rema Hanna, Benjamin A. Olken, Rizal Adi Prima, Elan Satriawan, dan Ekki Syamsulhakim. 2018. *Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia*. Jakarta: TNP2K. [Dalam jaringan] <https://economics.mit.edu/files/15075>. Diakses pada 15 April 2018.

CNN Indonesia. 2019. "Menkeu Masukkan Anggaran 'Kartu Sakti' Jokowi di APBN 2020". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190423175131-532-388978/menkeu-masukkan-anggaran-kartu-sakti-jokowi-di-apbn-2020>. Diakses pada 24 Mei 2019.

DFID (The Department for International Development). 1999. *Sustainable livelihoods guidance sheets*. DFID 94 Victoria Street, London SW1E 5JL.

Direktorat Irigasi Pertanian. 2018. *Pedoman Teknis Pengembangan Embung Pertanian*. <http://psp.pertanian.go.id/assets/file/2017/Pedoman%20Teknis%20Embung%202017.pdf>

Fanesa, Fargomeli. 2014. "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur". *Journal "Acta Diurna"* Volume III. No.3. Tahun 2014.

Fundacion Capital, 2018. *Sembrando Oportunidades: Familia por Familia*, Bogota: Fundacion Capital

Gabrillin, A. 2019. "Jokowi: Insentif Kartu Pra Kerja Bukan Berarti Gaji untuk Pengangguran". *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/10/21305071/jokowi-insentif-kartu-pra-kerja-bukan-berarti-gaji-untuk-pengangguran>. Diakses pada 24 Mei 2019.

Garganta, S., Gasparini, L. dan Marchionni, M. 2017. "Cash Transfers and Female Labor Force Participation: The Case of AUH in Argentina". *IZA Journal of Labor Policy* [dalam jaringan] 6(10). Tersedia di: doi: 10.1186/s40173-017-0089-x. Diakses pada 25 April 2019.

Gerler, P, S Martinez and M Rubio-Codina (2012) 'Investing cash transfers to raise long term living standards,' *American Economic Journal: Applied Economics* 4 (1): 164-92

Granovetter, M. S. "The Strength of Weak Ties". *American Journal of Sociology* Vol. 78 (6), 1973, pp. 1360-1380.

Handa S, S Daidone, A Peterman, B Davis, A Pereira and T Palermo (2017) *Myth-busting? Confronting six common perceptions about unconditional cash transfers as a poverty reduction strategy in Africa*, Innocenti working paper No 2017-11, Rome and Geneva: FAO and UNICEF

Hashemi, S.M. dan Umaira, W. 2011. *New Pathways for the Poorest: The Graduation Model from BRAC*. Center for Social Protection Research. Nomor laporan: 10.

Hutagalung, S. A. dan Indrio, V. T. 2019. *Laporan Tematik Studi Midline MAMPU Tema 3: Akses Perempuan Buruh Migran Luar Negeri terhadap Layanan Perlindungan*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Intan, A.H. 1997. "Pengembangan Mutu SDM Agribisnis Menghadapi Tahun 2020" dalam *Agrimedia* I (3).

Iza World of Labour, 2018. *Entrepreneurship for Poor in Developing Countries*. Blog: <https://wol.iza.org/articles/entrepreneurship-for-poor-in-developing-countries/long>

Juhadi, Wahyu Setyaningsih, Nia Kurniasari. 2016. "Pola Perilaku Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Banjarwangu Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah". *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian*. Universitas Negeri Semarang.

Kementerian Sosial. 2019. *Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial [dalam jaringan]. <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>. Diakses pada 11 April 2019.

_____. (2017) *E-Warong KUBE PKH* [dalam jaringan]. <https://www.kemsos.go.id/content/e-warong>. Diakses pada 18 Mei 2019.

_____. *Kelompok Usaha Bersama (KUBE)* [dalam jaringan]. <https://www.kemsos.go.id/content/kube>. Diakses pada 18 Mei 2019.

Kompak. 2018. *Skill Development Center (SDC): Instrumen Kolaboratif dalam Menciptakan Sinergi yang Kokoh untuk Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan* [dalam jaringan]. <http://kompak.or.id/id/highlights/read/skill-development-center-sdc-instrumen-kolaboratif-dalam-menciptakan-sinergi-yang-kokoh-untuk-mengatasi-masalah-ketenagakerjaan>. Diakses pada 20 Mei 2019.

Kompas.com. "BI: Industri Pariwisata Jadi Sektor Paling Hasilkan Devisa". <https://travel.kompas.com/read/2019/03/23/084500627/bi--industri-pariwisata-jadi-sektor-paling-hasilkan-devisa>. Diakses pada 26 Mei 2019.

Kusnadi. 2017. *Kabupaten Indramayu Sumbang 61 Persen Produksi Ikan di Jawa Barat*. <http://www.infopublik.id/read/186919/kabupaten-indramayu-sumbang-61-persen-produksi-ikan-ke-jawa-barat.html>. Diakses pada 25 Mei 2019.

Kusumawardhani, et al. 2016. *Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan Harga BBM*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Macours, K., Premand, P. dan Vakis, R. 2012. *Transfers, Diversification and Household Risk Strategies: Experimental Evidence with Lessons for Climate Change Adaptation*. Makalah kerja riset kebijakan. [Dalam jaringan], tersedia di: <https://pdfs.semanticscholar.org/5f51/3e7da2c401b4f3af51bcd48f2c9ad68ecea.pdf>. Diakses pada 25 April 2019.

Maghfiroh, Irhamni Lailatul . 2014. *Analisis Integrasi Pasar Vertikal Komoditas Jagung (Zea Mays L.) di Jawa Timur*. Skripsi. Universitas Brawijaya.

Maintang, Eka Trianan Yuniarsih, dan Muh. Taufik. 2015. *Analisis Teknologi Budidaya Jagung pada Lahan Sawah Tadah Hujan di Sulawesi Selatan*. Prosiding Seminar Nasional Serealia. <http://balitsereal.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2018/01/15se73.pdf>.

Mawardi, et al., 2017. *Laporan Akhir Hasil Pemantauan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Periode 26 Januari-7 Juli 2016*. Jakarta: The SMERU Research Institute (tidak diterbitkan).

Mawardi, Sulton, Ruhmaniyati, Ana Tamyis, Syaikhu Usman, Asep Kurniawan, dan Budiani (2017) 'Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong Kube-PKH.' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Mukhsin. 2007. "Kompetensi Pemuda Tani yang Perlu Dikembangkan di Jawa Timur". IPB, Bogor, Hal. 154-161.

Ningsih, Rahayu. 2018. *Memperkuat Ekspor Ikan dan Produk Olahan Ikan dari Indonesia ke Kanada*. Laporan penelitian: The Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA).

Oxford Policy Management (OPM) and Institutde of Development Studies (IDS) (2012), *Kenya hunger safety net programme: monitoring and evaluation component quantitative impact evaluation report*, Oxford: Oxford Policy Management.

Parker, S. dan Vogl, T. 2018. *Do Conditional Cash Transfers Improve Economic Outcomes in the Next Generation? Evidence from Mexico*. NBER Working Paper 24303. [Dalam jaringan] tersedia di: doi:10.3386/w24303. Diakses pada 25 April 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai 2017.

Pemerintah Kabupaten Pacitan. *RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021*. <https://pacitankab.go.id/sakip/>. Diakses pada 7 April 2019.

PKH Program Keluarga Harapan. 2017. *Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan* [dalam jaringan]. <http://keluargaharapan.com/pertemuan-peningkatan-kemampuan-keluarga-p2k2-program-keluarga-harapan/>. Diakses pada 17 Mei 2019.

_____. 2016a. *Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH)* [dalam jaringan]. <http://keluargaharapan.com/kelompok-usaha-bersama-program-keluarga-harapan-kube-pkh/>. Diakses pada 18 Mei 2019.

_____. 2016b. *Apa itu Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan dan Manfaatnya* [dalam jaringan]. <http://keluargaharapan.com/apa-itu-family-development-session-fds-program-keluarga-harapan-dan-manfaatnya/>. Diakses pada 17 Mei 2019.

Pinti, Elabe. 2013. *Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Purwandani, Astri Anto, dan Suriansyah. 2014. *Teknologi Budidaya Jagung dengan Pendekatan PTT, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah*. <https://kalteng.litbang.pertanian.go.id/ind/images/data/buku-jagung-2014.pdf>. Diakses pada 25 Mei 2019.

Radarmadiun. 10 April 2019. "Pacitan Masih Butuh Ribuan Guru". <http://radarmadiun.co.id/pacitan-masih-butuh-ribuan-guru/>. Diakses pada 26 April 2019.

Rahayu, Dwi Lestari. 2009. *Desain Peningkatan Daya Saing Industri Pengolahan Ikan Berbasis Perbaikan Kinerja Mutu Dalam Rantai Pasokan Ikan Laut Tangkapan di Wilayah Utara Jawa Barat*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Bogor.

Rasyid, Mohtar. 2009. *Potensi Ekonomi Ikan Dan Produk Perikanan Indonesia Dalam Lingkup Masyarakat Ekonomi Asean*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers UNISBANK: "Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat".

Reily, Michael (2017) *Pemerintah Siapkan 281 Ribu Agen untuk Bantuan Pangan Non-Tunai* [dalam jaringan] <<https://katadata.co.id/berita/2017/12/18/pemerintah-siapkan-281-ribu-agen-untuk-bantuan-pangan-non-tunai>> [24 Oktober 2019].

Schwartz, A. dan Abreu, G. 2007. "Conditional Cash Transfer Programs for Vulnerable Youth: Brazil's Youth Agent and Youth Action Programs". *Journal of International Cooperation in Education*.

Sumaryanto. 2006. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 24 No. 2, Desember 2006: 77-91.

Suradisastra, Kedi. 1983. "Social aspects of small ruminant production: a comparative study of West Java, Indonesia". University of Missouri, Columbia.

[Online], 10(1), 115–133. Tersedia di: <https://www.researchgate.net/publication/266339349>. Diakses pada 25 April 2019.

Tiwari, S. dan Winters, P.C. 2019. "Liquidity Constraints and Migration: Evidence from Indonesia. *International Migration Review*". [Dalam jaringan] 53(1), 254–282. Tersedia di: doi:10.117/0197918318768555. Diakses pada 25 April 2019.

TNP2K. 2015a. *Bantuan Tunai Bersyarat Indonesia untuk Keluarga Miskin*. Jakarta: Kantor Wakil Presiden.

TNP2K. 2015b. *Laporan Akhir untuk Kegiatan Tim KUBE PKH*, Jakarta: Kantor Wakil Presiden.

Warda, et al. 2018. *Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Wijaya, S. D. 12 Oktober 2018. "Kurang 1.200, Pacitan Hanya Dapat Kuota 175 CPNS Guru". *Halo Pacitan*. <http://www.halopacitan.com/read/kurang-1-200-pacitan-hanya-dapat-kuota-175-cpns-guru>. Diakses pada 26 April 2019.

Wirosoedarmo, Ruslan, Tunggul Sutanahaji, Evi Kurniati, dan Rizky Wijayanti. 2011, "Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jagung Menggunakan Metode Analisis Spasial". *Agritech*, Vol. 31, No. 1, Februari 2011.

